



Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora

ISSN: 2502-9622

Terakreditasi Dikti No. 3/E/KPT/2019

Ade Rahma Ayu, Vidya Fatimah
Pengaruh Dukungan Perguruan Tinggi Dan Kepribadian Proaktif Terhadap
Niat Berwirausaha Mahasiswa Kota Medan (430-438)

Sri Sulistyawati, Nelvitia Purba
Strategi Pencegahan Korupsi Dengan Budaya Malu (Studi Komparatif Masyarakat
Melayu Indonesia Dengan Jepang) (439-447)

Cece, Edi Winata
Pengaruh Gaya Mengajar Dosen Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar
Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta Kota Medan (448-454)

Yayuk Yuliana, Julianto Hutasuhut
Budidaya Demplot Tanaman Obat Kelompok Tani Suka Tani Didesa Batu Jong-Jong
Sebagai Sarana Daya Tarik Wisata (455-459)

Nelly Azwarni Sinaga
Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Penerapan Tanggung Jawab Sosial (Corporate
Social Responsibility)/ CSR Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Disekitar Lingkungan
Perseroan Terbatas (PT) (460-465)

Sukmawarti, Nurhidayah
Pengembangan Model Pembelajaran Bercerita Untuk Menumbuhkembangkan
Empati Anak Usia Dini (466-470)

Juliman, Amra Muslimin
Optimalisasi Tatakelola Badan Usaha Milik Desa (471-483)

R. Juli Moertiono
Penyelesaian Sengeta Pengankutan laut (484-492)

San Putra
Efektifitas Layanan Bimbingan Kelompok Untuk Meningkatkan Sikap Kedisiplinan
Siswa (493-500)

Renold Pasaribu
Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran Kurikulum 2013 Melalui Workshop (501-504)

Tota Totor Naibaho
Analisis Perbedaan Tingkat Pendapatan Terhadap Preferensi Konsumen Kopi
Lokal Sumatera Di Kota Medan ((505-513)

Diterbitkan oleh:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah



9 772502 962001

VOL
4

NOMOR
1

HALAMAN
430-513

MEI,
TAHUN
2019

JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA (JP2SH)

Penerbit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Sekretariat Kampus C/ Abdurahman Syihab Jln. Garu II No. 52 Kelurahan Harjosari I

Email: jp2sh@umnaw.ac.id

<http://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/>

ISSN Cetak: 2502-9622 :: ISSN Online: 2502-9630

DEWAN REDAKSI:

Rektor

Wakil Rektor I

Wakil Rektor II

Wakil Rektor III

Wakil Rektor IV

REDAKTUR:

Dr. H. Firmansyah, M.Si

Prof. Dr. Ahmad Laut Hasibuan, M.Pd

Dr. Syafwan Hadi Umri, M.Pd

Dr. Anwar Sadat Harahap, S. Ag, M.Hum

Dr. Salamuddin Selian, M.Hum

Dr. Madyunus Salayan, M.Si

Drs. Kondar Siregar, MA, P.h.D

Dr. Ir. Bambang Hermanto, M.Si

Dr. Samran, M.Si, Apt

Dr. Risnawaty, M.Hum

MITRA BESTARI:

Prof. Dr. Alesyanti, M.Pd

(Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

Nelvitia Purba, SH, M.Hum, Ph.D

(Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah)

Dr. Nina. S Salmaniah Siregar

(Universitas Medan Area)

PENYUNTING BAHASA:

Dra. Rosmawati Harahap, M.Pd, Ph.D

Dr. Susy Deliany, M.Hum

Dr. Yulia Arfanti, M.Hum

DESAIN SAMPUL:

Alkausar Saragih

SEKRETARIAT:

Dimas Garda, SE

Mariatul Suhaibah, S.Pd

Jurnal elektronik JP2SH merupakan jurnal yang di kelola dan diterbitkan oleh LP2M Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan. terbit pertama sekali pada Maret 2016. JP2SH merupakan jurnal bidang social Humaniora dan merupakan hasil penelitian, JP2SH diperuntukkan bagi para peneliti, guru, praktisi, dan mahasiswa, keseluruhan jurnal tersebut berbasis ojs dan terindeks di beberapa pengindeks. jurnal ini diterbitkan setiap bulan Mei dan November.

Segala sesuatu yang menyangkut isi, perijinan pengutipan atau penggunaan software komputer untuk pembuatan naskah ini atau hal lain yang terkait dengan HAKI yang dilakukan penulis artikel, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul karenanya, menjadi tanggung jawab penuh penulis artikel

DAFTAR ISI

	Halaman
Ade Rahma Ayu, Vidya Fathimah Pengaruh Dukungan Perguruan Tinggi Dan Kepribadian Proaktif Terhadap Niat Berwirausaha Mahasiswa Kota Medan	430-438
Sri Sulistyawati, Nelvitia Purba Strategi Pencegahan Korupsi Dengan Budaya Malu (Studi Komparatif Masyarakat Melayu Indonesia Dengan Jepang)	439-447
Cece, Edi Winata Pengaruh Gaya Mengajar Dosen Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta Kota Medan	448-454
Yayuk Yuliana, Julianto Hutasuhut Budidaya Demplot Tanaman Obat Kelompok Tani Suka Tani Didesa Batu Jong-Jong Sebagai Sarana Daya Tarik Wisata	455-459
Nelly Azwarni Sinaga Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Penerapan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)/ CSR Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Disekitar Lingkungan Perseroan Terbatas (PT)	460-465
Sukmawarti, Nurhidayah Pengembangan Model Pembelajaran Bercerita Untuk Menumbuhkembangkan Empati Anak Usia Dini	466-470
Juliman, Amra Muslimin Optimalisasi Tatakelola Badan Usaha Milik Desa	471-483
R. Juli Moertiono Penyelesaian Sengketa Pengangkutan Laut	484-492
San Putra Efektifitas Layanan Bimbingan Kelompok Untuk Meningkatkan Sikap Kedisiplinan Siswa	493-500
Renold Pasaribu Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 Melalui Workshop	501-504
Tota Totor Naibaho Analisis Perbedaan Tingkat Pendapatan Terhadap Preferensi Konsumen Kopi Lokal Sumatera Di Kota Medan	505-513

PENGARUH DUKUNGAN PERGURUAN TINGGI DAN KEPERIBADIAN PROAKTIF TERHADAP NIAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA KOTA MEDAN

Ade Rahma Ayu¹, Vidya Fathimah²
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan^{1,2}
Jl. Sakti Lubis No. 80 Simpang Limun Medan
Ayusiregar1987@gmail.com,
vidyafath@gmail.com

Abstrak

Dengan adanya pola pemikiran sebagian banyak mahasiswa dan orang tua, setelah kuliah harus bekerja sebagai karyawan di perusahaan yang terkenal dan menjadi karyawan tetap, sehingga menimbulkan permasalahan yang ada yaitu semakin meningkatnya jumlah pengangguran yang diisi oleh para sarjana tamatan perguruan tinggi, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan memasukkan mata kuliah Kewirausahaan ke dalam kurikulum pendidikan, khususnya pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Adanya mata kuliah Kewirausahaan dimaksudkan untuk menambah wawasan mahasiswa terhadap dunia kewirausahaan serta memotivasi mereka untuk ikut terlibat langsung dalam dunia wirausaha sebagai wirausahawan muda yang tangguh, sehingga mereka dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Selain itu juga, kewirausahaan dianggap sebagai penentu yang penting dalam pertumbuhan ekonomi yang cepat, lapangan kerja dan penciptaan lapangan kerja serta pengembangan sosial yang positif di dalam suatu Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model empiris yang meneliti apakah kepribadian proaktif dari mahasiswa dan pendukung perguruan tinggi mempengaruhi niat kewirausahaan mereka. Penelitian ini bersifat penelitian penjelasan (explanatory research), dilakukan secara deskriptif atau melalui uraian- uraian yang menggambarkan dan menjelaskan subjek penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah kerja penelitian kuantitatif. Data primer yang bersumber langsung dari objek penelitian baik itu data observasi, dan data hasil wawancara terstruktur terhadap responden dengan menggunakan kuesioner. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah Kewirausahaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) dan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) di kota medan yang dimana mulai berdiri di atas tahun 2000. Penelitian dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 24.0 yang dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan Perguruan Tinggi dan Kepribadian Proaktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berwirausaha mahasiswa perguruan tinggi swasta di Kota Medan. Seluruh konstruk pembentuk masing-masing variabel mampu menjelaskan keberadaannya terhadap variabel laten.

Kata kunci: *entrepreneurship, dukungan perguruan tinggi, kepribadian proaktif, niat berwirausaha*

Abstract

With the thought patterns of many students and parents, after college, they have to work as employees in well-known companies and become permanent employees, so that there are problems that arise, namely the increasing number of unemployed people filled with college graduates, one of the efforts made by the government by entering Entrepreneurship courses into the education curriculum, especially education at the university level. The Entrepreneurship course is intended to broaden students' knowledge of the world of entrepreneurship and motivate them to be directly involved in the world of entrepreneurs as strong young entrepreneurs, so that they can contribute to improving the Indonesian economy. In addition, entrepreneurship is considered an important determinant in rapid economic growth, employment and job creation and positive social development in a country. This study aims to develop an empirical model that examines whether the proactive personality of

students and supporters of higher education influences their entrepreneurial intentions. This research is an explanatory research, carried out descriptively or through descriptions that describe and explain the research subject. The approach in this study follows the steps of quantitative research work. Primary data sourced directly from the object of the research, both observation data, and data from structure interviews with respondents using a questionnaire. The population and sample in this study were all students who had taken the Entrepreneurship course in Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) and Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) in Medan, which began to stand above 2000. The study was conducted using SPSS version 24.0 software where the results of this study showed that the support of Higher Education and Proactive Personality had a positive and significant effect on the intention of entrepreneurship in private tertiary institutions in Medan City. All constructs forming each variable can explain its existence to latent variables.

Keywords: *entrepreneurship, university support, proactive personality, and entrepreneurial intention*

1. PENDAHULUAN

UU No 20 tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif karena pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. Pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa.

Masuknya mata kuliah kewirausahaan didalam suatu kurikulum pendidikan di Indonesia menurut Mendiknas bertujuan untuk pembentukan karakter yang ujungnya menciptakan mahasiswa entrepreneur dan juga membentuk pola pikir yang fleksibel. Dengan pemikiran yang fleksibel maka daya kreativitas akan berkembang sehingga terciptalah inovasi. Walaupun mata kuliah kewirausahaan sudah menjadi salah satu mata kuliah yang wajib di ambil oleh mahasiswa tetapi masih terdapat juga mahasiswa yang kurang tertarik untuk

berwirausaha. Padahal telah kita keteahui bahwa suatu Negara dikatakan Negara maju apabila jumlah wirausaha nya mencapai 2% dari jumlah penduduknya. Dan Indonesia sendiri masih jauh dari angka tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti faktor apa yang sangat mempengaruhi niat berwirausaha seorang mahasiswa.

1.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh gambaran jelas dan mengembangkan model empiris yang melihat apakah PP (*Proactive personality*) mahasiswa dan dukungan lingkungan perguruan tinggi (dukungan pendidikan, dukungan pengembangan konsep dan dukungan pengembangan bisnis) mempengaruhi niat kewirausahaan mahasiswa baik secara parsial maupun secara simultan.

1.2 Urgensi Penelitian

Saat ini tingkat pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Kegiatan kewirausahaan pada mahasiswa merupakan cara yang dianggap mampu menangani masalah pengangguran. Melihat banyaknya mahasiswa yang mempunyai pola pikir, selesai dari kuliah langsung mencari pekerjaan yang tetap dan takut untuk mengambil resiko, sehingga banyaknya sekarang di Indonesia pengangguran berijazah, dari kenyataan seperti ini peneliti merasa ketertarikan untuk mencari tahu factor apa

saja yang membuat mahasiswa kurang keinginan atau ketertarikan untuk membuka lapangan kerja sendiri dan untuk masyarakat dan apa yang menjadi bertambahnya atau berkurangnya niat berwirausaha mahasiswa sewaktu menempuh pendidikan di perguruan tinggi. dan penelitian ini mempunyai tingkat keutamaannya ingin melihat apa yang paling mempengaruhi niat untuk berwirausahaan bagi mahasiswa.

2. METODE

Penelitian ini bersifat penelitian penjelasan (*explanatory research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dengan menjelaskan pengaruh antar variabel atau hubungan kausal antara variabel yang diteliti dan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat berwirausaha mahasiswa di perguruan tinggi swasta di kota medan serta mengetahui faktor yang paling berpengaruh dalam menimbulkan niat berwirausaha mahasiswa tersebut. Penelitian ini merupakan proses yang dilakukan secara bertahap, yakni dari perencanaan dan perancangan penelitian, menentukan fokus penelitian, waktu penelitian, pengumpulan data, analisis, dan penyajian hasil penelitian. Penulisan hasil penelitian ini dilakukan secara deskriptif atau melalui uraian-uraian yang menggambarkan dan menjelaskan subjek penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah kerja penelitian kuantitatif.

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sekolah tinggi ilmu ekonomi (STIE) dan Sekolah tinggi ilmu manajemen (STIM) di kota medan yang dimana mulai berdiri di atas tahun 2000 dan Waktu Penelitian

dilakukan Selama 1 tahun

2.2 Populasi Dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah Kewirausahaan sekolah tinggi ilmu ekonomi (STIE) dan Sekolah tinggi ilmu manajemen (STIM) di kota medan yang dimana mulai berdiri di atas tahun 2000. Dalam penelitian ini teknik sampel yang digunakan ialah *probability sampling*, pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampel ini meliputi, *simple random, proportionate stratified random, disproportionate stratified random* dan area (*cluster*) sampling. Karena obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas maka digunakan *teknik cluster sampling*. Teknik area (*cluster*) sampling ini, dilakukan dengan dua tahap yaitu, tahap penentuan daerah dan tahap penentuan individu. Selain itu juga pengambilannya secara *accidental Sampling* yaitu pengambilan sampel dgn jalan mengambil individu siapa saja yg dapat dijangkau atau ditemui.

2.3 Instrumen Penelitian

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kepribadian Proaktif (PP) (X1) dan Dukungan Perguruan Tinggi (X2) Sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah Niat Berwirausaha (Y). Operasionalisasi variabel terdiri dari variabel, definisi operasional, indikator, dan skala pengukuran. Adapun operasionalisasi variabel tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 2.2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Kepribadian Proaktif (PP) (X1)	Ukuran individual, ukuran disposisi kecenderungan individu untuk berinisiatif dalam mempengaruhi situasi dan / atau lingkungan mereka. Prabu (2012)	1. Mengambil alih, 2. Kreativitas dan 3. Karir yang berhubungan dengan Inisiatif. Parker (2011)	Skala Likert

Dukungan Perguruan Tinggi (Y1)	Sejauh mana perguruan tinggi tersebut memberi mahasiswa pengetahuan, keterampilan, magang dan kesempatan <i>networking</i> yang dibutuhkan untuk memulai usaha bisnis baru (Saeed et al.,2015)	1. Dukungan pendidikan yang dirasakan, 2. Dukungan pengembangan konsep yang dirasakan dan 3. Dukungan pengembangan bisnis Kraaijenbrink dkk. (2009) dan Saeed et al. (2015)	Skala Likert
Niat Berwirausaha (Y2)	Perencanaan dan pelaksanaan gagasan bisnis, yang berorientasi pada proses mental (Gupta dan Bhawe, 2007)	1. Sikap, 2. Norma subjektif dan 3. Kontrol perilaku (Roxas et al., 2008)	Skala Likert

2.4 Teknik Analisis Data

Kumpulan data yang sudah diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan metode sebagai berikut Metode Analisis Deskriptif dan juga Metode Analisis Kuantitatif, Alat uji yang dipergunakan untuk menganalisis hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linear Berganda untuk menguji Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kepribadian Proaktif (X1) dan Dukungan Perguruan Tinggi (X2) Sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah Niat Berwirausaha mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Medan (Y) dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 24.0. Untuk menganalisis pengaruh (1) Kepribadian Proaktif dan (2) Dukungan Perguruan Tinggi terhadap Niat berwirausaha Model untuk hipotesis adalah: $Y1 = a + b1 X1 + b2 X2 + e$
Keterangan :

Y = Niat Berwirausaha
X1 = Kepribadian Proaktif
X2 = Dukungan Perguruan Tinggi
e = Standar Error
a = Konstanta
b1, b2, b3 = Koefisien regresi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik responden

Karakteristik responden merupakan identitas responden yang menjadi sampel penelitian. Sampel penelitian ini sebanyak 215 orang mahasiswa yang telah mengisi kuisioner berdasarkan jenis kelamin, usia, dan asal perguruan tinggi. Berikut ini disajikan data karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 3.1: Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	134
2	Wanita	81
Total		215

Dari tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden pria lebih

banyak jika dibandingkan dengan responden wanita.

Tabel 3.2: Karakteristik responden berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah
1	19-22 tahun	147
2	23-26 tahun	68
Total		215

Dari tabel 3.2 diatas dapat di ketahui bahwa jumlah responden yang berusia antara 19-22 lebih banyak yaitu sebanyak 147 orang, sedangkan

responden yang berusia antara 23-26 tahun sebanyak 68 orang. Hal ini menunjukkan bahwa diusia muda para mahasiswa lebih memiliki niat yang tinggi

untuk berwirausaha yaitu antara rentang 19-22 tahun.

Tabel 3.3: Karakteristik responden berdasarkan asal perguruan tinggi

No	Asal Perguruan Tinggi	Jumlah
1	STIE Eka Prasetya	42
2	STIE ITMI	33
3	STIE IT&B	0
4	STIE Mikroskill	35
5	STIM Sukma	105
Total		215

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan asal perguruan tinggi dari STIE Eka Prasetya sebanyak 42 orang mahasiswa, STIE ITMI sebanyak 33 orang mahasiswa, STIE IT&B tidak ada, dikarenakan mahasiswa IT&B belum ada menerapkan mata kuliah kewirausahaan dikampus mereka dan baru akan diterapkan mata kuliah kewirausahaan tahun ini, STIE Mikroskill sebanyak 35 orang mahasiswa

sedangkan STIM Sukma sebanyak 105 orang mahasiswa.

3.2 Hasil uji validitas dan reliabilitas

Uji validitas digunakan digunakan untuk melihat ketepatan instrument yang digunakan dalam penelitian. Instrumen dikatakan valid jika nilai rhitung > rtabel. Hasil validitas dari setiap instrument variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4: Validitas instrument variabel Dukungan Perguruan Tinggi (X1)

Instrumen	Nilai Validitas		Kesimpulan
	rhitung	Rtabel	
Dukungan Perguruan Tinggi 1	0,711	0,3	Valid
Dukungan Perguruan Tinggi 2	0,702		Valid
Dukungan Perguruan Tinggi 3	0,787		Valid
Dukungan Perguruan Tinggi 4	0,633		Valid
Dukungan Perguruan Tinggi 5	0,720		Valid
Dukungan Perguruan Tinggi 6	0,671		Valid
Dukungan Perguruan Tinggi 7	0,445		Valid

Dari tabel 3.4 diatas nilai r-hitung > 0.3, dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa instrumen pernyataan dukungan perguruan tinggi yang digunakan valid.

Tabel 3.5: Validitas instrumen variabel Kepribadian Proaktif (X2)

Instrumen	Nilai Validitas		Kesimpulan
	rhitung	Rtabel	
Kepribadian Proaktif 1	0,690	0,3	Valid
Kepribadian Proaktif 2	0,699		Valid
Kepribadian Proaktif 3	0,894		Valid
Kepribadian Proaktif 4	0,875		Valid
Kepribadian Proaktif 5	0,830		Valid
Kepribadian Proaktif 6	0,888		Valid
Kepribadian Proaktif 7	0,719		Valid
Kepribadian Proaktif 8	0,805		Valid
Kepribadian Proaktif 9	0,877		Valid
Kepribadian Proaktif 10	0,688		Valid

Dari tabel 3.5 terlihat bahwa hasil pengujian masing-masing instrumen

variabel kepribadian proaktif (X2) memiliki nilai r-hitung > 0.3, dengan

demikian instrumen pernyataan dari variabel kepribadian proaktif yang digunakan valid.

Tabel 3.6: Validitas instrumen variabel Niat Berwirausaha (Y)

Instrumen	Nilai Validitas		Kesimpulan
	rhitung	Rtabel	
Niat Berwirausaha 1	0,513	0,3	Valid
Niat Berwirausaha 2	0,652		Valid
Niat Berwirausaha 3	0,420		Valid
Niat Berwirausaha 4	0,582		Valid
Niat Berwirausaha 5	0,410		Valid
Niat Berwirausaha 6	0,331		Valid
Niat Berwirausaha 7	0,436		Valid
Niat Berwirausaha 8	0,489		Valid
Niat Berwirausaha 9	0,503		Valid
Niat Berwirausaha 10	0,665		Valid
Niat Berwirausaha 11	0,482		Valid
Niat Berwirausaha 12	0,642		Valid
Niat Berwirausaha 13	0,596		Valid
Niat Berwirausaha 14	0,427		Valid
Niat Berwirausaha 15	0,385		Valid
Niat Berwirausaha 16	0,422		Valid
Niat Berwirausaha 17	0,643		Valid
Niat Berwirausaha 18	0,550		Valid
Niat Berwirausaha 19	0,629		Valid
Niat Berwirausaha 20	0,689		Valid

Dari tabel 3.6 diatas terlihat bahwa hasil pengujian masing-masing instrumen variabel Niat Berwirausaha (Y) memiliki nilai r-hitung > 0.3, dengan demikian instrumen pernyataan dari variabel niat berwirausaha yang digunakan valid. Uji reliabilitas dilakukan untuk menjamin instrumen pernyataan yang digunakan

merupakan instrumen yang konsisten, stabil dan handal jika digunakan secara berulang-ulang. Instrumen dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* hitung > *cronbach alpha* toleransi (0.6). Hasil pengujian reliabilitas terlihat seperti berikut ini:

Tabel 3.7: Hasil Reliabilitas Instrumen Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian

No	Variabel	Nilai Cronbach's Alfa	Kesimpulan
1	Dukungan Perguruan Tinggi (X1)	0,818	Reliabel
2	Kepribadian Proaktif (X2)	0,952	Reliabel
3	Niat Berwirausaha (Y)	0,898	Reliabel

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* seluruh variabel lebih besar dari 0.6, maka dapat disimpulkan bahwa kuisisioner penelitian ini dikatakan reliabel.

3.3 Hasil uji regresi linear berganda

diatas, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: $Y=30,715+0,300X_1+1,031X_2$. Pada model regresi linear berganda diperoleh nilai konstanta niat berwirausaha sebesar 30,715 artinya jika nilai variabel bebas (X₁ dan X₂) nilainya 0, maka variabel

terikat (Y) nilainya sebesar 30,715. Koefisien regresi masing-masing variabel bebas bernilai positif, artinya niat berwirausaha mahasiswa perguruan tinggi swasta di Kota Medan dapat dipengaruhi oleh dukungan perguruan tinggi dan

kepribadian proaktif. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dukungan perguruan tinggi dan kepribadian proaktif terhadap niat berwirausaha mahasiswa perguruan tinggi swasta kota Medan.

Tabel 3.8: Hasil Uji Regresi Linear berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30,715	4,804		6,394	,000
	Dukungan perguruan tinggi	,300	,116	,151	2,592	,010
	Kepribadian pro aktif	1,031	,113	,533	9,153	,000

a. Dependent Variable: Niat berwirausaha

Pengujian hipotesis

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi bertujuan untuk

mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9: Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,601 ^a	,361	,355	8,08259

a. Predictors: (Constant), Kepribadian pro aktif, Dukungan perguruan tinggi

Nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0.361 atau 36.1% menunjukkan bahwa variabel dukungan perguruan tinggi dan kepribadian proaktif mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada niat berwirausaha mahasiswa perguruan tinggi swasta di kota Medan, sedangkan sisanya 63,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti ekspektasi pendapatan, pembelajaran kewirausahaan, motivasi kewirausahaan dan sebagainya.

Uji Simultan (uji F)

Uji simultan (uji F), uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh dukungan perguruan tinggi dan kepribadian proaktif secara bersama-sama, pengujian ini dilakukan pada tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan = 0.05 (5%).

Tabel 3.10: Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

terdiri dari dukungan perguruan tinggi (X1) dan kepribadian proaktif (X2) mampu menjelaskan keragaman variabel terikat (Y). Dengan demikian variabel dukungan perguruan tinggi dan kepribadian proaktif secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berwirausaha mahasiswa perguruan tinggi swasta di kota Medan.

Uji Parsial (uji t)

Uji parsial (uji t) bertujuan untuk melihat pengaruh dukungan perguruan tinggi dan kepribadian proaktif terhadap niat berwirausaha mahasiswa secara parsial, tinggi dan kepribadian proaktif terhadap niat berwirausaha mahasiswa secara parsial.

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7824,611	2	3912,305	59,887	,000 ^b
	Residual	13849,603	212	65,328		

Total	21674,214	214			T
-------	-----------	-----	--	--	---

- a. Dependent Variable: Niat berwirausaha
- b. Predictors: (Constant), Kepribadian pro aktif, Dukungan perguruan tinggi
- Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai Fhitung yaitu 59,887 > 3,04 dan nilai signifikan 0.000 < dari

nilai α 0.05. Maka keputusan yang diambil H_0 ditolak H_3 diterima. Dengan diterimanya H_3 menunjukkan bahwa variabel bebas yang Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa:

Tabel 3.11: Hasil Uji Parsial (uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30,715	4,804		6,394	,000
	Dukungan perguruan tinggi	,300	,116	,151	2,592	,010
	Kepribadian pro aktif	1,031	,113	,533	9,153	,000

a. Dependent Variable: Niat berwirausaha

1. Nilai thitung untuk variabel dukungan perguruan tinggi 2,592 > 1,971 dan nilai signifikan 0.010 < dari α 0.05, maka H_0 ditolak dan H_1 atau H_2 diterima, dengan demikian secara parsial variabel dukungan perguruan tinggi berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berwirausaha mahasiswa.
2. Nilai thitung untuk variabel kepribadian proaktif 9,153 > ttabel 1,971 dan nilai signifikan 0,000 < dari nilai α 0.05, maka H_0 ditolak dan H_1 atau H_2 diterima, dengan demikian secara parsial variabel kepribadian proaktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berwirausaha mahasiswa perguruan tinggi swasta kota Medan.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan Perguruan Tinggi dan Kepribadian Proaktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berwirausaha mahasiswa perguruan tinggi swasta di Kota Medan. Seluruh konstruk pembentuk masing-masing variable mampu menjelaskan keberadaannya terhadap variabel laten.

DAFTAR PUSTAKA

- Acs, Z. (2007), "How is entrepreneurship good for economic growth?", *Innovations*, Vol. 1 No. 1, pp. 97-107.
- Ajzen, I. (1991), "The theory of planned behavior", *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50 No. 2, pp. 179-211.
- Astebro, T.B. and Bazzazian, N. (2011), "Universities, entrepreneurship and local economic development", in Fritsch, M. (Ed.), *Handbook of Research on Entrepreneurship and Regional Development*, Edward Elgar, New York, NY, pp. 252-333.
- Audretsch, D.B. (2014), "From the entrepreneurial university to the university for the entrepreneurial society", *The Journal of Technology Transfer*, Vol. 39 No. 3, pp. 313-321.
- Bae, T.J., Qian, S., Miao, C. and Fiet, J.O. (2014), "The relationship between entrepreneurship education and entrepreneurial intentions: a meta-analytic review", *Entrepreneurship Theory and Practice*, Vol. 38 No. 2, pp. 217-254.
- Barbosa, S.D., Gerhardt, M.W. and Kickul, J.R. (2007), "The role of cognitive style and risk preference on

- entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intentions*”, *Journal of Leadership & Organizational Studies*, Vol. 13 No. 4, pp. 86-104.
- Bosma, N. and Harding, R. (2006), *Global Entrepreneurship Monitor 2006 Summary Results*, London Business School, London.
- Fayolle, A. and Liñán, F. (2014), “*The future of research on entrepreneurial intentions*”, *Journal of Business Research*, Vol. 67 No. 5, pp. 663-666.
- Gupta, V.K. and Bhawe, N.M. (2007), “*The influence of proactive personality and stereotype threat on women’s entrepreneurial intentions*”, *Journal of Leadership & Organizational Studies*, Vol. 13 No. 4, pp. 73-85.
- Kraaijenbrink, J., Bos, G. and Groen, A. (2009), “*What do students think of the entrepreneurial support given by their universities?*”, *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, Vol. 9 No. 1, pp. 110-125.
- Lüthje, C. and Franke, N. (2013), “*The ‘making’ of an entrepreneur: testing a model of entrepreneurial intent among engineering students at MIT*”, *R&d Management*, Vol. 33 No. 2, pp. 135-147.
- Nabi, G., Holden, R. and Walmsley, A. (2010), “*Entrepreneurial intentions among students: towards a re-focused research agenda*”, *Journal of Small Business and Enterprise Development*, Vol. 17 No. 4, pp.537-551.
- Parker, S. (2011), “*From passive to proactive motivation: the importance of flexible role orientations and role breadth self- efficacy*”, *Applied Psychology*, Vol. 49 No. 3, pp. 447-469.
- Prabhu, V.P., McGuire, S.J., Drost, E.A. and Kwong, K.K. (2012), “*Proactive personality and entrepreneurial intent: is entrepreneurial self- efficacy a mediator or moderator?*”, *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, Vol. 18 No. 5, pp. 559-586.
- Roxas, B.G., Cayoca-Panizales, R. and de Jesus, R.M. (2008), “*Entrepreneurial knowledge and its effects on entrepreneurial intentions: development of a conceptual framework*”, *Asia- Pacific Social Science Review*, Vol. 8 No. 2, pp. 61-77.
- Saeed, S., Yousafzai, S.Y., Yani-De-Soriano, M. and Muffatto, M. (2015), “*The role of perceived university support in the formation of students’ entrepreneurial intention*”, *Journal of Small Business Management*, Vol. 53 No. 4, pp. 1127-1145.
- Sesen, H. (2013), “*Personality or environment? A comprehensive study on the entrepreneurial intentions of university students*”, *Education_ Training*, Vol. 55 No. 7, pp. 624-640.
- Smith, A.J., Collins, L.A. and Hannon, P.D. (2007), “*Embedding new entrepreneurship programmes in UK higher education institutions: challenges and considerations*”, *Education p Training*, Vol. 46 Nos 8/9, pp. 555-567.
- Souitaris, V., Zerbinati, S. and Al-Laham, (2007), “*Do entrepreneurship programmes raise entrepreneurial intention of science and engineering students? The effect of learning, inspiration and resources*”, *Journal of Business Venturing*, Vol. 22 No. 4, pp. 566- 591.

STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI DENGAN BUDAYA MALU (STUDI KOMPARATIF MASYARAKAT MELAYU INDONESIA DENGAN JEPANG)

Sri Sulistyawaty¹

Nelvitia Purba²

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah^{1,2}

Email : Srilistya@yahoo.com

Abstrak

Kearifan lokal adalah merupakan suatu kebijaksanaan dan pengetahuan asli dari suatu masyarakat tertentu yang berasal dari nilai-nilai luhur tradisi budaya yang lahir dan berkembang dari masyarakat tersebut. Budaya malu adalah merupakan konsep kearifan lokal dari orang Melayu. Budaya malu ini adalah merupakan cerminan dari Budaya Timur. Jepang merupakan salah satu Negara yang menjalankan konsep Pencegahan korupsi melalui budaya malu di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari terutama berkaitan dengan kejujuran atas kesalahan dan untuk berbuat kesalahan adalah hal yang jadi dasar semua tindakan. Oleh karena itu Upaya pencegahan korupsi di negaranya melalui kultur yang dimiliki oleh Jepang. Metode Penelitian Hukum yang dilakukan bersifat Yuridis Normatif. Hasil Penelitian mengemukakan bahwa Di Indonesia konsep Budaya Malu merupakan Kearifan Lokal yang sudah berakar dan dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia yang terangkum dalam Bentuk Tunjuk Ajar syair – syair, pantun-pantun, ungkapan-ungkapan yang mengandung nasehat kepada generasi penerus.. Budaya Malu adalah merupakan Budaya yang perlu dipupuk dalam ber-sosial di dalam masyarakat, terutama adalah Malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik dan benar yang harus dibudayakan dalam aktivitas sehari-hari sebagai dasar salah satu upaya untuk Pencegahan korupsi.

Kata kunci: budaya malu, melakukan pelanggaran hukum, pencegahan korupsi

Abstract

Local wisdom is a wisdom and original knowledge of a particular society derived from the noble values of cultural traditions to regulate the life order of the community. The culture of shame is a concept of local wisdom from the Malays. This culture of shame is a reflection of Eastern Culture. Japan is one of the countries in Asia that runs the concept of Prevention of corruption through a culture of shame in carrying out daily activities especially related to honesty over mistakes and to make mistakes is the basis of all actions. Therefore efforts to prevent corruption in the country through Japanese-owned culture. Legal Research Methods conducted are normative juridical. The results of the study show that in Indonesia the concept of Shy Culture is Local Wisdom that has been rooted and implemented by Indonesian people which is summarized in the Form of Teachings of poetry - poetry, pantun-pantun, expressions containing advice which are passed down from generation to generation. Shy Culture is a culture that needs to be fostered in social life in society, especially is Malu to do deeds that are not good and right that must be cultivated in daily activities as a basis for an effort to prevent corruption.

Keywords: shy culture, making mistakes, preventing corruption

1. PENDAHULUAN

Kejahatan Korupsi merupakan kejahatan extraordinary crime (kejahatan luar biasa). Akibat yang ditimbulkan dari kejahatan ini adalah menimbulkan

kesengsaraan bagi rakyat Indonesia dan menimbulkan kerugian keuangan negara. kejahatan korupsi ini menimbulkan problem bagi Negara Indonesia dan dengan berbagai cara dilakukan untuk

mengatasi kejahatan ini melalui Penegakan dan Pencegahan kejahatan ini. Konsep Pencegahan Korupsi ini salah satunya dilakukan dengan Kearifan lokal. Kearifan Lokal adalah suatu tradisi lokal yang dapat mengatur daripada tatanan yang mengatur tingkah laku masyarakat secara arif dan bijaksana. Kearifan Lokal (jiwa rakyat) mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengatur kehidupan di dalam aktivitas sehari-hari yang dinamakan dengan Norma/Hukum. Von Savigny Teori Volkgeist (Jiwa Bangsa) bahwa hukum itu dibentuk untuk menciptakan suasana damai yang berorientasi kepada ketenteraman para masyarakat dan tersimpan dalam jiwa masyarakat dan bangsa Indonesia. Hukum yang baik dan memenuhi syarat adalah hukum yang lahir dari bawah keatas, bukan dari atas kebawah, artinya persoalan yang menyangkut hukum dimulai dari bawah sebagai akibat yang menimbulkan hukum, sehingga terbentuklah hukum itu.

Dalam suasana kehidupan suatu bangsa dalam bernegara kehidupan bernegara khususnya di Indonesia pada masa sekarang ini budaya malu belum menjadi suatu ukuran atau prinsip yang dijadikan untuk pegangan dalam menjalankan aktivitas berupa kepemimpinan public atau kegiatan yang mampu menjadi suri teladan di kalangan masyarakat pada umumnya sehingga sulit untuk mencari tokoh atau figur yang bisa diteladani. Sesungguhnya dapat diketahui bahwa Indonesia mempunyai tradisi yang dapat mengontrol tata kehidupan bermasyarakat yang disebut dengan "Kearifan Lokal". Kearifan lokal banyak sekali mengandung tatanan kehidupan dan kebijaksanaan hidup masyarakat Indonesia. Pentingnya kearifan lokal dalam pendidikan secara luas adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan ketahanan Nasional sebagai bangsa Indonesia. Dengan

menggali kearifan lokal yang berkaitan dengan Budaya Malu maka dapat menahan krisis budaya dan jati diri, termasuk korupsi, sebagaimana perbandingan negara Jepang melakukan pencegahan korupsi dengan melalui konsep kearifan lokal Budaya Malu.

Malu ini adalah identitas dari budaya Timur, yang tercermin dalam diri orang Melayu, sifat pemalu disini bukanlah rendah diri, melainkan malu untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Budaya Malu ini perlu dijalankan terutama dalam dunia politik, pemerintahan dan kehidupan dalam berbangsa, selama budaya malu belum dijalankan secara maksimal, sehingga selama itu pula gagal menciptakan keadaan yang lebih bagi bangsa kita. Pemberantasan korupsi dapat dianalogikan sebagai pemberantasan jamur yang tidak dimulai dari batangnya saja, ada bagian akar yang pertama harus dicabut agar berkembangnya benar-benar terhenti. Dan akar dari permasalahan ini adalah telah bergesernya dari Karakter manusia Indonesia yang telah melupakan nilai-nilai kearifan lokal dari daerah-daerah di Indonesia dan khususnya di Sumatera Utara yang berkaitan dengan "Budaya Malu" oleh karena itu perlu adanya suatu Revitalisasi kearifan lokal yaitu Budaya Malu yang harus ditanamkan kepada generasi muda untuk pencegahan korupsi di Indonesia.

Penanggulangan korupsi dengan mengsinergikan strategi penindakan dan pencegahan. Kejahatan Korupsi merupakan isu sentral dalam penegakan hukum. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah di dalam pemberantasan korupsi ini dengan menetapkan berbagai strategi nasional yaitu di era reformasi, baik melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Strategi Nasional Dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) 2010-2025, Instruksi Presiden Nomor 9

Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Percepatan Dan Pemberantasan Korupsi 2011, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Aksi Percepatan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025 dan Jangka Menengah (2012-2014).

Berdasarkan hasil survey dari Transparency Internasional Jepang dapat dikemukakan bahwa 3 yang terbaik di Asia sebagai Negara yang bersih dari Korupsi ,padahal di Negara Jepang tidak ada Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Kultur Budaya Malu di Jepang yang menjadi dasar untuk “ Menghukum” yang melakukan tindakan korupsi dan pencegahannya. Jepang adalah merupakan negara Kepulauan sama halnya dengan Indonesia yang terletak di Asia Timur . Jepang terletak di bagian barat Samudera Pacific. Sebelah timur Laut Jepang serta Negara Jepang telah mampu mengatasi kejahatan korupsi di negaranya melalui konsep Pencegahan Budaya Malu. Jepang berbeda dengan negara lain, negara ini sama sekali tidak memiliki Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang Pencegahan Korupsi maupun lembaga khusus seperti KPK yang ada di Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukannya dengan Penegakan Hukum dan Upaya Pencegahan Korupsi dilakukan melalui Kultur Budaya Malu.

2. METODE

Metode Penelitian Hukum yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif Dengan Menggunakan Penelitian Kualitatif. Penelitian Hukum Normatif mengacu kepada ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin (pendapat ahli), hukum yang berlaku umum, hukum yang merupakan kekecualian, hukum yang hanya atau masih didukung oleh minoritas sarjana atau minoritas

pengadilan dll. Sumber Datanya Adalah Data Sekunder (Perpustakaan). Karena hanya Data Sekunder, maka tidak menggunakan Metode Sampling.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Kearifan Lokal Budaya Malu Jepang Dalam Strategi Pencegahan Korupsi. Negara Jepang adalah masyarakat yang mengkedepankan moral atau akhlak dalam konsep bertata-krama yang jiwanya ini berasal dari China kuno. Ajaran Konfunesisme di Jepang yang tidak hanya dilakukan dalam aktivitas sehari-hari dilingkungan keluarga, namun juga di jalankan dalam keseharian pelayanan birokrasi dan mencari untung dengan pertanggung jawaban sosial. Budaya Malu adalah merupakan Budaya yang perlu dipupuk dalam ber-sosial di dalam masyarakat.

Jepang adalah merupakan Negara yang sangat kuat dalam Budaya Malunya dan merupakan salah satu dari 11 karakter yang dimiliki oleh bangsa Jepang yang tidak ada bedanya dengan Indonesia selain Budaya Malu juga memiliki 18 (delapan belas) nilai karakter bangsa sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kemediknas yaitu :

1. Nilai Religius
2. Kejujuran
3. Toleransi
4. Disiplin
5. Kerja Keras
6. Kreatif
7. Mandiri
8. Demokratis
9. Rasa ingin tahu
10. Semangat Kebangsaan
11. Cinta Tanah Air
12. Menghargai Prestasi
13. Bersahabat/Komunikatif
14. Cinta Damai
15. Gemar Membaca
16. Peduli Lingkungan
17. Peduli Sosial
18. Tanggung Jawab.

Oleh karena itu Indonesia mampu melakukan pencegahan korupsi melalui Nilai –nilai karakter Budaya Malu Membangun karakter bangsa memerlukan waktu yang panjang karena karakter bangsa adalah sebuah peradaban bangsa itu sendiri .Pada puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional yang berlangsung di Istana Negara tanggal 11 Mei 2010, Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menjabat sebagai Presiden menyampaikan pidatonya terkait masalah karakter bangsa Indonesia. Beliau mengatakan bahwa : “ character building “ sudah mulai kita lupakan, karakter Bangsa Indonesia sudah mulai terlupakan oleh dunia pendidikan. Kuatnya Budaya Malu bangsa Jepang ini dapat terlihat pada saat terjadi Bencana Tsunami di Jepang banyak orang yang kehilangan harta bendanya.Semua harta tersebut banyak yang hilang. Yang sangat menakjubkan adalah bahwa masyarakat Jepang memilih tidak mengambil barang-barang yang memang bukan miliknya Pasca Tsunami tersebut ke kantor polisi.

Orang Jepang yang terkenal adalah sebagai pekerja keras, disiplin, dan berintegritas yang tinggi dan salah satu kuncinya adalah”Besarnya Rasa Malu”. Dalam konteks budaya Jepang terkenal jiwa samurai dalam prinsip samurai adalah ajaran untuk senantiasa hidup dengan kejujuran, terhadap diri sendiri beranjak dari jiwa samurai yang melekat dalam jiwa masyarakat Jepang yang terkenal dengan budaya malu sebagai cara mengangkat derajat bangsa menjadi bangsa yang unggul diatas bangsa-bangsa yang lain.Budaya malu di Jepang tersebut dalam aktivitas sehari-hari

Contohnya : - Malu Untuk Mengambil Barang Orang Lain.
- Malu Melanggar peraturan lalu Lintas.

- Malu Bila Tdk Antri Dalam Melakukan Suatu Kegiatan.

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas Orang Jepang juga terkenal dengan Berjiwa kesatria oleh karena itu patut di hargai dan menjadi contoh di Indonesia yang menunjukkan kejujuran atas kesalahan dan untuk berbuat kesalahan adalah hal yang jadi dasar semua tindakan. Jika seseorang masih punya rasa malu maka ia akan berpikir jika akan melakukan kesalahan. Di negara Jepang sejak usia dini selain diajarkan budaya malu sejak anak-anak diajarkan budaya saling memperhatikan dan melayani orang lain, budaya ini telah ditanamkan dari TK dan Sekolah Dasar. Di negara Jepang tidak perlu ada promosi dalam bentuk poster,foto maupun siaran TV atas keterlibatan para pemimpin dalam menunjukkan kesungguhan dalam bekerja keras, hal ini disebabkan karena di Jepang peduli pada lingkungan dan kegiatan bersih-bersih massal yang sudah merupakan hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah jika ada yang tidak berpartisipasi atau hanya sekedar tunjuk sana dan tunjuk sini. Budaya malu yang mendahulukan dan melayani orang lain ini adalah bersumber dari Ajaran Zen Buddhism. Melayani akan menumbuhkan rasa rendah hati dan kepekaan diri.Budaya malu menumbuhkan rasa tanggung jawab, perbaikan diri dan penyesalan yang dalam. Padahal banyak masyarakat Jepang yang tidak beragama, namun justru mereka masih sangat teguh untuk memegang tradisi ini.

3.1 Upaya Pengendalian Korupsi Di Indonesia

Upaya yang dilakukan untuk Pengendalian Korupsi di Indonesia Antara lain : 1.Upaya Preventif Yang Dilakukan terhadap Upaya preventif ini antara lain :

a. Kejaksaan akan melakukan kegiatan Program Pembinaan masyarakat tata

hukum dengan cara penyuluhan di sekolah – sekolah, dan di Pedesaan yang dilakukan oleh Badan Intelijen.

- b. Memberikan Sanksi hukuman yang relatif berat sehingga menimbulkan efek jera dan daya tangkal terhadap pelaku kejahatan korupsi.

Mempersiapkan Jaksa Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang profesional dan mempunyai integritas moral yang tinggi melalui pelatihan diklat.

Upaya Refresif

Usaha Untuk Jangka Panjang

- a. Pendidikan, membiasakan diri sendiri dan keluarga untuk tidak melakukan korupsi.
- b. Membangun Budaya Anti Korupsi.
- c. Melakukan pengawasan internal dan eksternal yang benar-benar mengawasi, bukan hanya untuk mencari uang untuk bekerja sebagai pengawas.

KPK memiliki agenda dalam memberantas korupsi diantaranya dengan melakukan;

1. Menciptakan budaya malu anti korupsi.
2. Mendorong pemerintah dalam melakukan reformasi dalam semua bidang birokrasi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan kuat.
3. Membangun kepercayaan masyarakat.
4. Melakukan upaya penindakan yang tegas dan berefek jera kepada para pelaku korupsi besar.
5. Mendorong penuh segala tindakan aparat hukum dalam mencegah korupsi danantisipasi korupsi.

Ada beberapa langkah yang dapat dijadikan rujukan dalam memberantas korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut ;

- a. Upaya pencegahan (preventif)
- b. Penindakan
- c. Upaya pendidikan yang berorientasi dalam pencegahan korupsi di masyarakat/mahasiswa/Pelajar.

- d. Pembinaan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melakukan gerakan anti korupsi.

3.2 Upaya Pencegahan (Preventif)

- a. Memulai gerakan dengan menanamkan rasa semangat anti korupsi yang bersifat positif secara nasional maupun internasional dengan melakukan tindakan dan perbuatan mementingkan kepentingan bangsa melalui pendidikan formal dan non formal serta Agama.
- b. Setiap penerimaan pegawai baru hendaknya berdasarkan prinsip dan teknis yang sudah ditentukan.
- c. Para pemegang kekuasaan di intruksikan menerapkan pola hidup sederhana dan memiliki rasa kepedulian anti korupsi dan bertanggung jawab.
- d. Pegawai diutamakan kesejahteraan dan diberikan tunjangan hari tua agar dalam melaksanakan pekerjaannya benar –benar menaati prinsip yang telah ditentukan.
- e. Menciptakan pejabat atau pemegang kekuasaan dalam membuat kebijakan dan keputusan yang jujur dan disiplin .
- f. Sistem keuangan dilakukan dengan transparan serta dipegang oleh pejabat yang memiliki komitmen dan tanggung jawab tinggi sebagai kontrol dalam memerangi korupsi.
- g. Melakukan inventaris pencatatan dalam segala bentuk transaksi terhadap para pejabat dan pembuat kebijakan pemerintahan secara terstruktur dan sistematis.
- h. Melakukan Penyegaran dan reorganisasi dalam pemerintahan agar tidak terjadi kejenuhan dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada negara dalam memberantas korupsi.

Upaya penindakan benar-benar dilakukan dengan tegas dan transparan kepada mereka yang melakukan pelanggaran dengan diberikan

terdahulu peringatan, kemudian dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana.

3.3 Upaya Edukasi Masyarakat.

- a. Memiliki tanggung jawab guna melakukan kegiatan kontrol sosial serta berpartisipasi partisipasi politik dalam menciptakan kepentingan publik yang efektif.
- b. Memiliki komitmen tinggi serta tidak acuh dan afatis.
- c. Melakukan kontrol publik dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah dari tingkat terkecil yakni desa samapai ke tingkat pemerintahan pusat berskala nasional.
- d. Memberikan wawasan selebar-lebarnya dalam pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek hukum.
- e. Memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan ikut serta berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak dalam pencegahan korupsi.

3.4 Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

- a. Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah Sebuah organisasi non pemerintah yang mengawasi serta melakukan pelaporan kepada publik mengenai korupsi yang terjadi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktek korupsi. ICW dilahirkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah gerakan reformasi.
- b. Tranpararecy Internasional adalah sebuah organisasi Internasional yang memiliki visi dan misi serta bertujuan untuk memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman

sebagai organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi non pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demokratis.

3.5 Konsep Kearifan Lokal Budaya Malu Masyarakat Melayu Indonesia Dalam Pencegahan Korupsi.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap dari kelompok masyarakat yang ada di Indonesia memiliki keunikan dan budayanya sendiri, dengan konsepnya masing-masing. Bahasa suku yang satu dengan suku yang lain yang ada di Indonesia ini mewujudkan konsepsi yang berbeda, oleh karena itu tidak ada kelompok masyarakat yang dapat mengklaim bahwa budayanya lebih baik dari budaya kelompok lain.

Masyarakat Melayu yang umumnya tinggal di pesisir Pulau Sumatra yang memiliki konsep budaya tertentu Adapun ciri-ciri dari Suku Bangsa Melayu antara lain :

1. Orang Melayu tersebut identik beragama Islam.
2. Orang Melayu tersebut memiliki sikap untuk selalu bertawakal kepada Allah.
3. Orang Melayu tersebut Taat Hukum Dan Petuah Orang Tua.
4. Orang Melayu memiliki tinggi sopan-santun di dalam pola tingkah laku untuk bergaul..
5. Orang Melayu selalu mengkedepankan Pendidikan dan Ilmu Agama(Islam).
6. Orang Melayu berkomunikasi tidak kasar, khusus untuk wanita mengenakan pakaian yang menutup aurat dengan sebutan baju kurung, menjauhkan pantang larangan dan dosa, serta biar mati daripada menanggung malu dirinya atau keluarganya, karena bisa menjatuhkan marwah keturunannya, sebaliknya tidak dengan kasar mempermalukan orang lain.
7. Orang Melayu di dalam mengambil keputusan selalu bermusyawarah dan

mufakat sebagai sendi kehidupan sosial. Kondisi ini terlihat pada acara perkawinan, kematian, selamatan mendirikan rumah, dan lain-lain. Orang Melayu harus bermusyawarah /mufakat dengan kerabat atau handai tolan.

8. Orang Melayu memiliki sikap ramah terhadap tamu.

Dari hal-hal yang dikemukakan diatas bahwa Melihat latar belakang kehidupan suku Melayu adalah kental dengan adat-istiadat dan agama yang membentuk etika. Kedua unsur ini membawa kehalusan budi Melayu tersebut. Karena orang Melayu tersebut identik dengan beragama Islam, maka ia mengakui bahwa segala sifat buruk dan baik yang dilakukannya akan diketahui oleh Tuhan Yang Maha esa, bahwa setiap perbuatannya di dunia harus dipertanggungjawabkannya di akhirat kelak dan dihadapan Allah swt. Kalau ia bersifat dan bertingkah laku sesuai dengan petunjuk Allah, maka iai akan mendapatkan tempat yang baik sesudah mati, tetapi kalau ia bertingkah laku dan bersifat buruk, maka ia akan mendapatkan tempat yang buruk di akhirat kelak. Dengan keyakinan dan keteguhan pada ajaran tetap bercermin pada Hukum Islam dan Sunnah Nabi agar ia mendapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Kepatuhan terhadap hukum menyebabkan seseorang tersebut tidak akan terjebak kepada hal-hal yang tidak baik, karena Kitabullah dan Hadis harus dijunjung tinggi.

Konsep Kearifan Lokal Budaya Malu ini sebagai Pencegahan Korupsi sesungguhnya daapt dijadikan dasar berpijak untuk bertingkah laku sehari-hari mengingat Budaya Malu ini sesungguhnya merupakan ciri khas dari Budaya Timur, yang penerapannya di jalankan dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari walaupun terdapat dalam pantun-pantun, syair-syair, ungkapan-

ungkapan dan lain sebagainya yang mengandung petuah-petuah maupun amanah yang diturunkan secara turun-temurun yang isinya merupakan falsafah hidup dari orang Melayu. Kenyataannya saat ini Budaya Malu ini berangsur-angsur mulai luntur dikalangan masyarakat pada umumnya dan khususnya di kalangan generasi muda. Karena pengaruh dari perubahan dan kemajuan zaman oleh Karena Budaya Malu harus dijunjung tinggi dalam pola bertingkah laku di dalam masyarakat Indonesia .

Dalam Tunjuk Ajar Melayu, yang merupakan pola mengatur untuk bertingkah laku yang dilakukan berkaitan dengan Budaya Malu ini antara lain : Malu untuk melakukan kejahatan/melanggar hukum, Malu untuk berkata kasar, Malu untuk menyombong, Malu untuk menipu, Malu untuk berkhianat, Malu untuk merampas hak orang lain, Malu untuk berbuat semena-mena, Malu untuk melepaskan kewajiban dan tanggungjawab, Malu untuk membuka aib orang, Malu untuk menyingkap keburukan orang dan sebagainya. Dari sisi lain dipantang pula untuk Malu dalam hal-hal yang baik, Misalnya, Malu menuntut ilmu, Malu untuk mengakui kesalahan dan kebodohan diri sendiri, malu untuk berterus terang, malu bertanggung jawab, malu melakukan pekerjaan kasar yang halal, malu meminta petuah dan amanah dan sebagainya.

Petuah Dari Orang Tua mengemukakan :

“Kalau malu berbuat ibadat, dunia akhirat hidup tersesat, kalau malu bekerja, hiduppun sengsara, kalau malu meminta nasehat, dunia akhirat hidup melarat, Kalau malu beramal, alamat mati tak berbekal”. Pemalu adalah merupakan sifat yang dimiliki orang Melayu. Sifat pemalu disini bukanlah rendah diri, tetapi karena tingginya budi serta kehalusan perasaan. Orang Melayu di dalam pola

bergaul untuk menjaga perasaan orang lain jangan sampai tersinggung.

Kehalusan jiwa dan perasaan tersebut, menyebabkan seseorang tersebut sadar bahwa setiap tingkah lakunya maupun sifat yang buruk akan dipercakapkan maupun dilihat orang. Oleh karena itu seseorang tersebut harus hati-hati dalam bersikap maupun bertindak. Dalam ungkapan dan Tunjuk Ajar tentang ini banyak terdapat antara lain :”Tahu melihat cermin orang, tahu dikias gunjing orang”. Di dalam Tunjuk Ajar orang Melayu dikawasan di Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara terdapat unsur-unsur yang mengandung sifat malu yaitu sebagaimana ungkapan ini : Malu membuka aib orang,

Malu menyingkap baju dibadan,
Malu mencoreng syara”

Malu dilanda adat,

Malu bertarung dalam lembaga,

Bagi suku Melayu tidak suka menceritakan tentang hal-hal yang kurang bagus yang terdapat pada diri seseorang terutama yang aib dan memalukan. Orang Melayu juga tidak suka menceritakan tentang aib diri sendiri maupun keluarga sendiri, termasuk juga tentang kehebatan/keistimewaan dirinya karena rasa rendah hati melekat pada dirinya. Ia tidak akan atau tetap berusaha untuk tidak melanggar hukum agama, serta takut untuk melanggar adat yang berlaku di kalangan masyarakatnya, begitu juga akan berusaha untuk mengelak dalam pertengkaran dalam hal-hal yang tidak patut untuk dipertengkarkan dalam suatu musyawarah.

4. KESIMPULAN

Orang Jepang yang terkenal sebagai pekerja keras, disiplin, dan berintegritas yang tinggi dan salah satu kuncinya adalah”Besarnya Rasa Malu”. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa Usaha-usaha yang dilakukan untuk memeberantas korupsi di

negaranya dengan Penegakan Hukum dan Upaya Pencegahan melalui kultur yang dimiliki oleh Jepang dengan menanamkan Budaya Malu sejak dini.

Bagi Bangsa Indonesia Budaya Malu tersebut terangkum dalam Budaya Orang Melayu Dalam Tunjuk Ajar Melayu,yang merupakan cerminan Moral. ungkapan dari Tunjuk Ajar dalam peribahasa dan pantun, oleh karena itu perlu dibudayakan budaya malu ini untuk pencegahan korupsi sebagaimana negara Jepang berhasil menekan kejahatan korupsi melalui konsep Kultur Budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Angha Nader (2002), Teori I Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Spritual, Jakarta : Serambi.
- Antar Venus (2015), Filsafat Komunikasi Orang Melayu, Bandung:Sibiosa Rekatama.
- Chainur Arrasyid, dkk (2008),Taat Ajar Dan Taat Hukum Orang Melayu,Medan:USU Press.
- Eko Handoyo (2009), Pendidikan Anti Korupsi, Semarang,: Widyakarya Pres.
- Kamanto Sunarto (2004), Pengantar Sosiologi, Fak.Ekonomi Univ. Indonesia.
- Munir Fuady (2018), Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep,PT Rajagrafindo Persada.
- Maruli Panggabean (1981), Bahasa, Pengaruh dan Peradabannya, Jakarta:PT Gramedia.
- Maidin Gultom (2018), Suatu Analisis tentang Tindak Korupsi Di Indonesia, Refika.
- Mana Sikana (2007),Teras Sastera Melayu Tradisional,Selangor : Pustaka Karya.
- Marwan Effendy (2013), Korupsi Dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya, Referensi.

- Noriah Taslim (2010), Lisan Dan Tulisan Teks Dan Budaya, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.
- Robert Sibarani (2014), Kearifan Lokal Hakikat, Peran, Dan Metode Tradisi Lisan, Asosiasi Tradisi Lisan
- Shafwan Hadi Umry (2016), Literasi Melawan Korupsi, Penerbit Mitra.
- Sugiyono (2016), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D, Alfabeta Bandung.
- Tuanku Luckman Sinar (2005), Budaya Adat Melayu Jati Diri Dan Kepribadian, Medan: Penerbit Forkala.
- Tengku Luckman Sinar (1994), Jati Diri Melayu, Medan: LPP MABMI.
- Tengku Luckman Sinar (2004), Pantun dan Pepatah Melayu: Penerbit MABMI.
- Jurnal Sosial Budaya (2014): Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya, Islam Dan Kebudayaan Melayu Di Era Globalisasi Di Malaysia Vol.10, No.1 Januari-Juni, Baharuddin bin H. Puteh dan Mohamad Nazli bin Homar.
- Jurnal Pemerintahan, Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru, Bersih Dan Bermartabat, Data Wardana dan Geovani Meiwanda, Vol. III Nomor 1 April. 2017
- Jurnal Pendidikan Karakter Pengembangan Pendidikan Karakter Dan Budaya Bangsa Berwawasan Kearifan Lokal, Imam Suyitno Vol II No.1 , 2012
- Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi Seno Wibowo,* Ratna Nurhaya, Vol 2 No.2 THN 2015

PENGARUH GAYA MENGAJAR DOSEN DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA PERGURUAN TINGGI SWASTA KOTA MEDAN

Cece¹

Edi Winata²

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Sukma^{1,2}

Jl. Sakti Lubis NO. 80 Medan

¹harahapcece@gmail.com

²sayapkerinduan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh antara gaya mengajar dosen dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa di perguruan tinggi swasta Kota Medan. Hal ini dikarenakan karena didalam proses mengajar di kelas dalam rangka transfer knowledge, dosen merupakan pihak yang paling bertanggungjawab didalam menjamin tercapainya tujuan dari pembelajaran. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang mahasiswa di Kota Medan pada observasi awal yang dilakukan peneliti, diperoleh bahwa mahasiswa kurang bahkan tidak tertarik dengan gaya mengajar dosen yang terlalu monoton dan diktator, karena mereka merasa bosan dan tidak nyaman di kelas sehingga memilih untuk tidak masuk pada mata kuliah tertentu. Selain itu, minimnya kemampuan menyajikan materi menjadikan mahasiswa tidak tertarik dan cenderung membosankan. Di samping itu pembelajaran pada umumnya masih berlangsung secara konvensional dengan metode ceramah dan metode tanya jawab, dimana konsep-konsep transfer secara utuh oleh dosen kepada mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah gaya mengajar dosen dan motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa di perguruan tinggi swasta kota Medan tahun ajaran 2016/2017 dengan menggunakan rumus Slovin dalam menentukan jumlah sampelnya sehingga persentase kelonggaran sebanyak 10%. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan menggunakan kuesioner dengan alat analisis data yaitu SPSS versi 24.0.

Kata kunci: gaya mengajar, motivasi belajar dan prestasi belajar

Abstract

This study aims to see the effect of lecturer teaching style and learning motivation on student learning achievement in private universities in Medan. This is because because in the classroom teaching process in the context of knowledge transfer, the lecturer is the party most responsible for ensuring the achievement of the objectives of learning. This can be seen from the results of interviews conducted by several students in the city of Medan on the initial observations conducted by the researchers. It was found that students were not even interested in teaching lecturers who were too monotonous and dictatorial because they felt bored and uncomfortable in class. not to enter certain subjects. In addition, the lack of ability to present material makes students less attractive and tends to be boring. In addition, learning in general is still going on conventionally with the lecture method and question and answer method, where the concepts of transfer are intact by the lecturer to students. This study aims to determine whether the lecturer teaching style and learning motivation influence student learning achievement. This study uses qualitative data and quantitative data. The population of this research is all students in private universities in Medan in the academic year 2016/2017 by using the Slovin formula in determining the number of samples so that the percentage of allowance is 10%. Data collection is done through observation, interviews using questionnaires with data analysis tools, namely SPSS version 24.0.

Keyword: teaching style, motivation to learn and learning achievement

1. PENDAHULUAN

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang paling krusial di dalam kemajuan suatu organisasi, terlebih lagi di era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) saat ini. Pengaruh MEA yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara mengharuskan kita mampu bersaing di segala bidang. Perkembangan dunia pendidikan tinggi di Indonesia saat ini semakin pesat. Hal ini dapat ditinjau dari segi kuantitas, dimana dapat dipastikan hampir di setiap provinsi paling sedikit memiliki satu perguruan tinggi negeri (PTN) dan beberapa perguruan tinggi swasta (PTS). Pendidikan memiliki peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, damai, terbuka dan demokratis. Pendidikan dari segi kehidupan dirasakan sangat penting bagi perkembangan hidup manusia. Pesatnya kemajuan teknologi di era modern, menuntut universitas untuk selalu melakukan inovasi pembelajaran sehingga tercipta efisiensi dalam waktu dan biaya.

Pemanfaatan teknologi menjadi solusi dalam efisiensi waktu dan biaya, sehingga mahasiswa dan dosen menjadi lebih nyaman dalam proses pembelajaran. Salah satu faktor yang paling penting yang harus diperhatikan dan dioptimalkan pengembangannya oleh organisasi dalam mencapai tujuannya adalah faktor sumber daya manusia (SDM), yang dalam hal ini adalah dosen. Sebagai suatu organisasi, maka PTN/PTS harus menjadikan manusia merupakan sumber daya yang paling penting. Namun masalah yang sering muncul adalah bagaimana suatu organisasi dapat memiliki sumber daya manusia yang kompetensinya sesuai dengan peran dan tugasnya sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi tersebut. Seorang dosen harus dapat merekayasa sistem pembelajaran dengan gaya mengajar/ *teaching style* yang menarik dan melibatkan siswa secara aktif.

Peran, tugas, dan tanggung jawab dosen sangat penting dalam mewujudkan

tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa gaya mengajar memiliki pengaruh yang efektif terhadap prestasi belajar. Suwarni, E (2008) menyimpulkan bahwa kesadaran pandangan positif pada umpan balik dari dosen, dan mahasiswa yang aktif mencari informasi baru, merupakan aspek dalam motivasi belajar yang signifikan, artinya aspek ini menjadi pendorong /memotivasi mereka untuk mencapai prestasi yang baik dalam proses pembelajaran. Roebyantho, S.H 2008 hasil penelitian ini menggambarkan bahwa motivasi dan prestasi yang diperoleh mahasiswa tidak terlepas dari gaya mengajar Dosen dalam proses pembelajaran.

Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Dosen yang kompeten untuk melaksanakan tugas pokok dosen adalah yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang diperlukan dalam praktek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Dirjen Dikti, 2010). Hasil belajar menunjukkan kepada prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar itu merupakan indikator adanya derajat perubahan tingkah laku siswa. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) SUKMA merupakan institusi yang bergerak di bidang jasa pendidikan. Dalam rangka menghasilkan suatu produk yang berkualitas tentunya harus pula dibutuhkan proses yang baik dan berkualitas, selalu ada upaya untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi meliputi aspek

kognitif, afektif maupun psikomotor. Untuk itu dosen dituntut untuk memiliki kemampuan dan kinerja yang baik. Keberhasilan dosen dalam kegiatan belajar mengajar ditentukan oleh daya serap dan prestasi mahasiswa. Jika kinerja dosen baik maka hasil proses belajar mengajar akan baik pula, sehingga berdampak signifikan terhadap mutu lulusan yang dihasilkan dalam sebuah institusi pendidikan. Kinerja dosen penting dalam mencapai tujuan pembelajaran yang optimal.

Parameter kinerja dosen yang baik tentunya mengacu pada pencapaian hasil pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (2) mendefinisikan bahwa: Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dosen memiliki peranan yang sangat penting sebagai ujung tombak pelaksana keseluruhan proses pendidikan. Menurut undang-undang bahwa tugas pokok dosen adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada perguruan tinggi, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 60 menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesional, adapun penjelasan untuk pasal tersebut yaitu:

1. Melaksanakan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
4. Bertindak obyektif dan tidak

diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang pendidikan

5. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika
6. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh gaya mengajar dosen dan motivasi belajar terhadap hasil belajar mahasiswa yang diperoleh dari hasil observasi dan kuesioner.

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Pada penelitian ini, Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber langsung dari objek penelitian baik itu data observasi, dan data hasil wawancara terstruktur terhadap responden dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Sukma Medan Jl. Sakti Lubis No.80 Medan. Waktu Penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan. Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang terbentuk peristiwa, hal, atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian peneliti, karena dipandang sebagai semesta penelitian (Ferdinand, 2006). Sedangkan menurut Sujarweni dan Endrayanto (2012:13) mengatakan bahwa, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011:81). Jumlah Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh mahasiswa STIM SUKMA tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 392 orang dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik

Slovin menurut Sugiyono (2011:87). Adapun penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana dengan menggunakan rumus slovin. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 392 orang sehingga presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka jumlah sampel penelitian ini sebanyak 80 responden. Instrumen penelitian variabel bebas dalam penelitian ini adalah Gaya Mengajar Dosen (X_1) dan Motivasi Belajar (X_2) Sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah Prestasi Belajar Mahasiswa (Y). Operasionalisasi variabel terdiri dari variabel, definisi operasional, indikator, dan skala pengukuran likert. Kumpulan data yang sudah diperoleh

kemudian di analisis dengan menggunakan metode sebagai berikut Metode Analisis Deskriptif dan juga Metode Analisis Kuantitatif, Alat uji yang dipergunakan untuk menganalisis hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linear Berganda untuk menguji Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Gaya Mengajar Dosen (X_1) dan Motivasi Belajar (X_2) Sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah Prestasi Mahasiswa (Y), pada STIM Sukma Medan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 24.0.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden merupakan identitas responden yang menjadi sampel penelitian. Sampel penelitian ini berjumlah 80 orang mahasiswa yang telah mengisi kuesioner berdasarkan usia, jenis kelamin, semester, dan jurusan. Berikut ini disajikan data karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia (thn)	F	Presentase
1	18-22	79	98,75%
2	23-27	1	1,25%
3	>28	0	0%
Total		80	100%

Dari tabel 1 diatas di lihat bahwa karyawan yang merupakan responden penelitian ini terdiri dari 79 orang

(98,75%) responden berumur antara 18-22 tahun dan 1 orang (1,25%) responden yang berumur antara 23-27.

Tabel. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	16	20%
2	Perempuan	64	80%
Total		80	100

Berdasarkan tabel 2 diatas diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 16 orang

(20%) dan perempuan sebanyak 64 orang (80%).

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	Diploma III(D3)	14	17,5%
2	Srata Satu (S1)	66	82,5%
Total		80	100%

Berdasarkan tabel 3 diatas diketahui bahwa responden dengan jenjang pendidikan Diploma III (D3)

sebanyak 14 orang (17,5%) dan srata satu (S1) sebanyak 66 orang (82,5%).

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Indeks Prestasi (IP)

No.	IP	Jumlah	Presentase
1	2,50 – 3,00	4 orang	5%
2	3,01 – 3,51	12 orang	15%
3	3,52 – 4,04	64 orang	80%
Total		80	100%

Berdasarkan tabel 4 diatas diketahui bahwa responden dengan jumlah IP antara 2,50 – 3,00, sebanyak 4 orang (5%), IP 3,01 – 3,51 sebanyak 12 orang (15%) dan IP 3,52 – 4,04 sebanyak 64 orang (80%). Untuk mengetahui pengaruh gaya mengajar dosen dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar

mahasiswa perguruan tinggi swasta Kota Medan, maka dilakukanlah uji regresi terhadap ketika variable yang ada dan hasil menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara gaya mengajar dan motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constan)	2,294	2,058		1,115	,028
	Gaya Mengajar	,557	,027	,962	20,905	,000
	Motivasi Belajar	-,090	,027	-,153	-3,336	,001

a. Dependent Variabel: Prestasi Belajar

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,294 + 0,557X_1 - 0,090X_2$$

Pada model regresi tersebut diperoleh nilai konstanta sebesar 2,294 yang mengartikan bahwa gaya mengajar dan motivasi belajar mempengaruhi prestasi belajar sebesar 2,294. Koefisien X_1 sebesar 0,557 mengartikan bahwa apabila terjadi kenaikan 1 digit pada gaya mengajar maka akan mempengaruhi prestasi belajar sebesar 0,557, sedangkan nilai koefisien X_2 sebesar -0,090 mengartikan bahwa apabila motivasi belajar berkurang 1 digit, maka akan

mempengaruhi prestasi belajar sebesar 0,090. Hal ini membuktikan prestasi belajar mahasiswa di perguruan tinggi swasta Kota Medan dapat dipengaruhi oleh gaya mengajar dosen dan motivasi belajar mahasiswa.

Pengujian hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R-Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,924 ^a	,854	,850	1,14596

a. Predictors: (Constant), Gaya Mengajar, Motivasi Belajar

Nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,854 atau 85,4% menunjukkan bahwa variabel gaya mengajar dan motivasi belajar mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi swasta di kota Medan, sedangkan sisanya 14,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

b. Uji Parsial (uji T)

Tabel 7. Hasil Uji Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Consta)	2,294	2,058		1,115	,028
	Gaya Mengajar	,557	,027	,962	20,905	,000
	Motivasi Belajar	-,090	,027	-,153	-3,336	,001

a. Dependent Variabel: Prestasi Belajar

Berdasarkan tabel 7 di atas, dapat dilihat uji-t menunjukkan hasil thitung yang diperoleh sebesar 20,905 lebih besar dibanding dengan nilai ttabel 1,991 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 untuk X_1 dan nilai signifikansi 0,001 untuk X_2 , maka berdasarkan hasil tersebut H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan demikian secara parsial variabel gaya mengajar dan motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa pada perguruan tinggi swasta Kota Medan.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh gaya mengajar dosen dan motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa di perguruan tinggi swasta Kota Medan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai R^2 yang diperoleh sebesar 0.854 atau 85,4%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel prestasi belajar mampu menjelaskan oleh variabel gaya mengajar dosen dan motivasi belajar mahasiswa, sedangkan sisanya 14,6%

Uji parsial (uji t) bertujuan untuk melihat pengaruh dukungan perguruan tinggi dan kepribadian proaktif terhadap niat berwirausaha mahasiswa secara parsial, dengan kriteria:

1. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima, H_1 atau H_2 ditolak, artinya secara parsial penelitian ini tidak berpengaruh;
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, H_1 atau H_2 diterima, artinya secara parsial penelitian ini berpengaruh

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Suprijono, Agus., (2009), Cooperative Learning, Teori & Aplikasi PAIKEM, Pustaka Pelajar, Surabaya.
- Sardiman, AM., (2008), Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- TriJoko, Ahmadi, Abu., (2005), Strategi Belajar Mengajar, Pusaka Setia, Bandung.
- Brophy, Jere. (2004), Motivating Students to Learning, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey.
- Tu'u, Tulus., (2011), Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Syaiful Bahri. Djamarah., (2006), Strategi Belajar Mengajar. Rineka Cipta, Jakarta.
- Buchori, M., (1983), Evaluasi dalam Pendidikan, Jemars, Bandung.
- Moh Uzer Usman dan Lilis Setiawati., (1993), Upaya Optimalisasi Kegiatan

- Belajar Mengajar, PT Remaja Rosdakarta. Cet. Pertama, 1993. h. 278, Bandung.
- Martin Handoko., (1992), Motivasi Daya Penggerak Tingkah Laku. Kanisius, Yogyakarta.
- Sujarweni, V dan Poly Endrayanto., (2012), Statistika Untuk Penelitian. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sugiyono., (2011), Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Siregar, Syofian., (2013), Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif, PT.Bumi Aksara, Jakarta.
- Sutopo, H.B., (1988), Konsep-konsep Dasar Penelitian Kualitatif, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Situmorang, Ronyta., (2013), Hubungan Variasi Gaya Mengajar Guru dan Minat Belajar Dengan Prestasi Belajar Pada Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Binjai T.A 2011/2012. Skripsi.Universitas Negeri Medan.
- Suwarni,E., (2008), Hubungan Antara Persepsi Terhadap Metode Mengajar Dosen Dengan Motivasi Belajar mahasiswa UBM, Vol 1, No 2, Hal: 1 - 21; ISSN: 1979-3707, Jurnal Psibernetika, Jakarta.
- Terry,George P., (1997), Prinsip-prinsip Manajemen. Bumi Aksara: Jakarta.
- Yusuf, Syamsu., (2002). Psikologi Perkembangan Anak dan remaja, Rosdakarya, Remaja Rosdakarya, Bandung.

BUDIDAYA DEMPLOT TANAMAN OBAT KELOMPOK TANI SUKA TANI DI DESA BATU JONG-JONG SEBAGAI SARANA DAYA TARIK WISATAWAN

Yayuk Yuliana¹⁾,
Julianto Hutasuhut²⁾

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Jl. Garu 2A No.93 Medan Sumatera Utara
E-mail: yayuk.yuliana14@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui budi daya tanaman obat yang dilakukan oleh kelompok tani suka tani. Di Desa Batu Jong-Jong, Dusun Batu Katak Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara sebagai upaya untuk menarik wisatawan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak terkait dan data sekunder dari buku-buku, artikel, penelitian terdahulu, serta data pendukung lain yang mempunyai topik bahasan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Perempuan di Batu Katak yang mayoritas Suku Karo sangat dikenal sebagai petani dan pekerja keras, sehingga hasil dari tanaman obat akan dapat membantu menambah penghasilan keluarga. Aspek budidaya dan produksi sudah dirasakan Cukup, karena memang sudah diajarkan secara turun temurun. Berkembangnya Ekowisata Batu Katak merupakan salah satu peluang untuk membuka jaringan komunikasi dan jaringan pemasaran dengan pihak luar. Wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara sudah mulai meminati obat-obatan tradisional. Hal ini bisa berjalan beriringan karena Ekowisata Batu Katak mengandalkan panorama alam dan tradisi yang unik.

Kata kunci: wisatawan, kelompok tani, tanaman obat

Abstract

The purpose of this study was to determine the cultivation of medicinal plants carried out by farmer groups like farming. In Batu Jong-Jong Village, Batu Katak Hamlet, Bahorok Sub-District, Langkat District, North Sumatra Province as an effort to attract tourists. The research method used in this study is descriptive research with a qualitative approach. The data sources in this study are primary data by conducting interviews with relevant parties and secondary data from books, articles, previous research, and other supporting data that have topics related to research. The results of the study show that the majority of women in Batu Katak, the Karo tribe, are known as farmers and hard-working people, so the yield from medicinal plants will help increase family income. Cultivation and production aspects have been felt enough, because it has been taught from generation to generation. The Development of Ecotourism Batu Katak is one of the opportunities to open communication networks and marketing networks with outside parties. Tourists and foreign tourists have begun to take interest in traditional medicines. This can go hand in hand because the Frog Stone Ecotourism relies on a unique panorama of nature and tradition.

Keywords: tourists, farmers' groups, medicinal plants

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumberdaya yang ada dan

membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan

ekonomi) wilayah tersebut (Lincoln A, 2010). Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanannya terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada cirri khas (*unique value*) dari daerah yang bersangkutan (*endogeneous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal. Masyarakat di dekitar hutan pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara sosial ekonomi dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Di Indonesia terdapat 48,8 juta orang yang tinggal pada lahan hutan Negara, sekitar 10,2 juta diantaranya dianggap miskin (I Putu Garjita *et al*, 2014). Keberadaan masyarakat sekitar kawasan hutan merupakan komponen yang secara langsung berinteraksi dengan hutan yang berada disekitarnya. Namun, jika interaksi yang dilakukan masyarakat merupakan tindakan yang dapat merusak alam maka keberadaan hutan akan menjadi terancam.

Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) merupakan salah satu taman nasional yang berada di Propinsi Sumatera Utara. Secara administratif kawasan TNGL terletak di dua propinsi, yaitu Propinsi Aceh dan Propinsi Sumatera Utara dengan luas total 1.094.692 hektar. Kawasan yang masuk ke dalam wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas 203.669 hektar, seluruhnya masuk wilayah Kabupaten Langkat (BBTNGL, 2015). Salah satu desa yang langsung berbatasan dengan kawasan TNGL di Kecamatan Bahorok adalah Desa Batu Jong-Jong. Menurut penuturan masyarakat Desa Batu Jong-Jong khususnya yang tinggal di Dusun Batu Katak, mereka dulu sering melakukan pembalakan liar untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Balai Besar TNGL pernah melakukan restorasi hutan di lokasi yang berbatasan dengan

Desa Batu Jong-Jong pada tahun 2011 hingga 2013.

Dusun Batu Katak memiliki flora yang khas seperti *rafflesia* dan fauna yang khas seperti orangutan, jenis-jenis tersebut juga terdapat di dalam kawasan TNGL dan terdapat 8 gua karst serta Sungai Bekail sebagai pesona alam. Menurut Purnomo *et al* (2013) potensi keanekaragaman flora dan fauna merupakan modal pengembangan ekowisata yang prinsipnya adalah pendidikan konservasi lingkungan terhadap pengunjung dan masyarakat setempat. Pengembangan ekowisata dengan pengelolaan bersama masyarakat sekitar dapat meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat dalam ikut melestarikan kawasan (Purnomo *et al*. 2013). Konsep yang ditawarkan dalam ekowisata adalah *low invest-high value* bagi sumberdaya alam dan lingkungan sekaligus menjadi sarana cukup ampuh bagi partisipasi masyarakat, karena aset produksi merupakan milik masyarakat lokal (Suryawan, 2013). Aset produksi dalam konsep pengelolaan ekowisata adalah sumberdaya alam dan lingkungan yang masih terjaga kelestariannya. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kurangnya pengelolaan yang profesional dalam skala rumah tangga dan pemasaran dari produk yang telah dihasilkan, sehingga dampak secara ekonomi belum bisa terlihat dengan jelas.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berupa observasi dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan kepada tiga elemen besar yaitu Ketua Lembaga Pariwisata Batu Katak, Penyuluh Kehutanan, Perangkat desa. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Sutopo (2002) adalah upaya berlanjut, berulang dan

terus menerus. Penulis menggunakan model analisis data interaktif, yaitu data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut. Sehingga data terkumpul berhubungan dengan lainnya secara sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada masa lalu manusia yang hidup di daerah sangat akrab dengan hutan, Nusantara adalah bentangan hutan yang senantiasa menghijau sehingga disebut Zamrud Khatulistiwa. Nenek moyang kita sudah mengenal beraneka jenis tumbuhan dan binatang, sehingga tidak mengherankan dari segi pengalaman orang-orang yang hidup di Nusantara mengenal begitu banyak tumbuhan yang berkhasiat obat. Beberapa daerah yang terkenal akan ramuan tradisionalnya atau jamu-jamuan adalah Karo, Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Taman Nasional Gunung Leuser tercatat memiliki 4000 jenis tumbuhan, masyarakat di sekitar kawasan sudah banyak mengenal jenis-jenis yang dapat dimanfaatkan untuk obat. Pengetahuan mereka didapatkan secara turun temurun, masyarakat lokal sudah menganggap hutan sebagai sahabat sehingga mereka secara bersama berusaha menjaga kelestariannya. Masuknya para pemodal dari luar daerah memperkenalkan tanaman perkebunan sehingga turut mempengaruhi gaya hidup saat ini.

Masyarakat yang berada di sekitar kawasan TNGL di wilayah Langkat didominasi oleh suku Karo dan Melayu. Masyarakat Karo sangat terkenal dengan ramu-ramuan tradisionalnya diantaranya adalah minyak Kem-Kem sebagai minyak urut dan obat luka. Penuruni Tasaken sebagai obat dengan banyak khasiat. Penuruni Tasaken terdiri dari puluhan jenis tumbuhan sehingga khasiatnya sangat

dipercaya dan menjadi andalan masyarakat Karo. Salah satu lokasi yang saat ini sedang dikembangkan ke arah ekowisata adalah Batu Katak, Desa Batu Jong-Jong Kecamatan Bahorok, selain wisata masyarakat juga berminat untuk mengembangkan tanaman obat dan anggrek. Tanaman obat yang sudah coba untuk dibudidayakan sebanyak 40 jenis. Tanaman ini sebagian besar merupakan bahan untuk ramu-ramuan tradisional Karo. Dalam meracik ramu-ramuan Karo ada bahan-bahan yang dibutuhkan ada yang sangat sulit dijumpai lagi saat ini. Hal inilah yang mendorong masyarakat Batu Jong-Jong untuk membudidayakan tumbuhan berkhasiat obat di desanya.

Beberapa jenis tumbuhan berkhasiat obat yang telah dikenal sejak turun temurun tapi saat ini sudah agak susah ditemukan adalah Ama-Ama, Kebal Pusoh, Selebur Kumpa, Sabi Menci, Tawar Ipoh, Gegetan Harimau, dan Garang-Garang. Langkah awal pembudidayaan tumbuh-tumbuhan tersebut adalah dengan mengumpulkan benih atau bibit dari alam kemudian ditanam di demplot tanaman obat yang berada di Batu Katak. Hasil dari budidaya tanaman obat ada yang bisa langsung digunakan sebagai obat ada yang harus diolah (diracik, diramu, dikemas) terlebih dahulu. Ibu-ibu di Batu Katak sudah biasa mengolah tumbuhan obat menjadi obat dengan cara tradisional yang diwariskan turun temurun. Pada proses pengembangan tanaman obat diharapkan dapat melibatkan peran perempuan yang berada di Batu Katak dalam mengelola demplot tanaman obat. Perempuan di Batu Katak yang mayoritas Karo sangat dikenal sebagai petani dan pekerja keras sehingga hasil dari tanaman obat akan dapat membantu menambah penghasilan keluarga.

Aspek budidaya dan produksi sudah dirasakan Cukup, karena memang sudah diajarkan secara turun temurun. Pemasaran ke luar daerah masih menjadi kendala karena keterbatasan sarana dan

asilitas pendukung. Saat ini jaringan telekomunikasi di Batu Katak masih terbatas pada satu operator saja, itupun kondisinya masih dinilai lemah. Pemasaran masih dilakukan dari mulut ke mulut dan lebih cenderung kekeluargaan. Pemasaran dengan memanfaatkan internet memberikan harapan besar bagi masyarakat untuk dapat menduniakan khasiat obat-obatan tradisional yang telah mereka rasakan. Harganya yang masih sangat murah bisa ditingkatkan melalui peningkatan jumlah produksi dan mencari peluang pasar di luar Batu Katak bahkan pada skala nasional.

Pada tahap awal pengembangan budidaya tanaman obat akan difokuskan pada jenis yang mudah tumbuh dan

pangsa pasar yang bagus. Sabi Menci (Sawi Tikus) adalah jenis tumbuhan obat semacam sawi dengan ukuran lebih kecil dan berwarna merah. Selebur Kumpa sejenis daun sirih dapat dikembangkan biakkan dengan umbi. Kebal Pusoh adalah tanaman sejenis kacang-kacangan yang dapat dikembangkan biakkan dengan stek batang. Penanaman Sabi Menci akan dilakukan pada lahan seluas 200 m², tumbuhan ini bisa dipanen setelah 40 hari. Pada tahap awal yang dibutuhkan adalah produksi benih, karena benih Sabi Menci sudah mulai sulit ditemukan. Produksi benih diharapkan dapat menyuplai kebutuhan benih sehingga mempermudah dalam pengembangan.

Tabel. 1.1 Harga Pasar Tanaman Obat

No	Nama Lokal	Umur Panen	Harga	Khasiat
1	Sabi Menci	1-2 Bulan	150.000/20 batang	Penambah nafsu makan
2	Sempahagan	2-3 Bulan	10.000/lembar	Masuk Angin
3	Selebur Kumpa	3 Bulan	10.000/lembar	Menstruasi, Karang Angin
4	Amak-Amak	3,5 Bulan	10.000/batang	Panas Dalam
5	Besi-Besi	3 s.d 4 Bulan	10.000/batang	Tipus
6	Tawar Ipoh	5 Bulan	10.000/lembar	Bisa Ular
7	Ikur Tempulak	4 Bulan	5.000/lembar	Salah Urat
8	Gagaten Harimau	5 Bulan	10.000/lembar	Stamina
9	Saka Kampilet	3 Bulan	10.000/batang	Step
10	Garang-Garang	3,5 Bulan	10.000/batang	Menambah nafsu makan
11	Selebur Karang	3 Bulan	15.000/batang	Karang
12	Kebal Pusoh	3 Bulan	15.000/batang	Diabetes
15	Cep-Cepan	6 Bulan	10.000/batang	Maag, Disentri
16	Rumba Tasik	6 Bulan	5.000/lembar	Masuk Angin

Gambar. 1.1. Demplot Tanaman Obat Menjadi Tujuan Wisatawan Asing

Berkembangnya Ekowisata Batu Katak merupakan salah satu peluang untuk membuka jaringan komunikasi dan jaringan pemasaran dengan pihak luar. Wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara sudah mulai meminati obat-obatan tradisional. Hal ini bisa berjalan beriringan karena Ekowisata Batu Katak mengandalkan panorama alam dan tradisi yang unik. Dalam waktu secepatnya perlu dibuat sebuah toko atau gerai yang memajang semua obat-obatan tradisional hasil masyarakat Batu Katak. Para

wisatawan dapat membeli langsung maupun memesan dalam skala besar. Pemasaran menjadi kunci utama dalam keberhasilan mengembangkan obat-obatan tradisional. Pemasaran dari produk tanaman obat sangat terbuka luas mulai dari masyarakat sekitar hingga ke kabupaten/kota yang berada di wilayah Sumatera Utara. akan lebih berkembang terutama dalam hal wawasan dan kemampuannya dalam mengelola sebuah lembaga.

4. KESIMPULAN

Budidaya tanaman obat dengan jenis-jenis lokal masih perlu pegamatan yang intensif sehingga selain manfaat dari sisi kesehatan dapat juga digali manfaat secara ekonomis terutama sebagai sumber penghasilan alternative. Kelompok Tani Suka Tani diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak usaha berbasis gender di Kabupaten Langkat. Para perempuan Karo yang dikenal sangat tangguh dalam bertani, dengan wadah Kelompok Tani seperti ini tentu akan lebih berkembang. Budidaya tanaman obat dengan jenis-jenis lokal masih perlu pegamatan yang intensif sehingga selain manfaat dari sisi kesehatan dapat juga digali manfaat secara ekonomis terutama sebagai sumber penghasilan alternative.

DAFTAR PUSTAKA

- [BBTNGL] Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. (2015). Statistik Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Tahun 2014. BBTNGL.Medan
- Lincoln Arsyad. (2010). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN
- Purnomo, H., Sulistyantara, B., dan Gunawan, A. (2013). Peluang Usaha Ekowisata di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*. 10 (4) : 247-263.
- Sumaryono., Nakatani, K., Satofuka, Y., and Mizuyama, T. (2009). One-Dimensional Numerical Simulation for Sabo Dam Planning Using Kanako (Ver. 1.40): A Case Study at Cipanas, Guntur Volcanoes, West Java, Indonesia. *International Journal of Erosion Control Engineering*. 2 (1) : 22-32.
- Suryawan, I, B. (2013). Pengelolaan Potensi Ekowisata Di Desa Cau Balayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. *Analisa Pariwisata*. 13 (1) : 106-111.
- Yayuk Yuliana, (2018). 2018. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis kearifan lokal untuk mendukung ekonomi keluarga*. Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. II No.2 November

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) /CSR TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DISEKITAR LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

Nelly Azwarni Sinaga
Dosen STIE Al Washliyah Sibolga
nelly_az@yahoo.co.id

Abstrak

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan Teknologi masyarakatpun menjadi semakin kritis dan menyadari akan hak-hak asasinya, dengan demikian semakin berani untuk mengepresikan tuntutan nya terhadap bisnis di Indonesia, dengan keadaan ini maka pelaku pelaku bisnis harus lebih bertanggung jawab , dan bukan hanya untuk mengambil keuntungan semata, namun mereka harus juga emberikan kontribusi yang positif terhadap lingkungan sosialnya.Masyarakat sudah makin menyadari bahwa pentingnya untuk dilaksanakan Corporate Sosial Responsibility (CSR) ,yang mana ini mendorong Perusahaan untuk lebih peduli terhadap lingkungan dimana tempat beroperasinya Perusahaan tersebut. Penelitian Hukum yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan kepada hukum utama dengan dengan cara menelaah teori-teori , konsep-konsep , asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.Keseluruhan data yang telah didapat akan dianalisis secara Kualitatif atau dikenal dengan Analisis Deskriptif Kualitatif. Dari hasil Penelitian dapat dikemukakan bahwa Sanksi Hukum terhadap Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Kepada Masyarakat secara pasti diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.Konsep dari CSR dari suatu Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam di dalam menjalankan kegiatan usahanya apabila tidak melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan maka sudah selayaknya diberikan sanksi.

Kata kunci: *corporate social responsibility (CSR), masyarakat, bisnis, sanksi*

Abstract

Along with the times and advancements in Technology, people have become increasingly critical and aware of their human rights, and thus more courageous to express their demands on business in Indonesia, with this situation, business people must be more responsible, and not just to take advantage , but they must also give a positive contribution to their social environment. The community has increasingly realized that it is important to implement Corporate Social Responsibility (CSR), which encourages the Company to care more about the environment in which the Company operates. Legal Research conducted is Normative Juridical Legal Research, namely the approach taken based on the main law by examining theories, concepts, principles of law and legislation related to this research. The entire data obtained will be Qualitatively analyzed or known as Qualitative Deskrtive Analysis. From the results of the research, it can be stated that the legal sanctions on Limited Liability Companies that do not carry out Social Responsibility (CSR) to the Community are certainly regulated in the applicable legislation. The concept of CSR from a company engaged in natural resources in carrying out activities if the business does not carry out Corporate Social Responsibility (CSR) as stipulated in the Limited Liability Company Law, Investment Law and Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility, sanctions should be given.

Keywords: *corporate social responsibility (CSR), society, business, sanctions*

1. PENDAHULUAN

Corporate Sosial Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya Perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya yang diantaranya antara lain : konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional Perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Corporate Sosial Responsibility (CSR) adalah merupakan suatu komitmen dari Perusahaan dalam dunia bisnis dalam hal berkontribusi untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan terhadap aspek sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat sekitar Perseroan Terbatas berada.

Perseroan Terbatas adalah merupakan suatu Perusahaan yang oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai Perusahaan yang memiliki badan hukum dan didirikan berdasarkan kepada perjanjian, melakukan kegiatan usahanya dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang .Dengan status yang dimiliki tersebut maka Perseroan Terbatas menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban .Dengan demikian Perseroan Terbatas akan melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya dengan manusia dan dapat memiliki kekayaan atau utang. Kata Perseroan tersebut menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas yang disebut dengan Saham.Sedangkan yang dikatakan dengan Terbatas adalah menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak boleh melebihi nilai,nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk dari kegiatan ekonomi yang disukai sampai saat ini, karena pertanggungjawabannya bersifat terbatas dan juga memberikan kemudahan bagi pemilik dan pemegang saham untuk

mengalihkan Perusahaannya kepada setiap orang dengan cara menjual saham yang mereka miliki.

Perseroan Terbatas di dalam menjalankan usahanya tidak hanya harus berorientasi kepada keuntungan semata, namun juga harus memperhatikan seluruh aspek dalam menjalankan usahanya antara lain : aspek keuangan, aspek sosial dan aspek lingkungan yang berdasarkan kepada konsep Triple Bottom Line yaitu tidak hanya mementingkan keuangan yang akan dicapai, namun Perusahaan sebagai pelaku bisnis di dalam menjalankan usahanya dituntut untuk memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan yang ada disekitarnya .Dengan demikian apabila suatu Perusahaan memperoleh suatu keuntungan, maka Perusahaan tersebut harus menyadari dan memikirkan tanggung jawab apa yang harus dilakukannya terhadap masyarakat terutama dimana Perseroan tersebut berada. Hal ini pada waktu Perusahaan tersebut awalnya berdiri adalah tiada lain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat, dan bukan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan saja ,namun lebih dari itu adalah memiliki tanggung jawab sosial Perusahaan pada Masyarakat sekitar Perusahaan tersebut berada.

Apabila setiap Perusahaan menjalankan CSR ini untuk memahami tingkat kesadaran dari masyarakat sekitar Perusahaan bahwa Perusahaan bukan lagi sebagai yang hanya mementingkan diri sendiri sehingga mengasingkan diri terhadap lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan suatu usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. Bentuk tanggung jawab sosial dari Perusahaan tersebut dapat berbagai aspek dilakukan , mulai dari melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan sekitarnya, pemberian bantuan Beasiswa

untuk anak yang kurang mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk masyarakat yang berada disekitar Perusahaan tersebut berada. Dengan demikian dengan Keberadaan dari Perusahaan tersebut terhadap masyarakat sekitarnya menjadi peningkatan kualitas kehidupan, dimana kemampuan manusia sebagai anggota masyarakat untuk menanggapi keadaan sosial yang ada, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup, yang pada akhirnya akan berdampak positif.

Dengan perkembangan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat yang terus berkembang pesat. Dan hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari dunia usaha. Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat ditandai dengan munculnya berbagai Perusahaan yang menyerap skala besar dari tenaga kerja. Bidang-bidang usaha yang ada juga semakin banyak sehingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat terutama masyarakat di mana Perusahaan tersebut berada, dengan demikian banyak daerah yang berlomba-lomba untuk memajukan dirinya dengan cara memberikan kesempatan bagi Perusahaan-Perusahaan untuk beroperasi di daerahnya. Seiring dengan perkembangan zaman dari masyarakat yang menjadi semakin kritis dan menyadari akan hak-hak asasinya, dengan demikian semakin berani untuk mengepresikan tuntutan mereka terhadap bisnis di Indonesia, dengan keadaan ini maka pelaku bisnis harus lebih bertanggung jawab, dan bukan hanya untuk mengambil keuntungan semata, namun mereka harus juga memberikan kontribusi yang positif terhadap lingkungan sosialnya. Masyarakat sudah makin menyadari bahwa pentingnya untuk dilaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR), yang mana ini mendorong Perusahaan untuk lebih peduli terhadap lingkungan dimana tempat beroperasinya Perusahaan

tersebut, dan hal ini jelas ada pengaturannya dalam Undang-undang.

Tanggung jawab sosial diarahkan kepada hubungan yang internal maupun yang bersifat eksternal (keluar) dari Perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Bahwa : Perseroan Terbatas (PT) wajib melaksanakan tanggung jawab Sosial dan Lingkungan adalah Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian Hukum yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan kepada hukum utama dengan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.2 Sumber Data

Bahan hukum yang diperoleh dari Data Sekunder yaitu bersumber dari Penelitian Kepustakaan (Library Research).

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen yaitu data yang diperoleh dari Kepustakaan yang relevan.

2.4 Teknik Analisis

Keseluruhan data yang telah didapat akan dianalisis secara Kualitatif atau dikenal dengan Analisis Deskriptif Kualitatif. Dimana keseluruhan data yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Corporate Social Responsibility (CSR) terbagi dalam dua pengertian, yaitu dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. CSR dalam pengertian luas berkaitan erat dengan tujuan untuk mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (sustainable economic activity). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas (accountability) Perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia Internasional. CSR adalah merupakan bentuk kerjasama antara Perusahaan dengan segala hal (stakeholders) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan Perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha Perusahaan tersebut.

Konsep dari CSR dari suatu Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam di dalam menjalankan kegiatan usahanya apabila tidak melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan maka sudah selayaknya diberikan sanksi. Ada 4 (empat) hal ketentuan tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan yang diatur Dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang tanggung Jawab Sosial (CSR) antara lain :

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam wajib melaksanakan Tanggung jawab Sosial Dan Lingkungan.
- b. Tanggung Jawab Sosial (CSR) dan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya

dilakukan dengan kepatutan dan kewajiban.

- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dikenai Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan Sanksi terhadap Perseroan tersebut antara lain :

Pengaturan Sanksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Sanksi tidak dilaksanakannya CSR diatur dalam Pasal 74 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengemukakan bahwa :

“Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenai Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku “

Pengaturan Sanksi menurut Undang-Undang Penanaman Modal.

Ketentuan CSR dalam Undang-Undang Penanaman Modal menjelaskan bahwa CSR adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Penanam Modal. Penanam Modal apabila tidak melaksanakan kewajibannya maka akan mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal yang mengemukakan bahwa :

“ Badan Usaha atau Usaha Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif antara lain :

- a. Peringatan Tertulis
- b. Pembatasan Kegiatan Usaha
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal atau

d. Pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal menjelaskan bahwa : “ Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Perseroan Terbatas Yang Bergerak Di Bidang Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan mengemukakan bahwa yang menjadi subyek dari CSR yaitu Perseroan yang bergerak dan atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menambahkan klausula bahwa yang dimaksud dengan sumber daya alam yaitu : sumber daya alam dalam bidang Perindustrian, Kehutanan, Minyak Dan Gas Bumi, Sumber Daya Air, Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Ketenagalistrikan.

b. Pengaturan Sanksi Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup

Pengaturan sanksi dalam UU Lingkungan Hidup terdapat dalam Pasal 76 dan Pasal 77 menyebutkan bahwa :

1. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
 2. Sanksi Administratif antara lain :
 - a. Teguran tertulis.
 - b. Paksaan Pemerintah.
 - c. Pembekuan izin lingkungan atau
 - d. Pencabutan izin lingkungan
- Pasal 77 lebih lanjut menerangkan bahwa:

“Menteri dapat menerapkan sanksi administrative terhadap penanggung

jawab usaha dan atau kegiatan jika Pemerintah menganggap bahwa Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.Ketentuan peraturan tersebut menjelaskan bahwa Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota memberikan sanksi administrative kepada penanggung jawab usaha yang melanggar izin lingkungan.

4. KESIMPULAN

1. Konsep dari CSR dari suatu Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam di dalam menjalankan kegiatan usahanya apabila tidak melakukan Corporate Social Responbility (CSR) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan maka sudah selayaknya diberikan sanksi.
2. Bahwa Sanksi Hukum terhadap Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Kepada Masyarakat secara pasti diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,namun penerapan sanksi hukum terhadap Perusahaan yang melalaikannya lebih ditekankan pada Sanksi Administratif salah satunya dapat dilihat dalam UU Lingkungan Hidup Pasal 76 Dan 77.

Menyebutkan bahwa :

 1. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
 2. Sanksi Administratif antara lain :
 - a. Teguran tertulis.
 - b. Paksaan Pemerintah.

- c. Pembekuan izin lingkungan atau
 - d. Pencabutan izin lingkungan
- Pasal 77 lebih lanjut menerangkan bahwa :
- “Menteri dapat menerapkan sanksi administrative terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan jika Pemerintah menganggap bahwa Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.Ketentuan peraturan tersebut menjelaskan bahwa Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota memberikan sanksi administrative kepada penanggung jawab usaha yang melanggar izin lingkungan.

UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ichsan Dalam Raehmadi Usman (2004), Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Alumni Bandung, Jakarta.
- A.B Susanto (2007), A Strategic Management Approach Corporate Sosial Responbility, Jakarta: The Jakarta Consulation Group.
- Binuto Nadap Dap (, 2012), Hukum Perseroan Terbatas, Permata Aksara, Jakarta
- M.Yahya Harahap (2009), Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nelvitia Purba dkk (2017), Asfek Hukum Bisnis, Mahara Publishing, Tangerang.
- J.Supranto (2003), Metode Penelitian Hukum Dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto (1986), Pengantar Penelitian Hukum, Vipress, Jakarta.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VII/2008 Tentang Judicial Review Pasal 74

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BERCEKITA UNTUK MENUMBUHKEMBANGKAN EMPATI ANAK USIA DINI

Sukmawarti¹

Nurhidayah²

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Jl. Garu 2 No. 93 Medan

e-mail: bundasukma.umn@gmail.com

Abstrak

Salah satu permasalahan Anak Usia Dini adalah belum optimalnya pertumbuhan dan perkembangan empati anak. Empati merupakan suatu konsep sosial yang perlu dikenalkan kepada anak karena memiliki peranan penting dalam pengembangan keterampilan sosialnya. Rasa empati anak bukanlah terbentuk secara tiba-tiba, namun merupakan imitasi dan pembiasaan. Belum optimalnya perkembangan empati anak antara lain disebabkan kurang tepatnya kegiatan pembelajaran yang diterapkan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana model pembelajaran bercerita yang dikembangkan sehingga dapat menumbuhkembangkan empati anak usia dini? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model pembelajaran bercerita dalam upaya menumbuhkembangkan empati anak usia dini. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan model Borg and Gall, dengan tahapan Define, Design, Develop, Eksperimen Produk, dan Model Produk. Subjek penelitian adalah anak kelompok B PAUD Az-Zaitun Medan. Objek penelitian adalah rasa empati Anak Usia Dini. Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa model pembelajaran bercerita signifikan dalam menumbuhkembangkan empati anak. Disarankan kepada guru PAUD agar dapat menerapkan model pembelajaran bercerita sebagai salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat menumbuhkembangkan empati anak.

Kata kunci: *empati, anak usia dini, model pembelajaran bercerita*

Abstract

One of problems for early childhood kids is optimal growth and development of their empathy. Empathy is social concept which is needed to be introduced for kids because it has important role in social skill development. Empathy feeling cannot suddenly rise inside the kids, it occurs because of imitation and habitual action through environment. The less development of kids' empathy feeling is caused by ineffective applied learning model for them. The problem formulation of this research was how the effective story telling learning model in order to increase early childhood kids' empathy is. The goal of this research was to develop the effective story telling learning model in order to increase early childhood kids' empathy. This research was Borg and Gall research development model, with stage consisted of Define, Develop, Product Experiment and Product Model. The subject of the research was Class B student of PAUD Az-Zaitun Medan. The object of the research was early childhood kids' empathy Based on the data analysis, it could be concludes that story telling learning model was significant in improving kids' empathy. It was suggested for PAUD's teacher to apply the story telling learning model as one of alternative learning model in improving kids' empathy feeling.

Keywords: *empathy, early childhood kids, story telling learning model*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan kepada

anak untuk membantu mereka tumbuh kembang baik jasmani maupun rohani. Tingkat perkembangan tersebut merupakan aktualisasi potensi semua

aspek perkembangan yang diharapkan dapat dicapai anak pada setiap tahap perkembangannya. Pencapaian perkembangan anak yang optimal merupakan permasalahan kompleks karena mencakup berbagai aspek perkembangan yang terpadu dan mempengaruhi tumbuh kembang aspek yang lain. Salah satu aspek perkembangan anak adalah rasa empati anak. Empati merupakan suatu konsep sosial yang perlu dikenalkan kepada anak karena memiliki peranan penting dalam pengembangan keterampilan sosial anak. Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di PAUD Az-Zaitun Medan, masih ada anak sulit menunjukkan rasa empati. Sebagai contoh pada saat kejadian terjatuhnya salah seorang anak ketika sedang bermain kejar-kejaran, ternyata anak-anak yang lain langsung menertawakannya tanpa berusaha untuk menolong. Masih banyak juga anak-anak yang sulit untuk memberi maaf kepada temannya yang telah melakukan kesalahan maupun menerima maaf dari temannya yang telah melakukan kesalahan. Hal ini mengindikasikan perkembangan empati anak belum berkembang optimal. Masa usia dini merupakan masa keemasan pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada masa ini anak mulai mengenal diri dan lingkungannya, sehingga masa ini merupakan waktu yang tepat untuk mengembangkan empati anak. Optimalisasi empati anak ini perlu pengembangan melalui bantuan guru melalui model pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik anak, taraf perkembangan anak, dan prinsip pembelajaran anak usia dini. Proses pendidikan pada Anak Usia Dini (AUD) harus dilakukan melalui pemberian stimulasi pendidikan yang tepat agar pertumbuhan dan perkembangan empati anak dapat optimal. Kegiatan yang dapat menstimulus anak salah satunya adalah kegiatan bercerita. Bercerita adalah salah satu kegiatan pembelajaran yang

melibatkan anak aktif mendengarkan, menceritakan, merasakan dan memahami cerita tertentu. Melalui model pembelajaran bercerita yang menyenangkan, anak berusaha untuk mendapatkan pengalaman yang kaya, baik pengalaman dengan dirinya sendiri, orang lain maupun dengan lingkungan di sekitarnya.

1.1 Rumusan masalah

pada penelitian ini adalah bagaimana bagaimana model pembelajaran bercerita yang dikembangkan sehingga dapat menumbuhkembangkan empati anak usia dini?

1.2 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model pembelajaran bercerita dalam upaya menumbuhkembangkan empati anak usia dini. Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah membantu guru mendesain model pembelajaran bercerita.

2. METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2016–2017. Waktu pelaksanaan penelitian selama 2 bulan dari bulan November sampai Desember 2016.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan Model Borg and Gall (1989), dengan tahapan berikut:

1. Pendefinisian (*Define*)
Menganalisis potensi masalah yang terjadi pada anak PAUD Az-Zaitun, meliputi kajian aspek-aspek rasa empati, menganalisis karakteristik anak, analisis awal empati anak, dan analisis kurikulum.
2. Perancangan (*Design*)
Menyusun perangkat pembelajaran meliputi instrumen penilaian, media, rancangan cerita, dan skenario model bercerita.
3. Pengembangan (*Develop*)
Mendesain draf kegiatan bercerita dan mengkonsultasikan draft kepada ahli

(*expert appraisal*). Berdasarkan dari hasil konsultasi dengan ahli maka dilakukan perbaikan terhadap skenario model bercerita. Selanjutnya dilakukan ujicoba (*developmental testing*). Dari hasil ujicoba dilakukan revisi.

4. Eksperimen Produk

Eksperimen dilakukan untuk melihat efektivitas penggunaan model kegiatan bercerita, menganalisis data empati anak dengan analisis kualitatif dan kuantitatif.

5. Model Produk

Hasil desain berupa model pembelajaran berupa skenario kegiatan bercerita siap pakai.

Subjek dalam penelitian adalah anak kelompok B PAUD Az-Zaitun Medan. Sedangkan objek penelitian ini adalah rasa empati anak.

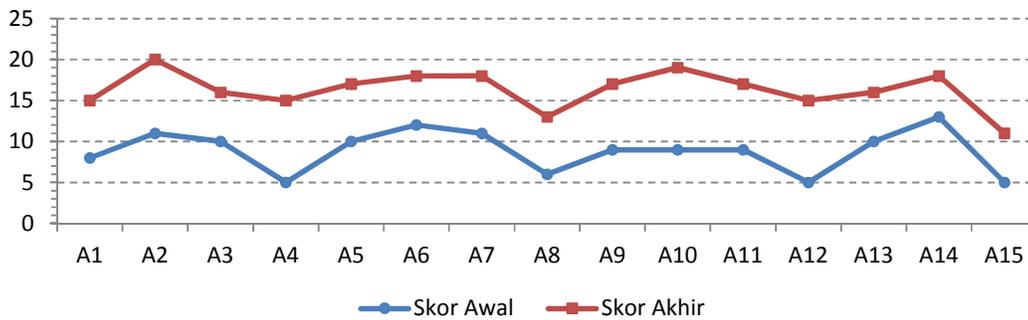
Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi empati anak. Indikator dari rasa empati anak adalah 1) Mendengar dengan seksama apa yang

diceritakan, 2) Menghibur teman yang sedih, 3) Suka menolong, 4) Memberimaaf, dan 5) Meminta maaf.

Efektivitas model pembelajaran bercerita terhadap rasa empati anak dilihat dari ketercapaian 80% anak mencapai Berkembang Sesuai Harapan (BSH) untuk setiap indikatornya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa perkembangan empati anak masih belum optimal. Umumnya anak belum berkembang sesuai harapan, dimana empati anak yang mencapai perkembangan sesuai harapan adalah 12%. Setelah melalui model pembelajaran bercerita, tingkat perkembangan empati anak mengalami kemajuan yang berarti. Tingkat perkembangan empati anak sebelum dan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui model bercerita diilustrasikan pada grafik Perkembangan Empati Anak berikut.



Gambar 1. Grafik Perkembangan Empati Anak

Perkembangan empati anak untuk setiap indikatornya telah mencapai taraf berkembang sesuai harapan. Persentase

pencapaian perkembangan empati dapat dilihat pada tabel Persentase Perkembangan Empati berikut.

Tabel 1. Persentase Perkembangan Empati

No.	Aspek Empati	Ketercapaian	Persentase (%)			
			BB	MB	BSH	BSB
1.	Mendengar cerita dengan seksama	100,00	0,00	0,00	73,33	26,67
2.	Menghibur teman yang sedih	80,00	0,00	20,00	66,67	13,33

3.	Suka Menolong	93,33	0,00	6,67	40,00	53,33
4.	Memberi maaf	93,33	0,00	6,67	66,67	26,67
5.	Meminta maaf	86,67	0,00	13,33	26,67	60,00

Keterangan:

Belum berkembang (BB) sesuai indikator, perlu bantuan guru.

Mulai berkembang (MB) sesuai indikator.

Sudah berkembang sesuai harapan (BSH).

Berkembang sangat baik (BSB).

Setelah penerapan model pembelajaran bercerita dapat dilihat bahwa tingkat ketercapaian empati anak telah mengalami perkembangan yang optimal, yakni 80% telah mencapai berkembang sesuai harapan untuk setiap indikator. Semua anak teramati sudah antusias mendengar cerita rakyat yang dituturkan guru. Ekspresi anak sewaktu mendengar cerita sudah baik. Raut wajah sedih, gembira, dan kesal tercermin dari wajah dan tingkah anak sesuai dengan makna cerita yang ada pada cerita. Tidak ada lagi anak yang belum berkembang untuk setiap aspek empati. Namun untuk aspek menghibur teman yang sedih, suka menolong, memberi maaf, dan meminta maaf masih ada beberapa anak yang masih berada pada taraf mulai berkembang. Hal ini juga dikarenakan beberapa faktor, antara lain anak masih malu-malu, susah berkomunikasi, dan belum terlihat akrabnya setiap anak pada semua temannya.

Model pembelajaran bercerita efektif digunakan dalam menumbuhkembangkan empati anak. Keefektifan model bercerita ini dapat diwujudkan dengan desain model bercerita yang tepat, disamping tema cerita yang menarik. Dalam melaksanakan model bercerita terlebih dahulu dilakukan persiapan terhadap alat peraga yang digunakan.

Langkah yang ditempuh dalam mengembangkan model pembelajaran bercerita antara lain:

1. Pemilihan tema.



Gambar. 2. Jaringan Tema Pekerjaan

2. Mempersiapkan bahan cerita berupa cerita rakyat, seperti kisah Si Alamsyah, Raja Burung Parkit, Si Tanduk Panjang, Danau Toba, dan Malin Kundang.
3. Menyediakan alat peraga gambar-gambar ilustrasi cerita.
4. Melakukan kegiatan bercerita dengan suara dan mimik wajah sesuai karakter tokoh cerita.
5. Memberi pertanyaan kepada anak tentang cerita melalui sifat tokoh-tokoh dalam cerita.
6. Anak memberikan tanggapan berkaitan tentang cerita.

Model pembelajaran bercerita merupakan salah satu alternatif dalam menumbuhkembangkan empati anak. Anak dapat dilatih untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Bukan hanya bersimpati, namun anak diharapkan memiliki empati terhadap orang disekitarnya. Hal ini dapat terjadi tentunya dengan rancangan model pembelajaran bercerita yang tepat. Cerita yang diberikan merupakan cerita yang menarik perhatian, seperti yang dilakukan pada penelitian ini adalah cerita rakyat dari berbagai daerah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran bercerita dapat menumbuhkembangkan rasa empati anak usia dini. Melalui kegiatan bercerita dengan teknik yang menarik memicu anak untuk antusias mendengarkannya, dan anak belajar melakukan kegiatan sosial. Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan kepada guru PAUD agar dapat menerapkan model pembelajaran bercerita sebagai salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat menumbuhkembangkan empati anak. Cerita yang diberikan hendaknya dikemas dengan cerita yang menarik dan menggunakan teknik yang bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Borg, W.R. & Gall, M.D. Gall. (1989). *Educational Research: An Introduction, Fifth Edition*. New York: Longman.
- Budiningsih. (2008). *Pembelajaran Moral*. Jakarta: Rineka Cipta Rahayu,
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kompetensi aspek perkembangan anak usia 3-4 dan 5-6 tahun*. Jakarta: Depdiknas
- Fadlillah, M, dkk. (2014). *Edutainment Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Khadijah. (2012). *Konsep Dasar Pendidikan Prasekolah*. Medan: Citapustaka Media Perintis
- Masitoh, dkk. (2009). *Strategi Pembelajaran TK*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Moeslichatoen, R. (2013). *Metode Pengajaran di Taman Kanak-Kanak*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pusat Studi PAUD (2009). *Program Pembelajaran untuk Menstimulasi Keterampilan Sosial Anak bagi Pendidik Taman Kanak-kanak*. Yogyakarta: UNY
- Permendiknas nomor 58 tahun. (2009). Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Rahayu. (2013). *Menumbuhkan Kepercayaan Diri Melalui Kegiatan Bercerita*. Jakarta: Indeks
- Shapiro. (1997). *Mengajarkan Emotional Intelligence Pada Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Wulan, Suryaning dan Imam KR. Moncol. (2011). *Cerita Rakyat Nusantara*. Jakarta: Bestari

OPTIMALISASI TATAKELOLA BADAN USAHA MILIK DESA

Juliman¹⁾

Amra Muslimin²⁾

Universitas Musi Rawas

Jalan Pembangunan Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur

gmyjuliman@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui optimalisasi Tatakelola Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Purwodadni Kabupaten Musi Rawas. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif dianalisis secara kualitatif, pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Penelitian ini mengetahui Tatakelola Badan Usaha Milik Desa dari aspek Sumber Daya manusia dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat dan Peranan pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan amanah Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 Tentang desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya tatakelola BUMdes sehingga belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. BUMDes telah berdiri tetapi belum memberikan peluang kerja bagi masyarakat desa. Penerimaan hasil usaha BUMDes belum memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa. Aspek pengelolaan sumber daya manusia, Ketua dan Sekretaris BUMDes lebih dominan berpendidikan SMP/SLTA, pendidikan S.1 Sebanyak 3 orang, dan pendidikan S2 sebanyak 1 orang. Kepala Desa dan Sekretaris desa lebih dominan berpendidikan SLTA, terdapat 1 orang sekretaris Desa berpendidikan S.1. masih minimnya pendidikan informal yang diikuti oleh perangkat desa dan pengelola BUMDes. Aspek peranan pemerintah desa dalam mengelola BUMDes, Perangkat Desa telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPMD Kabupaten Musi Rawas, Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat, dan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain yang pelaksanaannya tidak terencana.

Kata kunci: optimalisasi tatakelola, badan usaha milik desa.

Abstract

The research objective was to determine the optimization of Village-Owned Enterprises. Management in Purwodadni District, Musi Rawas Regency. The research method in this study was descriptive analyzed qualitatively, data collection using observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis techniques use an interactive analysis model. This study recognizes Village-Owned Enterprise Governance from the aspect of human resources in order to provide services to the community and the role of village government in the management of Village-Owned Enterprises based on mandate. Law of the Republic of Indonesia number 6 of 2014 Concerning villages and Village Minister Regulation, Regional Development Disadvantaged, and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 4 of 2015. The results of the study show that the management of the Village-Owned Enterprises has not been optimal so that it has not been able to improve the economy of rural communities. Village-Owned Enterprises have been established but have not provided employment opportunities for the village community. The receipt of the results of the Village-Owned Enterprises business has not contributed to the improvement of Village Original Revenue. Aspects of human resource management, Chair and Secretary of Village-Owned Enterprises are predominantly junior / senior high school education, S.1 education is 3 people, and 1 master education is. The village head and village secretary are predominantly high school educated, there is 1 village secretary with S.1 education. there is still a lack of informal education followed by village officials and managers of Village-Owned Enterprises. Specific role

of the village government in managing Village-Owned Enterprises, Village Devices have participated in training held by Community empowerment and village government agency in Musi Rawas District, Community Training Center, and participated in training held by other parties unplanned.

Keywords: governance optimization, village-owned enterprises.

1. PENDAHULUAN

Guna meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa, maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai daerah otonom yang

berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki 108 (seratus delapan) unit Badan Usaha Milik Desa yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Musi Rawas, sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah BUMDes. Di Kabupaten Musi Rawas

No.	Kecamatan	Jumlah BUMDes	Persentase (%)
1	Jaya Loka	12	11
2	Tuah Negeri	11	10
3	Tang Pumpung Kepungut	10	9
4	Muara Beliti	11	10
5	Porwodadi	9	8
6	Megang Sakti	14	13
7	STL. Ulu Terawas	6	6
8	Muara Lakitan	8	7
9	Muara Kelingi	5	5
10	Tugumulyo	11	10
11	Sumber Harta	4	4
12	Selangit	3	3
13	Suka Karya	4	4
Jumlah		108	100

Sumber : BPMPD Kabupaten Musi Rawas, data diolah 2017.

Dari data diatas maka dapat di ketahui jumlah Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Musi Rawas sebanyak 108 (Seratus delapan) Unit Badan Usaha Milik Desa yang tersebar di beberapa desa dan

kecamatan. Untuk Kecamatan Purwodadi terdiri dari 9 (sembilan) Unit Badan Usaha Milik Desa, yang dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah BUMDes. Di Kec. Porwodadi

No	Desa	BUMDes	Jenis Usaha
1.	P1 Mardiharjo	Mardiharjo Lestari	a. Simpan Pinjam b. Pertanian
2.	Sadarkarya	Karya Maju	a. Ekonomi Produktif b. Simpan Pinjam
3.	U2. Karya Dadi	Karya Maju	a. Ekonomi Produktif b. Jasa Sewa Tenda c. Pemasaran
4.	R. Rejosari	Maju Makmur	Pembenihan Perikanan
5.	T2. Purwakarya	Purwakaryo	a. Simpan Pinjam b. Ternak Sapi c. Budi daya Ikan
6.	S. Kertosari	Berkah Sejahtera	a. Kerupuk Ubi b. Industri RT.
7.	U1 Pagarsari	Bina Mandiri	a. Pengelolaan Sawah Desa b. Sewa Meja, Kursi c. Ternak Sapi Desa
8.	T1 Bangunsari	Citrasari	a. Simpan Pinjam b. Hasil Pertanian
9.	Trikarya	Tri Jaya	a. Simpan Pinjam b. Perkebunan Karet

Sumber : BPMPD Kabupaten Musi Rawas, data diolah 2017

Fenomena yang terjadi dalam tatakelola Badan Usaha Milik Desa yakni Aparatur Pemerintahan Desa masih belum

banyak memahami proses tatakelola Badan Usaha Milik Desa, Sumber dana yang masih kurang, belum memahami

bagaimana mekanisme mendapatkan sumber permodalan dan pembiayaan, belum adanya jalinan kerjasama, kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa. “Proses implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa banyak faktor yang mempengaruhi seperti adanya kepentingan aktor pelaksana kebijakan yang mempengaruhi hasil kebijakan tersebut, baik kepentingan individu maupun kelompok. Berdasarkan fenomena di atas, Pemerintahan Desa harus mengoptimalkan tatakelola Badan Usaha Milik Desa melalui penataan aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat. Pentingnya peranan dari pemerintahan Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa agar semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah desa dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga berikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi masyarakat desa.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dianalisis secara kualitatif. Sedangkan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini. Metode ini bertujuan untuk menemukan data yang faktual, mendalam tentang gejala yang ada mengenai optimalisasi tatakelola Badan Usaha Milik Desa yang dilaksanakan di lokasi penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tatakelola Badan Usaha Milik Desa adalah serangkaian tindakan yang berpedoman pada peraturan yang berlaku untuk memperoleh hasil yang terbaik dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya mencapai tujuan yang produktif, meningkatkan perekonomian masyarakat Desa melalui pendapatan asli

desa, pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

3.1 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Memberikan Layanan kepada masyarakat Desa, dalam rangka penguatan usaha.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (2007:25) mengemukakan bahwa:

“...BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Bagi pemegang jabatan manajerial tidak-tidaknya memiliki pengalaman kerja di lembaga yang bertujuan mencari keuntungan. Latar belakang pendidikan minimal SMU atau sederajat. Bagi pemegang jabatan Bagian Keuangan, Bendahara dan Sekretaris diutamakan berasal dari sekolah kejuruan (SMK/SMEA) atau D III bidang akuntansi dan sekretaris. Latar belakang pendidikan bagi pemegang jabatan ini penting agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Bagi karyawan diutamakan memiliki latar belakang minimal SMP. Ini disebabkan mereka harus mampu menyusun laporan aktivitas BUMDes yang berkaitan dengan pekerjaannya. Seperti pada contoh karyawan di Unit Jasa Perdagangan, mereka harus menyusun laporan barang-barang yang terjual dan sisa barang di toko atau di gundang setiap periode tertentu (3 bulanan atau 6 bulan sekali). Perlu disusun adanya job deskripsi/ deskripsi tanggungjawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja”.

Dari uraian diatas maka standar kompetensi Sumber Daya Manusia pada Badan Usaha Milik Desa tergolong masih rendah. Perlu kiranya pengelolaan Sumber Daya Manusia agar dapat mencapai tujuan BUMDes yang optimal. Perlu diiringi dengan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja guna meraih keunggulan yang optimal. “Metode pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain dapat melalui pendidikan Formal dan Informal serta dapat juga melalui pelatihan yang dapat dibagi menjadi dua yaitu *In-house* dan *External trainingkan* seperti kegiatan seminar, lokakarya dan pelatihan lainnya”, Suwatno.H dan Priansa Donni Juni (2011:110)

Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan merupakan upaya untuk membuat Sumber daya menjadi optimal. “Tujuan dari pengembangan Sumber Daya Manusia adalah upaya untuk mengurangi dan menghilangkan terjadinya kesenjangan antara kemampuan Sumber Daya Manusia dengan yang dikehendaki oleh organisasi”, Sedarmayanti (2013:163). Dari uraian diatas maka dapat dijelaskan bahwa upaya yang harus dilakukan untuk menciptakan Sumber daya manusia menjadi optimal dalam suatu organisasi adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Dari hasil penelitian tentang Pendidikan Formal dan Informal di Desa-desa pada kecamatan purwodadi dapat diketahui pada uraian sebagai berikut:

Desa S.Kertosari. diketuai oleh Bambang Subali, S.Pd, dengan jumlah anggota pengelola bumdes Pendidikan informal 1 orang berpendidikan S1 dan yang lainnya setingkat SMA. Selanjutnya, sumber daya manusia yang terdapat di BUMDes Desa R. Rejosari, Ketua BUMDes berpendidikan SLTA, Sekretaris BUMDes berpendidikan Sarjana Strata 1 yaitu Sarjana Pertanian jurusan Agrobisnis, Bendahara BUMDES berpendidikan SLTA, dan yang lainnya

tamatan SMP sederajat. Sedangkan untuk BUMDes Desa U2. Pagarsari dikelola oleh Sekretaris BUMDes dengan kualifikasi pendidikan Sarjana Strata 1 Jurusan Agroteknologi, Ketua dan pengelola BUMDes yang lain masih setingkat SMA dan SMP. Sedangkan Desa U1. Pagarsari Pendidikan formal pengelola BUMDes 1 orang berpendidikan S1 dan yang lainnya setingkat SMA.

Demikian juga kondisi sumber daya manusia yang dimiliki BUMDes Desa T1. Bangunsari, Pengurus BUMDes. Pengurus BUMDes berpendidikan SLTA dan SMP. Bendahara BUMDes berpendidikan Sarjana Strata 1 Jurusan Pendidikan Konsling. Pendidikan informal yaitu Pelatihan Pengelolaan BUMDes angkatan ke XXVI yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penguasaan dan latihan Masyarakat, pelatihan bertempat di Desa T2. Purwosari Kecamatan. Purwodadi Kabupaten Musi Rawas”, (wawancara tanggal 29 Agustus 2014).

Dari hasil penelitian desa T2. Purwakarya, pendidikan formal dan informal yang diikuti pengurus BUMDes yang didanai dari hasil usaha BUMDes, menjelaskan: “Masih dalam lingkup pengembangan usaha, belum ada mengenai pendidikan formal lanjutan. Studi banding ke desa batu malang tentang pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya Desa U2. Karyadadi, mengemukakan bahwa Sekretaris BUMDes dengan kualifikasi pendidikan Sarjana Strata 1 Jurusan Agroteknologi, Ketua dan pengelola BUMDes berpendidikan S.2, pengurus lain masih setingkat SMA dan SMP.

Untuk pendidikan informal Yang dilaksanakan Oleh BUMDes baru berupa Pelatihan Pengelolaan BUMDes angkatan ke XXVI tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penguasaan dan latihan Masyarakat yang bertempat di Desa T2. Purwosari Kecamatan. Purwodadi Kabupaten Musi Rawas. Peserta pelatihan tersebut adalah

Perangkat Desa dan pengelola BUMDES Desa T2. Purwosari, Desa T1. Bangun Sari, dan Desa U2. Karyadadi. Sedangkan pendidikan informal Pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar BUMDes baru berupa Pelatihan yang diikuti oleh pengelola BUMDes, Pelatihan/Rapat koordinasi pengelolaan/penggunaan dana desa di Palembang tahun 2016,2018 dan di Malang Tahun 2017. Selain itu terdapat pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan pengurus BUMDes di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas mengikuti pelatihan/Bimtek, yang diikuti oleh Perangkat Desa dan Pengelola BUMDes mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BPMPD Kabupaten Musi Rawas. Pelatihan/Bimtek tentang BUMDES bertempat di Koperasi RIAS. Semua perangkat Desa dan pengurus BUMDes ikutserta dalam Bimtek tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, pengelola BUMDes telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain. Dari tahun 2016 sampai dengan 2018, Perangkat Desa dan pengelola BUMDes telah mengikuti pelatihan yang berlokasi di Kabupaten Musi Rawas, Kota Palembang, Kota Malang. Kesimpulan sementara bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan formal dan informal pengelola BUMDes di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes di Kecamatan Purwodadi untuk pendidikan formal sudah memiliki sarjana Strata 1 (satu) dan Strata 2 (dua), Setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun belum dapat memenuhi kualifikasi dasar pendidikan formal yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes, sesuai dengan Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (2007:25) yang menyatakan Bagi pemegang jabatan Bagian Keuangan, Bendahara dan Sekretaris diutamakan

berasal dari sekolah kejuruan (SMK/SMEA) atau D III bidang akuntansi dan sekretaris agar mereka mampu menyusun laporan aktivitas BUMDes yang berkaitan dengan pekerjaannya. Untuk itu perlu adanya rekrutmen Sumberdaya manusia yang sesuai dengan kualifikasi BUMDes mulai dari perencanaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang menggambarkan proses peramalan sampai dengan penempatan SDM.

Hal diatas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Gerge Milkovich dan Paul C. Nystrom (Suwatno.H dan Priansa Donni Juni 2011:45) yang menyatakan bahwa perencanaan SDM merupakan proses Peramalan, pengembangan pengimplementasian dan pengontrolan yang menjamin kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai yang benar, waktu yang tepat, dan dapat bermanfaat. Selanjutnya perencanaan SDM merupakan proses manajemen dalam menentukan pergerakan SDM dari posisi saat ini sampai dengan posisi yang diinginkan di masa depan. Schuler dan Walker (Suwatno.H dan Priansa Donni Juni 2011:45).

Dari pendapat diatas maka BUMDes di kecamatan Purwodadi perlu untuk melaksanakan perencanaan, untuk menghasilkan rencana strategis SDM dimasa yang akan datang agar SDM yang ada sesuai dengan Kualifikasi pendidikan formal SDM yang dibutuhkan oleh BUMDes di Kecamatan Purwodadi. Ada keuntungan dari perencanaan ini yaitu dengan perencanaan tujuan jadi jelas, terarah, berdayaguna, dapat gambaran yang utuh, memperkecil risiko, landasan pengendalian, dan pekerjaan tergambar dengan jelas dan lengkap. Hal ini sesuai dengan pendapat Purwanto Iwan (2012:51) yang menyatakan bahwa :

1. Dengan perencanaan tujuan jelas, obyektif dan rasional.
2. Perencanaan menyebabkan semua aktivitas terarah, teratur dan ekonomis.

3. Perencanaan akan meningkatkan pendayagunaan semua fasilitas yang dimiliki.
4. Perencanaan dapat menggambarkan keseluruhan organisasi/perusahaan.
5. Perencanaan dapat memperkecil risiko organisasi/perusahaan.
6. Perencanaan memberikan landasan untuk pengendalian.
7. Perencanaan memberikan gambaran seluruh pekerjaan dengan jelas dan lengkap.

Proses perencanaan sampai dengan terbitnya rencana strategis adalah untuk mengatasi ketidakmampuan pengelola BUMDes memberikan berkontribusi positif terhadap tatakelola BUMDes untuk meningkatkan pendapatan asli desa, memajukan prekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan pengelolaan aset-aset desa yang ada.

Untuk pendidikan informal dari hasil penelitian, Yang dilaksanakan Oleh BUMDes baru berupa Pelatihan Pengelolaan BUMDes angkatan ke XXVI tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penguambangan dan latihan Masyarakat yang bertempat di Desa T2. Purwosari Kecamatan. Purwodadi Kabupaten Musi Rawas. Peserta pelatihan tersebut adalah Perangkat Desa dan pengelola BUMDES Desa T2. Purwosari, Desa T1. Bangun Sari, dan Desa U2. Karyadadi. Sedangkan perndidikan informal Pelatihan yang dilaksakan oleh pihak-pihak di luar BUMDes baru berupa Pelatihan yang diikuti oleh pengelola BUMDes, Pelatihan/Rapat Koordinasi pengelolaan/penggunaan dana desa di Palembang tahun 2016,2018 dan di malang Tahun 2017. Selain itu terdapat pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan perngurus BUMDes di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas mengikuti pelatihan/Bimtek, yang diikuti oleh Perangkat Desa dan Pengelola BUMDes mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BPMPD Kabupaten

Musi Rawas. Pelatihan/Bimtek tentang BUMDES bertempat di Koperasi RIAS. Semua perangkat Desa dan pengurus BUMDes ikutserta dalam Bimtek tersebut.

Hasil penelitian diatas menunjukkan pelatihan masih bersifat dadakan, dalam arti belum terencana sehingga belum dapat memberikan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan keahlian pengelolaan BUMDes di Kecamatan Purwodadi. Dan pelatihan pengelola BUMDes di Kecamatan Purwodadi baru pelatihan yang menggunakan metode *External training* dan belum melakukan *in-house training*. Suwatno.H dan Priansa Donni Juni (2011:118-119) menegaskan bahwa pelatihan dapat dilaksanakan dengan *in-house training* (IHT) berupa kegiatan *on the job training* (OJT) berupa seminar, lokakarya, pelatihan internal perusahaan, dan pelatihan berbasis komputer yang bersumber dari dalam perusahaan. Sedangkan pelatihan *External training* terdiri dari kursus-kursus, seminar, dan lokakarya yang dilaksanakan oleh asosiasi profesional, lembaga pendidikan, *trainer* profesional yang dilakukan oleh pihak lain di luar perusahaan.

Pelatian yang dilaksanakan oleh BUMDes se Kecamatan Purwodadi belum dapat mengembangkan kemampuan pengelola BUMDes, karena belum ada prosedur yang jelas, sistematis dan terorganisasi sehingga belum dapat meningkatkan kemapuan teknis, teoritis, konseptual, dan maral yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan BUMDes. Hal ini sesuai pendapat Andrew F. Sikula (Hasibuan Malayu S,P 2012:70) Pengembangan mengacu pada masalah staf dan personel adalah suatu proses pembelajaran jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisasi dengan mana menejer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Dan Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai

dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. Hasibuan Malayu S,P (2012:68).

Pengembangan pegawai merupakan aktivitas memelihara dan meningkatkan kompetensi pegawai guna mencapai efektivitas organisasi. Pengembangan pegawai dapat terwujud melalui melalui pengembangan karier, pendidikan, dan pelatihan. Pengembangan SDM ini baik dilakukan karena adanya perubahan baik manusia, teknologi, pekerjaan maupun organisasi. Pengembangan pegawai merupakan aktivitas memelihara dan meningkatkan kompetensi pegawai guna mencapai efektivitas organisasi. Selanjutnya diperjelas oleh Menurut Plippo bahwa Pengembangan merupakan suatu proses dari :

1. Pelatihan untuk meningkatkan keahlian serta pengetahuan untuk melakukan pekerjaan tertentu.
2. Pendidikan yang berkaitan dengan perluasan pengetahuan umum, dan latar

belakang. Ada dua kelompok besar yang harus dilatih yaitu tenaga operasional, dan para menejer. Operasional training dapat dilakukan dengan cara *job training*, *apprenticeship*, dengan tujuan agar dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, mempertinggi moral, dan mempromosikan stabilitas dan fleksibilitas dari organisasi. Pengembangan menejer dapat dilakukan dengan cara pembangunan *decision skill*, dan *job knowledge*.

Baik pendidikan formal maupun pendidikan informal, unit dan usaha senada, saling berkaitan dan saling ketergantungan dan tergarbar dalam rencana strategi muali dari Visi organisasi yang merupakan wawasan luas ke masa depan dari manajemen dan merupakan kondisi edial yang hendak dicapai oleh organisasi/perusahaan dimasa yang akan datang. Purwanto Iwan (2012:81). Selanjutnya perencanaan strategik dapat di lihat pada bagan berikut:



Sumber : di olah dari Manajemen Pemasaran Daryanto (2013:17)

Bagan diatas dapat dijelaskan tahapan-tahapan perencanaan strategis sapaai dengan terbitnya rencana strategis yang dapat dijadikan pedoman agar pengelolaan BUMDes jadi Optimal adalah:

1. Visi adalah cara pandang BUMDes jauh ke depan, kemana BUMDes harus dibawa agar bisa eksis.

2. Misi menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh BUMDes hingga berhasil.
3. Menetapkan sasaran berupa hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan tujuan merupakan hasil yang ingin di capai dalam jangka panjang.
4. Merancang portofolio/investasi bisnis BUMDes, dimana portofolio yang baik adalah portofolia yang paling cocok

dengan kekuatan dan kelemahan BUMDes terhadap peluang dalam lingkungannya. Dengan demikian harus menganalisis portofolia usaha BUMDes saat ini dan memutuskan mana yang harus menerima investasi lebih banyak, lebih sedikit atau tidak menerima investasi. Dan mengembangkan strategi pertumbuhan BUMDes untuk menambah produk baru pada portofolio.

3.2 Peranan Pemerintah Desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa

Sebelum membahas peranan Pemerintah desa agar tatakelola BUMDes bisa optimal maka perlu didefinisikan terlebih dahulu yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Desa).

Dari pengertian diatas maka dapat diketahui bahwa kepentingan masyarakat setempat didasari oleh prakarsa masyarakat. Untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan syarat pembentukan BUMDes menurut pasal 6 Perda No. 10 tahun 2013 tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes yaitu:

- a. Atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- b. Adanya potensi usaha ekonomi warga desa;
- c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
- g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan di desa-desa kecamatan Purwodadi diketahui bahwa peranan pemerintah desa terhadap BUMDes sebagai peranan di bidang regulator untuk merealisasikan tujuan dari didirikannya BUMDes berupa pembuatan peraturan desa tentang BUMDes, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Desa sebagai acuan dasar kepada masyarakat dan sebagai instrumen untuk mengatur segala pelaksanaan kegiatan BUMDes

Dari syarat pembentukan BUMDes di atas maka dapat diketahui bahwa BUMDes perlu adanya inisiatif, adanya potensi, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Desa, tersedianya sumberdaya desa dan sumber daya manusia yang bisa dikelola dan bisa mengelolanya, dan adanya unit usaha masyarakat desa yang belum maju dan terakomodasi agar pendapatan masyarakat, pendapatan asli desa dapat meningkat. Karena BUMDes ini memerlukan partisipasi masyarakat maka perlu adanya peranan dari pemerintah desa beserta unsur pemerintahan lainnya untuk melakukan upaya pelebagaan BUMDes, agar masing-masing unsur dalam masyarakat desa memahami dan mengerti akan pentingnya BUMDes

Dari uraian diatas maka diperlukan peranan pemerintah Desa sebagai dinamisator melalui usaha-usaha bagaimana agar BUMDes tersebut bisa

Melembaga dalam masyarakat Desa dan bisa benar-benar menyentuh denyut nadi usaha ekonomi Desa dan tumbuhnya demokratisasi Desa. Dari hasil penelitian belum dilakukan oleh pemerintah Desa, baik melibatkan unsur pemerintahan Desa maupun melibatkan lembaga lain seperti BPD, LSM dan Perguruan Tinggi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan dalam buku 7 badan usaha milik desa: spirit usaha kolektif desa kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia yang menerangkan bahwa :

“Pertama, *sosialisasi tentang BUM Desa*. Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)⁶ baik secara langsung maupun bekerjasama dengan (i) Pendamping Desa yang berkedudukan di kecamatan, (ii) Pendamping Teknis yang berkedudukan di kabupaten, dan (ii) Pendamping Pihak Ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan). Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan kelembagaan Desa memahami tentang apa BUM Desa, tujuan pendirian BUM Desa, manfaat pendirian BUMDesa dan lain sebagainya. Keseluruhan para Pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUM Desa akan memberikan manfaat kepada Desa. Kedua, pelaksanaan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa”.

Proses pelembagaan BUMDes tentu harus melibatkan unsur pemerintahan desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, pendamping desa, dan dari pihak ketiga seperti LSM, Perguruan

Tinggi Organisasi kemasyarakatan dan dari pihak perusahaan. Tidak lanjut dari sosialisasi ini dapat memuat pembelajaran bagi BUMDes sebagai pedoman untuk menyusun suatu rencana yang sinergis antara Pemerintah Desa dengan BPD. Diakui bahwa dilokasi penelitian sudah ada peranan pemerintah desa berupa penerbitan Perdes tentang BUMDes dan AD dan ART BUMDes, namun untuk sosialisasi yang melibatkan semua unsur Pemerintahan Desa, pihak ketiga seperti LSM, Perguruan Tinggi Organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Purwodadi belum dilaksanakan. Kedepan meskipun BUMDes sudah berdiri, tidak ada kata terlambat masih perlu untuk dilakukan sosialisasi, bila perlu dilakukan secara terjadwal dan berkala sampai dengan terbentuknya rencana strategis BUMDes yang dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah Desa, unsur Pemerintahan Desa, masyarakat dan pengelola BUMdes. Diharapkan akan timbul sinkronisasi antara usaha BUMdes dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tentang BUMDes, isi RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan dalam buku 7 BUMDes yang mengemukakan bahwa dalam aras teknokratik peraturan Bupati maupun Perdes tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa yang memuat BUMDes tersebut harus sinkron dengan isi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Des tersebut harus sinkron dengan isi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa yang mencantumkan rencana kegiatan ekonomi produktif. (Buku 7 badan usaha milik desa: spirit usaha kolektif desa kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia 2015 : 28)

Diharapkan penelitian ini dapat mengguga peranan pemerintah Desa sebagai dinamisor untuk melaksanakan peranannya, agar tercipta harmonisasi antara pemerintah Desa, pengelola BUMDes dan masyarakat. Hal ini sesuai

dengan falsafah “*helping people to help them-selves*” dari Ellerman (Mardikanto Totak dan Soebiato Poerwoko 2017:102) yang mencatat adanya 8 (delapan) peneliti yang menelusuri teori pemberian bantuan diantaranya terdapat adanya hubungan agen pembangunan dan lembaga lokal (E.F. schumacher) yaitu melalui program bantuan untuk mencermati apa yang dilakukan seseorang maupun masyarakat yang membantu agar mereka dapat melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Hal ini di Indonesia sesuai dengan falsafah pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro yang berbunyi:

1. *Ing Ngarso sung tulodo*, yang bermakna mampu memberikan contoh dan teladan bagi masyarakat sasarnya (berada di depan)
2. *Ing madyo mangun karso* yaitu mampu menumbuhkan inisiatif dan mendorong kreativitas, semangat dan motivasi untuk selalu belajar dan mencoba (berada di tengah)
3. *Tut Wuri Handayani* yaitu mau menghargai dan mengikuti keinginan-keinginan serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, sepanjang tidak menyimpang/meninggalkan acuan yang ada, demi tercapainya tujuan perbaikan kesejahteraan hidupnya (berada dibelakang).

Hal ini tidak bisa terlepas dari adanya partisipasi dari semua elemen masyarakat sebagai pondasi yang kuat untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya BUMDes. Faktor-faktor yang mendukung berkembangnya partisipasi masyarakat menuntut beberapa pendekatan disiplin ilmu menurut Slamet (Mardikanto Totak dan Soebiato Poerwoko 2017:93) mengemukakan bahwa:

“Dalam konsep psikologi, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, sangat dipengaruhi oleh motivasi yang melatarbelakanginya. Secara sosiologi, sikap merupakan fungsi dari kepentingan, dengan demikian tumbuh dan

berkembangnya partisipasi dalam masyarakat, akan sangat ditentukan oleh persepsi masyarakat terhadap tingkat kepentingan dan pesan-pesan yang disampaikan kepadanya. Dan menuntut konsep pendidikan, partisipasi merupakan tanggapan atau respon yang diberikan terhadap sikap rangsangan atau stimulus yang diberikan yang dalam hal ini respon merupakan fungsi dari manfaat atau *reward* yang dapat diharapkan. Besarnya harapan dalam konsep ekonomi sangat ditentukan oleh besarnya peluang atau harga dari manfaat yang akan diperoleh. Manfaat tersebut bisa dibedakan antara ekonomi dan non ekonomi dalam arti kekuasaan, kebersamaan dan prestasi”.

Untuk peranan sebagai fasilitator, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa dapat memberikan perannya berupa memfasilitasi pengurusan akte Notaris/Badan hukum terhadap 2 (dua) BUMDes yaitu Desa T2 Purwakarya, T1 Bangun Sari. Dan tela memfasilitasi BUMDes berupa bimbingan dan saran kepada pengelola BUMDes untuk pengembangan usaha/rencana tahun 2018 seperti Usaha Wisata Kreasi, Kolam Renang, Musik, Sarana Permainan Anak, dan Bendungan untuk Lomba Dayung. Pemerintah Desa telah melakukan pendampingan administrasi BUMDes dibidang pengembangan usaha. Penyediaan sarana dan prasarana BUMDes seperti aset warga/lahan 2 Hektar dikelola oleh Karang Taruna untuk Wisata Kreasi dan Wisata Lomba Dayung. Dan untuk Desa T2 Purwakarya baru berupa penyediaan sarana dan prasarana pendirian Embung Desa dan pemberian 1 (satu) unit mobil untuk operasional BUMDes dari bantuan dinas perhubungan Kabupaten Musi Rawas.

Menurut Muhadam Labolo (2010:32) peranan Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam

mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta bidang pendanaan/permodalan melalui pemberian bantuan modal, kepada masyarakat. Dari hasil penelitian dapat dilihat peranan Pemerintah Desa berupa pemberian modal BUMDes yang bersumber dari dana Desa. Dan untuk pendidikan dan pelatihan belum tampak peranan Pemerintah Desa karena pelatihan yang terlaksana merupakan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Untuk itu perlu adanya peranan pemerintah Desa dan bekerjasama dengan penyuluh/fasilitator Desa atau pendamping Desa untuk dapat melihat dan menetapkan menurut Mardikanto Totak dan Soebiato Poerwoko (2017:186) yang menyatakan:

1. Peluang bantuan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat penerima manfaatnya.
2. Memilih peluang bantuan yang paling tepat (mudah, murah, dan benar-benar bermanfaat).
3. Sumberdaya yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.

Dari uraian diatas maka perlu adanya pemetaan dan pengenalan wilayah dari pemerintah Desa untuk menentukan peluang yang tepat, bantuan yang paling tepat, dan sumberdaya yang dapat bermanfaat untuk mendukung kegiatan BUMDes yang terencana. Dan luaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sistem tatakelola BUMDes yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat desa. Sistem tatakelola adalah dukungan sumber daya manusia pengurus BUMDES serta peranan Pemerintah Desa dalam memberikan bimbingan, saran, dan pemberian sarana dan prasarana BUMDes.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes telah berdiri tetapi belum memberikan peluang kerja bagi masyarakat desa. Penerimaan hasil usaha BUMDes belum memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas. Aspek pengelolaan sumber daya manusia, Ketua dan Sekretaris BUMDes lebih dominan berpendidikan SMP/SLTA, pendidkan S.1 Sebanyak 3 orang, dan pendidkan S2 sebanyak 1 orang. Kepala Desa dan Sekretaris desa lebih dominan berpendidikan SLTA, terdapat 1 orang sekretaris Desa berpendidikan S.1. masih minimnya pendidkan informal yang diikuti oleh perangkat desa dan pengelola BUMDes. Aspek peranan pemerintah desa dalam mengelola BUMDes, Perangkat Desa telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BPMPD Kabupaten Musi Rawas, Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat, dan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain.

Dalam rangka menyumbangkan pemikiran yang berkenaan dengan optimalisasi tatakelola Badan Usaha Milik Desa, maka perlu disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola BUMDes mulai dari rekrutmen sampai dengan pengembangan SDM.
2. Pengelola BUMDes perlu mengangkat tenaga profesional yang mengerti tentang tatakelola BUMDes, dan yang bersifat independen, bisa mengatasi tekanan dari pihak manapun, dan dapat menjamin transparansi, akuntabel, rasional, dapat dipercaya, dan dapat melayani kebutuhan masyarakat Desa dengan baik dan adil.
3. Peningkatan pendidikan formal sesuai dengan kompetensi pengelola BUMDes. Peningkatan pendidikan informal yang

dapat meningkatkan kontribusi positif terhadap BUMDes.

4. Pemerintah Desa:

- a. Peranan sebagai regulator Pemerintah Desa membuat mekanisme pelaporan kegiatan BUMDes kepada Pemerintah Desa.
- b. Peranan sebagai dinamisator, melakukan pelembagaan BUMDes agar masyarakat Desa dapat benar-benar memiliki dan memahami tujuan dari dibentuknya BUMDes, dengan melibatkan unsur pemerintahan Desa, melibatkan lembaga lain seperti ORMAS, LSM dan Perguruan Tinggi.
- c. Peranan sebagai fasilitator Pemerintah Desa bersama unsur Pemerintahan Desa dan Pengelola Badan Usaha Milik Desa merumuskan Rencana Strategis Tatakelola BUMDes. Rencana pengembangan usaha yang dikelola oleh masing-masing Unit Usaha yang telah ada. Menyusun rencana pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola BUMDes. Rencana Strategis yang disusun dengan jangka waktu 5 tahun, ditetapkan oleh Ketua/Direktur BUMDes selanjutnya di setujui oleh Kepala Desa selaku Komisaris BUMDes. Dan memfasilitasi usaha menjalin kerjasama dengan pihak ketiga serta penyertan/bantuan asset untuk operasional BUMDes. Mengusulkan Forum Koordinasi antar BUMDes tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku 7 (2015) *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa* Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Jakarta.

Creswell, John W. (2010). Edisi ke-1. *Research Design Pendekatan*

Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Yogyakarta.

Daryanto (2013) *Sari Kuliah Manajemen Pemasaran*, Satu Nusa. Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp) *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 2007.

e-Journal El-Reyasa Volume 5, No.1 Tahun 2014.

e-Journal Politik Muda Volume 4, No.1 Januari-Maret Tahun 2015.

e-Journal ACADEMICA Fisip Untad Volume 3, No.02 Oktober 2011.

Harbani, P. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Alfabeta, CV. Bandung.

Labolo, M (2010) *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan pengembangannya*, Rajawali Pers. Jakarta.

Hasibuan, M (2011) *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Bumi Aksara, PT. Jakarta.

Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, PT. Bandung.

Purwanto I, (2012) *Manajemen Strategi Yrama Widya*, Bandung.

Sedarmayanti, (2013) *Manajemen Sumberdaya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil* Refika Aditama, PT. Bandung

Soerjono, S (2012) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Persada. Jakarta

Sugiono, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, CV. Bandung.

Suwatno dan Priansa. (2011) *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis* Alfabeta, CV. Bandung.

Mardikanto T dan Soebiato P. (2017) *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* Alfabeta, CV. Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan,
dan pembubaran Badan Usaha Milik
Desa.
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Nomor 10 Tahun 2013 Tentang
Badan Usaha Milik Desa.

PENYELESAIAN SENGKETA PENGANGKUTAN LAUT

R. Juli Moertiono
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
moertionojuli@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum dalam pengangkutan laut dan bagaimana penyelesaian sengketa pengangkutan laut. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai fondasi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian ditengah lapangan. Adapun hal yang akan diteliti yaitu untuk mendeskripsikan hubungan hukum dalam pengangkutan laut dan penyelesaian sengketa pengangkutan laut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan cara observasi, studi literatur dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Temuan/hasil penelitian (1) hubungan hukum dalam pengangkutan laut adalah hubungan hukum perikatan yang didasarkan prinsip timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. (2) penyelesaian sengketa pengangkutan laut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu non-litigasi (perdamaian) dan litigasi (jalur hukum). Penggunaan model penyelesaian sengketa non litigasi lebih mengutamakan pendekatan "konsensus" dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah win-win solution dengan mengedepankan prinsip keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan komutatif. Sedangkan penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang membutuhkan pengetahuan tentang tata cara dan/atau aturan yang berlaku bagi penyelesaian sengketa tersebut yaitu berupa aturan-aturan hukum yang bersifat prosedural.

Kata kunci: penyelesaian, sengketa, pengangkutan laut.

Abstract

This study aims to determine the legal relationship in sea transportation and how to resolve sea transportation disputes. This research approach uses literature study by theoretical references that are relevant to cases or problems found. Theoretical references obtained by means of literature study are used as the basic foundation and the main tools for research practice in the middle of the field. This study aims to describe the legal relationship in sea transportation and settlement of sea freight disputes. The research methodology used is by observation, literature study and documentation study. Data analysis method used with descriptive analysis method. Descriptive analysis method is done by describing the facts which are then followed by analysis, not merely describing, but also providing sufficient understanding and explanation. Research findings (1) the legal relationship in sea transportation is a legal relationship of the relationship based on the principle of reciprocity between the carrier and the sender, where the carrier binds himself to carry out the transportation of goods and / or people safely from place to place, while the sender tie yourself to pay for transportation. sea freight dispute resolution can be done in two ways, namely non-litigation (peace) and litigation (legal channels). The use of non-litigation dispute resolution models prioritizes a "consensus" approach and seeks to reconcile the interests of the parties to the dispute and aims to get the results of dispute resolution towards

a win-win solution by putting the principle of justice to be achieved is commutative justice. Whereas the settlement through an authorized institution or agency requires knowledge of the procedures and / or rules that apply to the settlement of the dispute, namely in the form of procedural legal rules.

Keywords: *settlement, dispute, sea freight.*

1. PENDAHULUAN

Pengangkutan atau sistem transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan lalu lintas perjalanan sehingga pengangkutan tersebut dijadikan sebagai suatu kebutuhan bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Seiring dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, di bidang teknologi, serta dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi ini juga mulai meningkat. Negara Indonesia merupakan negara Kepulauan yang di dalamnya terdapat berbagai macam daerah pariwisata sehingga banyak para wisatawan yang tertarik untuk datang menikmati daerah wisata tersebut. Mengingat hal tersebut sarana transportasi sangat diperlukan oleh masyarakat yang ingin berkunjung ke suatu tempat dalam hal ini dari satu pulau ke pulau lain, sehingga kini banyak terdapat penyedia jasa angkutan khususnya angkutan kapal laut. sarana pengangkutan sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Hal tersebut mengingat bahwa sering kali aktifitas terjadi di sentra-sentra tertentu.

Hal yang sangat mendasar dalam pengangkutan adalah adanya pengangkut dan penumpang atau pengguna jasa angkutan. Antara pengangkut dan penumpang terdapat hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan di sini adalah persetujuan dimana pengangkut

mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan selalu diadakan secara lisan, tetapi didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi dan mengikat.

Pengangkutan sebagai perjanjian merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, ini terkandung dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur-unsur yaitu adanya perbuatan, dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya.

Dalam lingkup pengangkutan laut secara umum tentunya bertalian erat dengan tanggung jawab hukum sipengangkut terhadap keamanan dan keselamatan angkutannya baik orang maupun barang. Sebab hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya ada permasalahan dari pihak penumpang terhadap kerugian

yang ditimbulkan akibat pengoperasian kapal. Seperti misalnya kasus tentang kecelakaan kapal yang mengakibatkan cedera hingga kematian penumpang, hilang atau rusaknya barang bawaan penumpang, maka dari itu perusahaan pengangkutan di perairan bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami penumpang yaitu keselamatan barang dan penumpang berupa kematian atau lukanya penumpang akibat pengoperasian kapal.

Problematika hukum dalam pengangkutan laut kerap memunculkan sengketa antara pihak pengangkut dengan pengguna jasa angkutan. Berdasarkan uraian ini, maka penting diulas ke dalam sebuah tulisan yang mengangkat tema tentang penyelesaian sengketa pengangkutan laut dengan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana hubungan hukum dalam pengangkutan laut?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa pengangkutan laut?

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah – masalah penelitian. Adapun masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui “Penyelesaian Sengketa Pengangkutan Laut”.

Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah

mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti.

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; bukubuku teks, jurnal ilmiah,refrensi statistik,hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi,dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

2.2 Teknik Analisa

Data Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi (Content Analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pasal 7 UU No 17

tahun 2008 tentang Pelayaran, jenis angkutan laut terdiri atas: Angkutan Laut Dalam Negeri, Angkutan Laut Luar Negeri, Angkutan Laut Khusus, dan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat.

1) Angkutan Laut Dalam Negeri

Adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional atau dalam arti dilakukan dengan menggunakan batas-batas kedaulatan dalam negara. Pelayaran dalam negeri yang meliputi:

(a) Pelayaran Nusantara, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia tanpa memandang jurusan yang ditempuh satu dan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Radius pelayarannya > 200 mil laut.

Pelayaran Lokal, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia yang ditujukan untuk menunjang kegiatan pelayaran nusantara dan pelayaran luar negeri dengan mempergunakan kapal-kapal yang berukuran 500 m³ isi kotor ke bawah atau sama dengan 175 BRT ke bawah. Radius pelayarannya < 200 mil laut atau sama dengan 200 mil laut.

(b) Pelayaran Rakyat, yaitu pelayaran Nusantara dengan menggunakan perahu-perahu layar.

2) Angkutan Laut Luar Negeri

Adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke

pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut atau dalam artian dilakukan dengan pengangkutan di lautan bebas yang menghubungkan satu negara dengan negara lain. Pelayaran luar negeri, yang meliputi:

(a) Pelayaran Samudera Dekat, yaitu pelayaran ke pelabuhan- pelabuhan negara tetangga yang tidak melebihi jarak 3.000 mil laut dari pelabuhan terluar Indonesia, tanpa memandang jurusan;

(b) Pelayaran Samudera, yaitu pelayaran ke- dan dari luar negeri yang bukan merupakan pelayaran samudera dekat.

3) Angkutan Laut Khusus

Adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.

4) Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

Menurut sistem hukum Indonesia, perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan, asal ada persesuaian kehendak (konsensus). Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa untuk adanya suatu perjanjian pengangkutan cukup dengan adanya kesepakatan (konsensus) diantara para pihak, hal ini sebagaimana yang telah diatur

dalam ketentuan Pasal 90 KUHD yang menyatakan :

Surat angkutan merupakan persetujuan antara si pengirim atau ekspediter pada pihak satu dan pengangkut atau juragan perahu pada pihak lain dan surat itu memuat selain apa yang kiranya telah disetujui oleh kedua belah pihak, seperti misalnya mengenai waktu dalam mana pengangkutan telah harus selesai dikerjakannya dan mengenai penggantian rugi dalam hal kelambatan, memuat juga :

- 1o. Nama dan berat atau ukuran barang-barang yang diangkut, begitupun merek-merek dan bilangannya;
- 2o. Nama orang kepada siapa barang-barang dikirimkannya;
- 3o. Nama dan tempat si pengangkut atau juragan perahu;
- 4o. Jumlah upah pengangkut;
- 5o. Tanggal;
- 6o. Tanda tangan si pengirim atau ekspediter.

Dalam Pasal 90 KUHD ditentukan bahwa dokumen/surat angkutan merupakan perjanjian antara pengirim atau ekspediter dan pengangkut atau nakhoda. Sebetulnya tanpa dokumen/surat angkutan, apabila tercapai persetujuan kehendak antara kedua belah pihak perjanjian telah ada, sehingga dokumen/surat angkutan hanya merupakan surat bukti belaka mengenai perjanjian angkutan. Dokumen/surat angkutan dinyatakan telah mengikat bukan hanya ketika dokumen/surat angkutan tersebut telah ditandatangani pengirim atau ekspediter, melainkan juga ketika pengangkut/nakhoda telah menerima barang angkutan beserta dokumen/surat angkutan tersebut.

Mengenai sifat hukum

perjanjian pengangkutan terdapat beberapa pendapat, yaitu :

- 1) Pelayanan berkala artinya hubungan kerja antara pengirim dan pengangkut tidak bersifat tetap, hanya kadang kala saja bila pengirim membutuhkan pengangkutan (tidak terus menerus), berdasarkan atas ketentuan pasal 1601 KUH Perdata.
- 2) Pemborongan sifat hukum perjanjian pengangkutan bukan pelayanan berkala tetapi pemborongan sebagaimana dimaksud pasal 1601 b KUH Perdata. Pendapat ini didasarkan atas ketentuan Pasal 1617 KUH Perdata (Pasal penutup dari bab VII A tentang pekerjaan pemborongan).
- 3) Campuran perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran yakni perjanjian melakukan pekerjaan (pelayanan berkala) dan perjanjian penyimpanan (*bewaargeving*). Unsur pelayanan berkala (Pasal 1601 b KUH Perdata) dan unsur penyimpanan (Pasal 468 (1) KUHD).

Selain itu syarat sahnya perjanjian pengangkutan pada pengangkutan barang maupun orang antara pengangkut dengan pemakai jasa pengangkutan sama halnya dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu;

- 1) Adanya kesepakatan antara para pihak.
 - 2) Adanya kecakapan untuk membuat sebuah perjanjian.
 - 3) Suatu hal tertentu.
 - 4) Suatu sebab yang halal
1. Penyelesaian Sengketa Pengangkutan Laut

a. Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut dalam Angkutan Laut

Menurut Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat KUHPerdata, tanggung jawab hukum kepada orang yang menderita kerugian tidak hanya terbatas kepada perbuatan sendiri, melainkan juga perbuatan, karyawan, pegawai, agen, perwakilannya apabila menimbulkan kerugian kepada orang lain, sepanjang orang tersebut bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada orang tersebut.

Tanggung jawab perusahaan pengangkutan dalam angkutan laut terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan yang telah disepakati. Demikian juga halnya dengan tanggung jawab terhadap pemilik barang (pengirim) dimulai sejak barang diterima untuk diangkut sampai diserahkan barang kepada pengirim atau penerima. Yang dimana tanggung jawab tersebut dikarenakan yelah terjadinya kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan/atau harta benda.

Tanggung jawab perusahaan pengangkutan dalam angkutan laut terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan yang telah disepakati. Demikian juga halnya dengan tanggung jawab terhadap pemilik barang (pengirim) dimulai sejak barang diterima untuk diangkut sampai diserahkan barang kepada pengirim atau penerima. Yang dimana tanggung jawab tersebut dikarenakan yelah terjadinya kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat

menimbulkan korban manusia dan/atau harta benda.

Terdapat beberapa prinsip tanggung jawab pengangkut dalam angkutan laut, yaitu;

- 1) Tanggung Jawab Praduga Bersalah (*Presumption of Liability*);
- 2) Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan (*Based on Fault or Negligence*);
- 3) Tanggung Jawab Pengangkut Mutlak (*Absolut Liability*);
- 4) Pembatasan Tanggung Jawab Pengangkut (*Limitation of Liability*);
- 5) *Presumption of Non Liability*;

b. Lingkup Sengketa Pengangkutan Laut

Sengketa merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan lagi jika manusia saling berselisih atau ada perbedaan kesepahaman dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Soeryono Soekanto, sengketa dapat juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar. Dalam prespektif hukum, sengketa dapat berawal dari adanya suatu wanprestasi dari salah satu pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum.

Lahirnya suatu tanggung jawab hukum berawal dari adanya perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Menurut ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata hak dan kewajiban (perikatan) bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang terbagi lagi menjadi perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum, sedangkan timbulnya perikatan yang lahir karena perjanjian membebaskan kepada para pihak yang melakukan perjanjian untuk

melaksanakan hak dan kewajiban atau yang dikenal dengan "prestasi", apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Lingkup wanprestasi dalam konteks pengangkutan laut dijabarkan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Pelayaran yang menyatakan bahwa; "Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya." kemudian dalam Pasal 41 ayat (1) UU Pelayaran menyatakan;

Perusahaan pengangkutan perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dalam pengoperasian kapal berupa :

- a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
- b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
- c. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
- d. kerugian pihak ketiga.

Menurut PNH Simanjuntak wan prestasi adalah keadaan di mana seorang debitur (pihak yang berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur sendiri itu sendiri dan karena faktor adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*). Adapun yang menjadi kriteria seorang debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila :

- a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;

- c) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya dan
- d) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak diwajibkan dalam perjanjian.

Pada umumnya, wanprestasi akan terjadi jika salah satu pihak dinyatakan telah lalai memenuhi prestasi atau dengan kata lain wanprestasi ada kalau salah satu pihak tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak tentu saja dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lainnya.

c. Bentuk Penyelesaian Sengketa Laut

Perselisihan hukum atau sengketa dalam suatu hubungan hukum pada umumnya dapat diselesaikan melalui dua cara penyelesaian, yaitu:

1. Penyelesaian secara damai (non litigasi),
2. Penyelesaian melalui lembaga atau institusi yang berwenang (litigasi).

Kedua jenis penyelesaian sengketa di atas juga dapat diterapkan dalam pengangkutan laut. Namun, kedua jenis penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Penyelesaian sengketa secara damai, membutuhkan kemauan dan kemampuan berunding untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai. Penggunaan model penyelesaian sengketa non litigasi lebih mengutamakan pendekatan "konsensus" dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah *win-win solution*. Keadilan yang ingin dicapai melalui mekanisme tersebut adalah keadilan komutatif. Sedangkan penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang membutuhkan

pengetahuan tentang tata cara dan/atau aturan yang berlaku bagi penyelesaian sengketa tersebut yaitu berupa aturan-aturan hukum yang bersifat prosedural.

Selain itu dalam pengangkutan laut juga dapat diterapkan perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Rumusan di atas merupakan upaya pembentuk undang-undang untuk membentengi atau untuk melindungi konsumen dari tindakan sewenang-wenang para pelaku usaha. Menurut Yusuf Shofie undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia mengelompokkan norma-norma perlindungan konsumen ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu ;

1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha
2. Ketentuan tentang pencantuman klausula baku.

Sehingga apabila pelaku usaha dalam hal ini pengangkut melanggar salah satu perbuatan yang dilarang dalam UUPK yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam hal ini penumpang maka konsumen yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui pengajuan gugat terhadap pelaku usaha baik melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 UUPK yang menyatakan:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau

melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.

2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui peradilan atau diluar peradilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UUPK , bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Maka, para pihak di beri kewenangan untuk memilih dalam menyelesaikan permasalahannya baik jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan. Apabila para pihak tersebut memilih jalur luar pengadilan, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut. BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen. Adapun prinsip BPSK dalam menyelesaikan sengketa, yaitu: mengutamakan musyawarah, cepat, murah dan adil.

2. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa hukum dalam pengangkutan laut adalah

hubungan hukum perikatan yang didasarkan prinsip timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

2. penyelesaian sengketa pengangkutan laut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu non-litigasi (perdamaian) dan litigasi (jalur hukum). Penggunaan model penyelesaian sengketa non litigasi lebih mengutamakan pendekatan “konsensus” dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah *win-win solution* dengan mengedepankan prinsip keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan komutatif. Sedangkan penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang membutuhkan pengetahuan tentang tata cara dan/ atau aturan yang berlaku bagi penyelesaian sengketa tersebut yaitu berupa aturan-aturan hukum yang bersifat prosedural.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Sution Usman, dkk, (1991), *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Martono, H.K. dan Eka Budi Tjahjono, (2011), *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2009), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, (2008), *Hukum Pengangkutan Niaga, cet. IV*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdurkadir, (1987), *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Nasution, Az. (1999), *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Daya Widya, Jakarta.
- Purwosutjipto, H.M.N., (1995), *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- R., Soekardono, (1981), *Hukum Dagang Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta.
- Shofie, Yusuf, (2003), *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT Citra Aditya, Bandung.
- Simanjuntak, PNH., (1999), *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djembatan, Jakarta.
- Soegijatna, Tjakranegara, (1995), *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Renika Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soeryono, (1979), *Mengenal Antropologi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Utari, Siti, (1994), *Pengangkutan Laut*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Jurnal/Karya Tulis Ilmiah:
- Khairunnisa, (2008), *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Tesis, Pasca Sarjana USU, Medan.
- Sulistiyono, Adi, (2006), “Budaya Musyawarah Untuk Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution Dalam Perspektif Hukum”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 25 No.1, tahun 2006.
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

EFEKTIFITAS LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK UNTUK MENINGKATKAN SIKAP KEDISIPLINAN SISWA

San Putra
Program Studi Bimbingan Konseling
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Email: sanputra1112.sp@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan sikap kedisiplinan pada siswa di MTs Al-Washliyah Stabat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan bimbingan konseling (PTBK) yaitu upaya yang dilakukan secara terencana dan sistematis dengan melakukan refleksi terhadap praktik pelayanan selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk peningkatan praktik pelayanan konseling. Subjek penelitian ini adalah siswa MTs Al-Washliyah Stabat yang dipilih satu kelas yang menunjukkan adanya permasalahan mengenai sikap kedisiplinan pada siswa, yang ditetapkan berdasarkan data dari guru bimbingan dan konseling juga pengamatan langsung peneliti, kemudian melalui instrumen kedisiplinan siswa didapat 9 siswa yang menjadi subjek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan bimbingan kelompok sangat efektif dan dapat meningkatkan sikap kedisiplinan pada siswa sebesar 77,8%. Maka peneliti menyarankan guru bimbingan konseling dapat menggunakan layanan bimbingan kelompok sebagai alternatif yang tepat menangani permasalahan siswa khususnya meningkatkan sikap kedisiplinan pada siswa MTs Al-Washliyah Stabat.

Kata kunci: layanan bimbingan kelompok, sikap kedisiplinan

Abstract

This study aimed to determine the effectiveness of group guidance services to improve discipline in students at MTs Al-Washliyah Stabat. This study uses the counseling action research method (PTBK), namely the efforts carried out in a planned and systematic way by reflecting on the practice of service and then carried out corrective actions to improve the practice of counseling services. The subjects of this study were MTs Al-Washliyah Stabat students who were selected in one class which showed the existence of problems regarding disciplinary attitudes towards students, which were determined based on data from guidance and counseling teachers as well as direct observations of researchers, then through student discipline instruments 9 students were the subjects of research. The results of this study indicate that group guidance services are very effective and can improve disciplinary attitudes in students by 77.8%. So the researcher suggested that the counseling teacher could use group guidance services as an appropriate alternative to address student problems, especially to improve discipline in the MTs Al-Washliyah Stabat students.

Keywords: group guidance services, the attitude of discipline

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sekolah memiliki peranan dalam menanamkan dan mengajarkan kedisiplinan siswa. Penerapan kedisiplinan sangat penting, karena jika dalam suatu sekolah tidak memiliki tata tertib maka proses belajar mengajar tidak

akan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Menurut Faturrohman, Suryana, & Fatriany (2013 : 28) disiplin yaitu mengerjakan sesuatu secara tertib, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan teratur, mematuhi tata tertib dalam lingkungan pergaulan sosial, dan selalu menghindari sikap untuk mengabaikan aturan. Tujuan dari disiplin

adalah untuk mengarahkan anak agar mereka belajar mengenai hal-hal baik yang merupakan persiapan bagi masa dewasa, yang diharapkan kelak disiplin mereka akan membuat mereka bahagia, berhasil, dan penuh kasih sayang. (Rimm, 2003 :47). Dan dengan disiplin akan membantu peserta didik dalam menemukan diri, mengatasi dan mencegah timbulnya problema serta mentaati segala peraturan yang ditetapkan. (Mulyasa, 2010:158).

Disiplin yang baik dapat terbentuk dan tumbuh apabila disiplin ditanamkan dan dibiasakan sejak dini. Penanaman disiplin ini dilakukan dalam keluarga dan sekolah. Oleh karena itu, kedua tempat ini sangat dominan untuk menghasilkan dan membentuk siswa yang berdisiplin tinggi. Oleh karenanya sikap kedisiplinan harus dimiliki setiap seorang siswa. Disiplin dapat membantu pembentukan sikap, perilaku siswa nantinya. Menurut Prihatin (2011:93), ketertiban menunjuk pada kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh sesuatu yang datang dari luar. Sedangkan disiplin menunjuk pada kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya.

Menurut Sudrajat (2008: 24) setiap siswa dituntut dan diharapkan dapat berperilaku patuh dan taat terhadap peraturan yang ada di sekolah. Perilaku, aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1) Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai peraturan dan tata tertib yang berlaku disekolahnya, itu biasa disebut dengan disiplin siswa. 2) Peraturan, tata tertib dan berbagai ketentuan lainnya yang berupaya mengatur perilaku siswa disebut disiplin sekolah. Tetapi pada kenyataannya masih banyak siswa-siswa yang melakukan kasus pelanggaran di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kedisiplinan belum dapat terwujud dengan baik dan

kedisiplinan siswa masih rendah. Oleh karenanya langkah awal untuk mendisiplinkan siswa membutuhkan peran dari guru pembimbing dan kerjasama guru mata siswaan maupun orangtua siswa. Dengan adanya disiplin dalam diri siswa diharapkan siswa mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma dan melaksanakan segala kegiatan yang baik dan positif. Dengan demikian segala tindak tindakan siswa akan mengarah pada perilaku yang diharapkan serta terbentuknya kepribadian yang mandiri.

Berdasarkan fakta di lapangan serta mengamati siswa secara langsung dan wawancara dengan guru bimbingan dan konseling di sekolah MTs Al-Washliyah Stabat, masih ditemukan beberapa siswa maupun siswi yang perilakunya kurang mencerminkan sikap kedisiplinan sebagai seorang siswa. Diantaranya adalah siswa yang sama selalu terlambat masuk ke sekolah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa yang keluar pada saat pembelajaran berlangsung dan lebih memilih duduk di kantin sekolah, siswa yang tidak menaati peraturan sekolah secara menyeluruh, dan siswa tidak memahami sikap kedisiplinan sebagai siswa. Hal di atas menunjukkan indikasi bahwa kedisiplinan masih kurang baik. Maka, hal ini tidak boleh dibiarkan dan harus segera diatasi sebab jika permasalahan ini dibiarkan, berakibat pada semakin banyaknya siswa yang tidak mempunyai karakter dalam berperilaku. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya sikap kedisiplinan siswa yaitu faktor internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar, seperti teman dan keluarga.

Dalam kaitannya untuk meningkatkan sikap kedisiplinan pada siswa yaitu sebagai seorang siswa, guru pembimbing harus memakai metode yang menarik agar peserta didik dapat memahami sikap kedisiplinan sebagai siswa, yakni melalui layanan bimbingan

kelompok. Menurut Prayitno (2004: 1) bimbingan Kelompok yaitu mengaktifkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan, pribadi dan pemecahan masalah individu yang menjadi peserta kegiatan kelompok. Selanjutnya Tohirin (2011: 170) **bimbingan kelompok** adalah suatu cara memberikan bantuan kepada individu (siswa) melalui kegiatan kelompok. Dalam bimbingan kelompok merupakan sarana untuk menunjang perkembangan optimal masing-masing siswa, yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari pengalaman pendidikan ini bagi dirinya sendiri. Sukardi (2002 :48), juga menjelaskan bahwa bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari nara sumber tertentu (terutama dari pembimbing/ konselor) yang berguna untuk menunjang kehidupannya sehari-hari baik individu maupun sebagai siswa, anggota keluarga dan masyarakat serta untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan adanya interaksi saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, dan saran dimana pemimpin kelompok atau konselor yang memfasilitasi tercapainya kegiatan yang bermanfaat bagi peserta didik. Sebagai layanan dalam BK, bimbingan kelompok bertujuan untuk memandirikan siswa, terutama kaitannya dalam sikap kedisiplinan dan menjadikan kehidupan siswa lebih efektif. Hal ini dibutuhkan sebab tantangan dalam belajar dan masalah dalam kehidupan sehari-hari terkadang siswa tidak mampu menyelesaikan atau mengatasinya. Di sinilah hadirnya bimbingan dan konseling melalui layanan bimbingan kelompok yang dilakukan oleh guru BK.

Menurut Prayitno (2015: 150) tujuan bimbingan kelompok ada 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum layanan bimbingan kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Dalam kata kaitan ini, sering menjadi kenyataan bahwa kemampuan bersosialisasi/ berkomunikasi seseorang sering terganggu oleh perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang tidak objektif, sempit dan terkungkung serta tidak efektif. Melalui layanan bimbingan kelompok hal-hal yang mengganggu atau menghimpit perasaan dapat diungkapkan, dilonggarkan, diringankan, melalui berbagai cara, seperti pikiran yang suntuk, buntu, atau beku, dicairkan dan dinamikkan melalui berbagai masukan dan tanggapan baru. Yang kedua adalah tujuan khusus bimbingan kelompok yaitu bermaksud membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual (hangat) dan menjadi perhatian peserta. Melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik itu mendorong mengembangkan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif dan bersikap kedisiplinan. Dalam hal ini kemampuan komunikasi verbal dan non verbal dapat ditingkatkan.

Melalui layanan bimbingan kelompok diharapkan memberikan dampak positif terkait dengan meningkatkan sikap kedisiplinan pada diri siswa dengan memberikan materi dan mengikuti setiap tahap-tahap yang ada didalam bimbingan kelompok.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: apakah layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan sikap kedisiplinan pada diri siswa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui seberapa besar peningkatan sikap kedisiplinan siswa melalui layanan bimbingan kelompok yang diberikan.

2. METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian tindakan bimbingan konseling (PTBK). Menurut Dewi (2013: 16) penelitian tindakan bimbingan konseling (PTBK) adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan sistematis dengan melakukan refleksi terhadap praktik pelayanan selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk peningkatan praktik pelayanan konseling. Subjek penelitian ini adalah siswa MTs Al-Washliyah Stabat yang dipilih satu kelas yang menunjukkan adanya permasalahan mengenai kurangnya sikap kedisiplinan sebagai seorang siswa, Subjek penelitian ini diambil berdasarkan data dari guru bimbingan dan konseling juga pengamatan langsung peneliti yakni di ambil 5 orang siswa yang memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan 4 orang siswa yang memiliki sikap kedisiplinan yang cukup. Dengan demikian besar subjek penelitian ini adalah 9 orang siswa. Pada penelitian ini peneliti menggunakan model Kemmis dan Mc. Taggart (dalam Dewi, 2013:15), karena desain model ini dianggap lebih mudah dalam prosedur tahapannya yaitu: (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, (4) refleksi, dan (5) evaluasi. Untuk memperoleh data yang sesuai dalam penelitian ini, maka digunakan alat

atau disebut juga instrumen penelitian. Alat yang digunakan adalah angket (kuisisioner) dan juga observasi secara langsung yakni dengan cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara cermat dan sistematis. Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan tentang meningkatkan sikap kedisiplinan siswa dari hasil pengamatan melalui pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh konseli selama proses pemberian layanan bimbingan kelompok. Selama proses layanan dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan hasil presentase skor terhadap sikap kedisiplinan, meliputi tingkat perubahan dari pikiran, keyakinan, dan perilaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah pertama yang dilakukan peneliti dalam mengidentifikasi siswa yang mengalami masalah adalah dengan menganalisis hasil angket yang telah diberikan sebelumnya pada siswa yang menjadi responden, yaitu angket diberikan hanya di 1 kelas berdasarkan data dari guru bimbingan dan konseling juga pengamatan langsung peneliti, yaitu kelas yang paling menunjukkan adanya permasalahan yang akan diteliti. Setelah angket terkumpul dan dianalisis, didapatkan siswa yang menjadi anggota dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok ini sebanyak 9 orang yaitu 5 orang siswa yang memiliki sikap kedisiplinan yang rendah sebagai seorang siswa dan 4 orang siswa yang memiliki sikap kedisiplinan yang cukup sebagai seorang siswa.

Hasil angket dari sikap kedisiplinan yang dimiliki siswa sebagai berikut:

Tabel 1. Sikap kedisiplinan sebelum kegiatan layanan bimbingan kelompok

Responden	Hasil Yang Di Peroleh	Kategori sikap kedisiplinan
A	79	R
B	81	R

C	88	R
D	115	C
E	74	R
F	77	R
G	109	C
H	117	C
I	106	C

Kategori :

- a. Skor 47-94 = Rendah (R)
- b. Skor 95-141 = Cukup (C)
- c. Skor 142-188 = Tinggi (T)

Setelah mengetahui siswa yang akan diberikan layanan bimbingan kelompok selanjutnya peneliti menyiapkan materi mengenai sikap kedisiplinan kepada siswa yang selanjutnya memperhatikan setiap tahap-tahap dalam memberikan layanan bimbingan kelompok dan tindakan yang akan diberikan kepada siswa dalam hal ini peneliti mengikuti tahap-tahap layanan bimbingan kelompok menurut Prayitno (2004: 20-25) ada beberapa tahap-tahap yang perlu dilalui dalam pelaksanaan bimbingan kelompok yaitu tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Tahap-tahap ini merupakan suatu kesatuan dalam keseluruhan kegiatan kelompok. Tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: **1) Tahap Pembentukan**, Tahap ini tahap pengenalan dan melibatkan dari anggota ke dalam kelompok dengan bertujuan agar anggota memahami maksud bimbingan kelompok. Pemahaman anggota kelompok memungkinkan anggota kelompok aktif berperan dalam kegiatan bimbingan kelompok yang selanjutnya dapat menumbuhkan minat pada diri mereka untuk mengikutinya. Pada tahap ini bertujuan untuk menumbuhkan suasana saling mengenal, percaya, menerima, dan membantu teman-teman yang ada dalam kelompok. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengungkapkan pengertian dan tujuan kegiatan kelompok dalam rangka

pelayanan bimbingan kelompok; menjelaskan cara-cara dan asas-kegiatan kelompok anggota kelompok saling memperkenalkan diri dan mengungkapkan diri dan melakukan permainan pengakraban. **2) Tahap Peralihan**, Tahap ini tahap transisi dari tahap pembentukan ke tahap kegiatan. Dalam menjelaskan kegiatan apa yang akan dilaksanakan pemimpin kelompok dapat menegaskan jenis kegiatan bimbingan kelompok tugas atau bebas. Setelah jelas kegiatan apa yang harus dilakukan maka tidak akan muncul keragu-raguan atau belum siapnya anggota dalam melaksanakan kegiatan dan manfaat yang diperoleh setiap anggota kelompok. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah pemimpin kelompok menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya, menawarkan atau mengamati, apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya (tahap ketiga), membahas suasana yang terjadi, meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota dan bila perlu kembali ke beberapa tahap pertama (tahap pembentukan). **3) Tahap Kegiatan**, Tahap ini merupakan tahap inti dari kegiatan bimbingan kelompok dengan suasana yang ingin dicapai, yaitu terbahasnya secara tuntas permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok dan terciptanya suasana untuk mengembangkan diri, baik yang menyangkut pengembangan

kemampuan berkomunikasi maupun menyangkut pendapat yang dikemukakan oleh kelompok. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini untuk topik tugas adalah pemimpin kelompok mengemukakan suatu topik untuk dibahas oleh kelompok kemudian terjadi tanya jawab antara anggota dan pemimpin kelompok tentang hal-hal yang belum jelas menyangkut topik yang dikemukakan pemimpin kelompok. Selanjutnya anggota membahas topik tersebut secara mendalam dan tuntas, serta dilakukan kegiatan selingan bila diperlukan. Untuk bimbingan kelompok topik bebas, kegiatan yang dilakukan adalah masing-masing anggota secara bebas mengemukakan topik bahasan; menetapkan topik yang akan dibahas dahulu kemudian anggota membahas topik secara mendalam dan tuntas, serta diakhiri kegiatan permainan. **4) Tahap Pengakhiran**, Tahap ini terdapat kegiatan yaitu penilaian (evaluasi). Tahap ini merupakan tahap penutup dari serangkaian kegiatan bimbingan kelompok dengan tujuan telah tuntasnya topik yang dibahas oleh kelompok tersebut. Kegiatan kelompok berpusat pada pembahasan dan penjelasan tentang kemampuan anggota kelompok untuk menetapkan hal-hal yang telah diperoleh

melalui bimbingan kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pemimpin kelompok berperan untuk memberikan penguatan (reinforcement) terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oleh kelompok tersebut. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri.

3.1 Hasil Penelitian Setelah Tindakan Siklus I

Pada saat kegiatan berlangsung dimana peneliti mengamati jalannya kegiatan dan hasil kegiatan yang dilakukan, juga dibantu oleh observer yakni Risma Dina Hasilnya dilihat dari seberapa besar keseriusan anggota kelompok dan pemahaman anggota kelompok dalam memahami materi yang dibahas dalam kegiatan. Untuk hasil akhir dilihat dari hasil lembar observasi yang digunakan observer selama proses bimbingan kelompok berlangsung, layanan segera dan pemberian angket setelah 1 siklus selesai. Adapun gambaran hasil siklus I berdasarkan lembar observasi dapat dilihat pada gambaran hasil siklus I berdasarkan tabulasi angket yakni:

Tabel 2. Tabel analisis hasil angket sikap kedisiplinan siswa Siklus I

Responden	Hasil Yang Di Peroleh	Kategori peningkatan sikap kedisiplinan siswa
A	90	R
B	116	C
C	118	C
D	143	T
E	89	R
F	142	T
G	145	T
H	140	T
I	146	T
Jumlah		

Peningkatan sikap kedisiplinan siswa	$5/9 \times 100\% = 55,6\%$
---	---

Kategori :

- Skor 47-94 = Rendah (R)
- Skor 95-141 = Cukup (C)
- Skor 142-188 = Tinggi (T)

Dimana hasil dari tabulasi angket diperoleh ada 5 siswa yang berada pada kategori tinggi, maka hasil siklus I sudah terjadi peningkatan sikap kedisiplinan siswa yakni sebanyak 55,6%, namun belum mencapai target yang diharapkan yakni 75%. Oleh karena itu, peneliti masih harus melanjutkan kegiatan ke siklus II dengan 2 pertemuan.

Siklus II

Peneliti melihat adanya perkembangan yang dialami oleh para peserta kelompok setelah melaksanakan kegiatan layanan bimbingan kelompok selama dua kali. Hasil akhirnya dilihat dari analisis angket yang diberikan setelah kegiatan selesai kepada para peserta kelompok dan ditambah dengan lembar observasi dan layanan segera. Adapun gambaran hasil siklus II berdasarkan lembar tabulasi angket yakni:

Tabel 3. Tabel analisis hasil angket sikap kedisiplinan siswa Siklus II

Responden	Hasil Yang Di Peroleh	Kategori peningkatan sikap kedisiplinan siswa
A	124	C
B	142	T
C	143	T
D	156	T
E	126	C
F	148	T
G	151	T
H	153	T
I	159	T
Jumlah		
Peningkatan sikap kedisiplinan siswa		$7/9 \times 100\% = 77,8\%$

Kategori :

- Skor 47-94 = Rendah (R)
- Skor 95-141 = Cukup (C)
- Skor 142-188 = Tinggi (T)

Dimana hasil dari tabulasi angket diperoleh ada 7 siswa yang berada pada kategori tinggi, maka hasil siklus II sudah terjadi sikap kedisiplinan siswa yakni sebanyak 77,8%, dan telah mencapai target yang diharapkan yakni 75%. Pada siklus II ini sudah terjadi peningkatan yang signifikan yang membuktikan bahwa

layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan sikap kedisiplinan siswa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Siswa menunjukkan sikap

kedisiplinan mengalami peningkatan yang tinggi yaitu sebesar 77,8% dari hasil siklus II hal ini membuktikan bahwa layanan bimbingan kelompok sangat efektif diberikan kepada siswa untuk meningkatkan sikap kedisiplinan siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, R. (2013). *Profesionalisasi Guru BK Melalui PTBK*. Medan: UNIMED Press.
- Fathurrohman, P., Suryana, A., & Fatriany F. (2013). *Pengembangan Pendidikan Karakter*. Bandung : Refika Aditama.
- Mulyasa, E. (2010). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung:Remaja Rosda Karya.
- Prayitno. (2004). *Layanan Bimbingan Dan Konseling Kelompok (Dasar Dan Profil)*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Prayitno, (2015), *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*. Padang: Program Pendidikan Profesi Konselor Jurusan Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
- Prihatin, E. (2011). *Manajemen Peserta Didik*. Bandung: Alfabeta.
- Rimm, S. (2003). *Mendidik dan Menerapkan Disiplin Pada Anak Prasekolah*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama.
- Sudrajat, A. (2008). *Perkembangan Kognitif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sukardi, D.K. (2002). *Pengantar pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tohirin, (2011). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pers

MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DALAM MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013 MELALUI WORKSHOP

Renold Pasaribu
Pengawas Sekolah Menengah Pertama Deli Serdang
renoldpasaribu@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran melalui workshop di SMP Singosari Deli Tua pada tahun pelajaran 2017/2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan sekolah melalui 2 siklus, dimana masing-masing siklus memiliki tahap: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan dan Pengamatan, (3) Evaluasi dan (4) Refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah berjumlah 15 orang guru yang mengajar di SMP Singosari Deli Tua. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi, kuesioner, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perhitungan persen jumlah guru yang sudah mampu menyusun RPP Kurikulum 2013 dan yang belum mampu menyusun RPP Kurikulum 2013. Hasil penelitian menunjukkan: (1). Terdapat peningkatan jumlah guru yang mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dari 15 orang guru, baru 8. (53,33%) guru yang mampu menyusun RPP Kurikulum 2013 pada siklus I kemudian meningkat pada siklus II menjadi 14 (93,33%) guru yang sudah mampu menyusun RPP Kurikulum 2013; (2) Terdapat penurunan jumlah guru yang tidak mampu menyusun RPP kurikulum 2013, dari 15 orang guru, terdapat 7 (46,67%) guru belum mampu menyusun RPP Kurikulum 2013 pada siklus I kemudian pada siklus II terjadi penurunan jumlah guru yang belum mampu menyusun RPP Kurikulum 2013 menjadi 1 (6,67%) guru yang belum mampu menyusun RPP Kurikulum 2013 secara baik; (3) Kompetensi profesional guru dalam menyusun RPP Kurikulum 2013 dapat meningkat melalui workshop.

Kata kunci: kompetensi profesional guru, rencana pelaksanaan pembelajaran workshop

Abstract

The aim of this study is to improve of professional competency of teacher in making lesson plan of curriculum of 2013 through workshop at SMP Singosari Deli Tua in Academic year of 2017/2018. The method of this study is school action research by using 2 cycles. The steps in the cycle are: 1) planning, 2) observing, 3) evaluating and Reflecting. The subject of the study is fifteen teachers who are teaching in SMP Singosari Deli Tua. The technique for collecting data is observation, questioner, interview and study of documentation. The technique for analyzing data is by calculating of percentage of the teacher who are able to make lesson plan of curriculum of 2013 and the percentage of the teachers who are not able to make lesson plan of curriculum of 2013. The results of the study show: (1) There is the improvement of the amount of teacher who are able to make lesson plan of curriculum of 2013. There are 8 (53,33%) teachers from 15 teachers who are able to make lesson plan of curriculum of 2013 in first cycle and then it is increasing at second cycle to be 14 (93,33%) teachers who are able to make lesson plan of curriculum of 2013. (2) There is the decreasing of amount of teachers who are not able to make lesson plan of curriculum of 2013. There are 7 (46,67%) teachers who are able to make lesson plan of curriculum of 2013 at first cycle and then at second cycle is to be 1 (6,67%) teachers who are not able to make lesson plan of curriculum of 2013. (3) professional competency of teacher in making lesson plan of curriculum of 2013 can be improved through workshop

Keyword: professional competency of teacher. lesson plan and workshop

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP Kurikulum 2013) adalah merupakan salah satu bagian dari kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru. Namun berdasarkan observasi awal yang dilakukan terhadap guru-guru yang bertugas di SMP Singosari Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa para guru belum mampu menyusun RPP Kurikulum 2013 dengan baik, mereka masih kebingungan bagaimana menyusun RPP Kurikulum 2013 Yang baik.

Berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan di SMP Singosari Deli Tua yang faktanya para guru masih kebingungan cara membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 dengan baik maka peneliti ingin meningkatkan kemampuan guru dalam menyuaun RPP Kurikulum 2013 dengan baik sehingga para guru memiliki RPP Kurikulum 2013 yang baik untuk sebagai pedoman dalam pross pembelajaran di dalam kelas. Oleh sebab itu peneliti membuat penelitian yang berjudul "*Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 Melalui Workshop Di SMP Singosari Deli Tua Pada Tahun Pelajaran 2017 / 2018.*"

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Apakah melalui *workshop* dapat meningkatkan kompetensi profesional guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 di SMP Singosari Deli Tua pada Tahun Pelajaran 2017/2018?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk meningkatkan kompetensi profesional guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembeajaran melalui *workshop* di SMP Singosari Deli Tua pada Tahun Pelajaran 2017/2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka dapat diperoleh manfaat dalam penelitian, yaitu:

1. Guru dapat memahami dan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 dengan baik.
2. Kompetensi profesional guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 dapat meningkat.
3. Guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 dengan baik.
4. Meningkatkan hasil belajar siswa
5. Meningkatkan kompetensi pengawas sekolah dalam menulis PTS

2. METODE

2.1 Subjek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah guru-guru yang mengajar di SMP Singosari Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah guru yang menjadi subyek penelitian adalah berjumlah 15 orang guru.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Singosari Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian adalah selama 6 bulan yakni pada tahun pelajaran 2017/2018 semester ganjil bulan Juli sampai bulan Desember 2017.

2.3 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan sekolah dengan menerapkan 2 siklus. Siklus I memiliki 4 langkah, yakni: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan dan observasi, (3) evaluasi dan (4) refleksi. Kemudian siklus II juga memiliki 4 langkah yang sama dengan langkah-langkah/tahapan pada siklus I. Bagan tentang siklus I dan II dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah: (1) observasi, (2) wawancara, (3) metode dokumentasi, dan (4) kuesioner. Teknik observasi digunakan untuk menjanging data kualitatif melalui: (1) observasi non sistematis, yakni observasi yang dilakukan tanpa menggunakan instrumen pengamatan, dan (2) observasi sistematis, yakni observasi yang dilakukan menggunakan instrumen pengamatan. Teknik wawancara digunakan untuk menjanging data penelitian dengan cara mewawancarai sumber data untuk memperoleh informasi tentang data yang ingin diperoleh. Metode dokumentasi digunakan untuk menjanging data penelitian dengan cara melihat bukti-bukti tertulis, seperti notulen rapat, buku-buku, catatan, peraturan dan sebagainya. Kuesioner adalah untuk menjanging data penelitian

dengan cara memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan sesuai dengan fakta yang mereka alami. Kuesioner dapat berbentuk pilihan ganda (kuesioner tertutup) dan kuesioner berbentuk isian yang berbentuk check list (√) pada kuesioner yang telah disediakan.

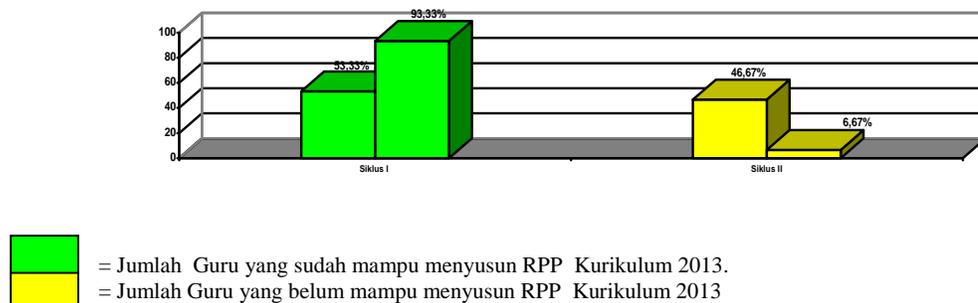
2.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pehitugn persen jumlah guru yang sudah mampu menyusun RPP Kurikulum 2013 dan yang belum mampu menyusun RPP Kurikulum 2013.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan siklus I diperoleh hasil bahwa sebanyak 8 (53,33%) orang guru telah mampu menyusun RPP Kurikulum 2013 dan 7 (46,67%) orang guru belum mampu menyusun RPP Kurikulum 2013. Kemudian pada siklus II diperoleh hasil bahwa sebanyak 14 (93,33%) guru telah mampu menyusun RPP Kurikulum 2013 dengan baik dan hanya 1 (6,67%) guru yang belum mampu menyusun RPP Kurikulum 2013. Perbandingan hasil pencapaian kemampuan guru dalam menyusun RPP Kurikulum 2013 antara siklus I dengan siklus II dapat dilihat pada diagram dibawah ini.

Diagram 4.3
Kemampuan guru dalam menyusun RPP Kurikulum 2013 Siklus I dan Siklus II



Berdasarkan diagram 4.3. di atas dapat digambarkan bahwa:

1. Kemampuan guru dalam menyusun RPP Kurikulum 2013 pada siklus I adalah 8 (53,33%) guru dan pada siklus II terdapat 14 (93,33%) guru yang mampu menyusun RPP Kurikulum 2013 .Hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah guru yang mampu menyusun RPP Kurikulum 2013 sebanyak 6 orang guru (40%).
2. Jumlah guru yang tidak mampu menyusun RPP Kurikulum 2013 berkurang dengan hasil bahwa pada siklus I terdapat 7 (46,67 %) guru yang belum mampu menyusun RPP Kurikulum 2013 namun pada Siklus II hanya tinggal 1(6,67%) guru yang belum mampu menyusun RPP Kurikulum 2013 dengan baik.

Dari hasil di atas maka disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan guru dalam menyusun RPP Kurikulum 2013 setelah dilakukan *Workshop* dengan melalui Siklus I dan Siklus II

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa:

1. Terdapat peningkatan jumlah guru yang mampu menyusun RPP Kurikulum 2013 Kemampuan guru dalam menyusun RPP Kurikulum 2013 yakni: pada siklus I adalah 8 (53,33%) guru dan pada siklus II terdapat 14 (93,33%) guru yang mampu menyusun RPP Kurikulum 2013 .Hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah guru yang

mampu menyusun RPP Kurikulum 2013 sebanyak 6 orang guru (40%).

2. Jumlah guru yang tidak mampu menyusun RPP Kurikulum 2013 berkurang dengan hasil bahwa pada siklus I terdapat 7 (46,67 %) guru yang belum mampu menyusun RPP Kurikulum 2013 namun pada Siklus II hanya tinggal 1(6,67%) guru yang belum mampu menyusun RPP Kurikulum 2013 dengan baik.
3. Kompetensi Profesional guru dalam menyusun RPP Kurikulum 2013 dapat meningkat melalui *Workshop*.

DAFTAR PUSTAKA

- Komara. (2007). *Kompetensi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Materka, Pat Roessle. (1994). *Lokakarya dan Seminar*. Yogyakarta: kanisius
- Mulyasa. (2008). *Kompetensi Profesional Guru*. Jakarta: Rieneka Cipta
- Notoatmojo. (2003). *Workshop*. Jakarta: Gramedia
- Suprijanto, (2008). *Pendidikan Orang Dewasa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tilaar. (1990). *Workshop dan Lokakarya*. Jakarta: Gramedia
- Zaini, (2002). *Disain Pembelajaran di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: CYDS IAIN Sunan Kaji Jaga.

ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP PREFERENSI KONSUMEN KOPI LOKAL SUMATERA DI KOTA MEDAN

Tota Totor Naibaho
Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang – Kementerian Pertanian
Jl. Ahmad Yani km. 85 Binuang, Kan Tapin, Kalimantan Selatan
totatototor.naibaho@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui tingkat preferensi konsumen atau penikmat kopi lokal khas Sumatera (kopi Mandailing, Lintong, Gayo dan Sidikalang) di kota Medan pada kombinasi atribut produk (stimuli) dan tingkat kepentingan konsumen terhadap atribut yang melekat pada produk berdasarkan tingkat pendapat konsumen. Metode penelitian dengan cara analisis Konjoin dengan aplikasi SPSS 16. Pada penelitian ini digunakan tujuh atribut yang mempengaruhi diantaranya citarasa, aroma, harga, ampas kopi, efek keasaman, penyajian dan cara penyeduhan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa preferensi konsumen pada stimuli kombinasi terbaik dengan menghitung nilai kegunaan dan nilai tingkat kepentingan atribut yang diteliti. Model kombinasi yang paling disukai konsumen dengan pendapatan perbulan Rp. 3-5 juta, Rp. 5-10 juta dan Rp diatas 10 juta adalah model kombinasi ID 14 yaitu kopi dengan citarasa nikmat dan manis, harga terjangkau, aroma tajam dan khas, penyajian kopi panas, ampas yang tersisa sedang, efek keasaman yang rendah dan penyeduhan secara manual. Sedangkan model kombinasi yang paling disukai konsumen dengan pendapatan perbulan Rp. 2-3 juta adalah kombinasi ID 12 yaitu kopi lokal Sumatera dengan citarasa nikmat dan standart (sweetnes), harga murah, aroma tajam dan khas, penyajian kopi panas, ampas sedang, efek keasaman yang rendah (low accid) dan penyeduhan secara tradisional. Tingkat kepentingan atribut tertinggi yang menjadi perhatian konsumen dalam keputusan membeli dan mengkonsumsi kopi lokal Sumatera adalah citarasa (19,38%), aroma (18,94%), harga (15,99%), ampas kopi (13,86%), penyajian kopi (13,18%), efek (11,22%) dan cara penyeduhan (7,39%).

Kata kunci : kopi, analisis konjoin, tingkat kepentingan atribut, preferensi konsumen, kombinasi.

Abstract

This study evaluated the consumer preference of Sumatera Local coffee, especially Mandailing, Lintong, Gayo, and Sidikalang coffee in Medan city in combination of product attribute and levels of consumer benefit to product product attribute based on the level of consumer income. This study was evaluated using Konjoin analysis method by SPSS 16. Seven product attribute that influenced in this study were taste, flavours, price, coffee grounds, accid effect, presentation of coffee, and brewing method. Consumer preference focus on the highest quality of stimuli combine based on usability value of calculation obtained and level of attribute benefit inside. ID14 combination models was the most favorite for consumer with monthly income were 3 to 5 million IDR, 5 to 10 million IDR, and more than 10 million IDR in which are enjoyable and sugary, affordable prices, unique flavour, serving hot coffee, medium level of coffee grounds, low accid effects, and brewing manually. ID12 combination model was favorited by consumer with monthly income 2 to 3 million IDR in which are enjoyable and standard of sweetness, cheap prices, unique flavour, serving hot coffee, medium level of coffee grounds, low accid effects, and brewing traditionally. Level of the highest attribute benefit in which become consumer concern on decide to consume Sumatera local coffee were taste (19,38%), price (15,99%), coffee ground (13,86%), presentation of coffee (13,18%), acid effect (11,12%) and brewing method (7,39%).

Keyword: coffee, konjoin analysis, level of attribute benefit, konsumen preference, combination.

1. PENDAHULUAN

Hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya dan berperan penting sebagai sumber devisa negara salah satunya adalah kopi (*coffea spp*). Kopi tidak hanya berperan penting sebagai sumber devisa melainkan juga merupakan sumber penghasilan bagi tidak kurang dari satu setengah juta jiwa petani kopi di Indonesia. (Rahardjo, 2012). Kopi sebagai bahan minuman sudah tidak asing lagi. Kopi banyak digemari oleh berbagai kalangan masyarakat. Penggemarnya bukan saja bangsa Indonesia, tetapi juga berbagai bangsa di seluruh dunia. Kandungan kafein mempunyai daya rangsang terhadap peningkatan kinerja beberapa bagian susunan saraf pusat, minuman kopi pun menjadi jenis minuman yang sangat digemari oleh manusia di berbagai penjuru dunia. Fakta menunjukkan bahwa kopi merupakan komoditas nomor dua yang paling banyak diperdagangkan setelah minyak bumi.

Keberhasilan agribisnis kopi membutuhkan dukungan semua pihak yang terkait dalam proses produksi kopi pengolahan dan pemasaran komoditas kopi. Upaya meningkatkan produktivitas dan mutu kopi terus dilakukan sehingga daya saing kopi di Indonesia dapat bersaing di pasar dunia. (Rahardjo, 2012). Perkembangan kopi di kota Medan untuk saat ini memang sedang mengalami fase kedewasaan (*maturity*), akan tetapi bertolak ke belakang masa-masa perkembangan kopi di tahun-tahun silam tidak kalah hebatnya. Dulu kopi lokal Sumatera di kota Medan masih terkenal bisa dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah Medan, namun untuk saat ini sepertinya sudah beralih ke jenis makanan lain sebagai oleh-oleh untuk setiap pengunjung di kota Medan ataupun sebagai oleh-oleh masyarakat Sumatera Utara apabila bepergian ke luar kota. Sehingga perlu untuk melihat preferensi

kosumen kopi dari kacamata tingkat pendapatan konsumen yang berbeda - beda untuk mengembangkan bahkan mengembalikan citra kopi lokal Sumatera sebagai oleh-oleh khas daerah.

Kopi Sidikalang, Gayo, Lintang dan Mandailing merupakan jenis kopi arabika sebagai indukannya. Jenis kopi ini ditanam pada dataran tinggi yang memiliki iklim kering sekitar 1.000 – 1.850 meter dari permukaan laut seperti di kawasan pegunungan Bukit Barisan, sehingga untuk perlakuan dan penanganan agronominya sama. Kopi Sumatera memiliki tekstur halus dan berbau tajam. Inilah yang menyebabkan kopi Sumatera menjadi salah satu kopi paling laris. Kopi Sumatera dihasilkan dari perkebunan di daerah Lintang (kopi Lintang), Dairi (kopi Sidikalang), Mandailing Natal, Tapanuli Selatan (kopi Mandailing) dan Gayo Aceh (kopi Aceh). Perbedaan akan tingkat kepentingan dan selera setiap konsumen yang berbeda-beda menjadi dasar pemahaman yang harus diketahui dalam upaya pengembangan kopi lokal Sumatera. Pengetahuan akan kondisi, tingkat kepentingan dan permintaan konsumen sesuai selera diharapkan dapat menjadi dasar prospek dan peluang pengembangan kopi lokal di Sumatera di Sumatera Utara.

Tingkat kepentingan dan preferensi masyarakat menjadi fondasi dasar dalam pengembangan kopi lokal Sumatera, apabila preferensi konsumen sudah diketahui maka pertumbuhan kopi lokal diharapkan akan semakin pesat seiring dengan peningkatan produksi yang tentunya berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan para pelaku usahatani kopi mulai dari hulu hingga ke hilir diantaranya petani kopi, pelaku bisnis, pedagang kopi, eksportir bahkan pemerintah. Menurut Kotler & Armstrong (2008) atribut produk merupakan suatu komunikasi atas manfaat dari hasil pengembangan suatu produk atau jasa yang akan ditawarkan

produk atau jasa tersebut. Atribut produk tersebut meliputi kualitas, fitur, gaya dan desain. Untuk mendapatkan tingkat kepentingan dan preferensi konsumen terhadap kopi lokal Sumatera atribut citarasa, aroma, harga, penyajian, ampas kopi, efek dan cara penyeduhan dianggap sudah mewakili karakteristik kopi. Penentuan atribut ini juga didukung oleh kajian referensi oleh penulis terdahulu.

Tingkat kepentingan dan selera masyarakat menjadi fondasi dasar dalam pengembangan kopi lokal Sumatera, apabila sikap konsumen sudah diketahui maka pertumbuhan kopi lokal diharapkan akan semakin pesat seiring dengan peningkatan produksi yang tentunya berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan para pelaku usahatani kopi mulai dari hulu hingga ke hilir diantaranya petani kopi, pelaku bisnis, pedagang kopi, eksportir bahkan pemerintah. Kotler dan Armstrong (2008) mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih target pasar dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan target pasar. Tujuan manajemen pemasaran adalah menemukan, menarik, mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan sasaran dengan menciptakan, memberikan dan mengkomunikasikan keunggulan nilai bagi pelanggan. Atribut yang digunakan dalam analisis ini berjumlah 7 (tujuh) atribut yang terdiri dari citarasa, harga, aroma, penyajian, ampas kopi, efek keasaman kopi, dan cara penyeduhan kopi. Menurut Wijaya, dalam hal seperti ini, adalah penting untuk membedakan satu atau lebih atribut penentu, yaitu atribut yang paling menentukan pilihan pembeli. Suatu atribut akan dianggap penting jika memberikan manfaat yang sangat diinginkan, tetapi jika semua alternatif yang bersaing mempunyai karakteristik yang sama, maka atribut yang lain akan menentukan pilihan merek (Wijaya, 2008).

Menurut Paul dan Olson (dalam Simamora, 2004) menyatakan bahwa sikap adalah evaluasi konsep secara menyeluruh yang dilakukan oleh seseorang. Namun Schiffman dan Kanuk (dalam Simamora, 2004) menyatakan bahwa sikap adalah ekspresi perasaan (*inner feeling*), yang mencerminkan apakah seseorang senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, dan setuju atau tidak terhadap suatu objek. Objek yang dimaksud bisa berupa merek, layanan, pengecer, perilaku tertentu, dan lain-lain. Menurut Schiffman dan Kanuk (2008), perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai perilaku dimana konsumen menunjukkan dalam hal mencari (*searching for*), membeli (*purchasing*), menggunakan (*using*), evaluasi (*evaluating*) dan membuang produk dan jasa yang diharapkan akan memuaskan kebutuhan (*disposing of products and services that they will satisfy their needs*). Menurut Surjandari (2009), analisis konjoin merupakan suatu metode untuk menganalisis preferensi pelanggan mengenai suatu produk dan syarat-syarat sifat yang menyusun atribut produk tersebut. Keluaran utama dari analisis konjoin adalah serangkaian skala interval *parth-worth* (utilitas) dari masing-masing level untuk setiap atribut dimana penggabungan utilitas ini akan didapatkan prediksi preferensi dari masing-masing level untuk setiap atribut dari produk tersebut.

Analisis Konjoin adalah suatu teknik analisis yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi pelanggan yang dibawa oleh suatu produk tertentu dan nilai kegunaan yang muncul dari atribut - atribut produk terkait. Untuk menentukan strategi pemasaran, analisis Konjoin ini tepat dan baik. Bahkan pada tatanan yang lebih tinggi bisa dipakai untuk segmentasi pasar berdasarkan preferensi konsumen terhadap atribut produk yang dipilihnya. Filosofi dari

teknik analisis ini ialah setiap stimulus apa saja yang bisa berupa produk, sebuah merek atau barang yang dijual dipasar akan dievaluasi oleh konsumen sebagai suatu kumpulan atribut-atribut tertentu. Oleh karena itu, teknik ini sangat bermanfaat dalam pemasaran untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap suatu produk yang diluncurkan di pasar. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Biasanya disediakan 5 (lima) pilihan jawaban skala dengan format sebagai berikut:

- (1) Sangat setuju
- (2) Tidak setuju
- (3) Netral
- (4) Setuju
- (5) Sangat setuju

2. METODE

Tahapan - tahapan penelitian yang dilakukan untuk mencapai tujuan antara lain studi pendahuluan, perumusan masalah, penentuan tujuan penelitian, studi literatur, penentuan model dan perancangan penelitian, penyusunan kuesioner, penyebaran kuesioner, pengolahan data, analisis hasil pengolahan data, rekomendasi dan akhirnya diperoleh suatu kesimpulan dan saran untuk penelitian berikutnya. Daerah penelitian ditentukan secara *purposive* dilakukan di Kota Medan, yaitu beberapa kedai kopi/ *coffee shop* di kota Medan diantaranya Omerta Coffee (kopi Sidikalang), Keude Kupie Ulee Kareng & Gayo (kopi Gayo), Macehat Coffee (kopi Mandailing) dan Kopi Ong (kopi Lintong).

Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *accidental sampling* yaitu diperolehnya sampel yang tidak direncanakan terlebih dahulu. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang membeli dan mengkonsumsi kopi di lokasi penelitian. Menurut Rosyadi (n.d) metode Slovin

yang dikutip dari Umar (2004) dapat digunakan untuk menguji kecukupan data tersebut yakni dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

dimana:

N = jumlah populasi

n = ukuran sampel

d= galat pendugaan

(batas toleransi kesalahan 10%)

Dari rumus Slovin tersebut, dengan populasi penelitian ini ialah penduduk kota Medan dengan jumlah 2.191.140 jiwa, maka didapatkan ukuran sampel yang diperlukan untuk penelitian ini sebesar 99,99 orang (dibulatkan menjadi 100 orang). Berdasarkan rumus Slovin didapatkan jumlah sampel sebanyak 100 orang sehingga hasil yang didapatkan bisa dikatakan telah mencukupi dalam penelitian ini. Selain metode Slovin, metode yang lain menurut Orme, B. (2000) formula penentuan jumlah sampel untuk kaji preferensi diperoleh dengan rumus Jumlah sampel = (level – atribut+ 1) × 5, maka diperoleh jumlah sampel 60 orang, dengan rentang min 60 - maks 100 orang. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat peneliti memutuskan untuk menentukan jumlah sampel sebanyak 100 orang.

Mengingat kopi Sidikalang, Gayo, Lintong dan Mandailing merupakan jenis kopi arabika sebagai indukannya di bantaran pegunungan Bukit Barisan Sumatera dengan perlakuan dan penanganan agronomi yang sama maka dalam penentuan sampel tidak dilakukan pengelompokan atau klasifikasi sampel berdasarkan jenis kopi lokal Sumatera tersebut. Analisis konjoin terdiri dari beberapa tahap. Pertama, memilih beberapa kombinasi atribut dan level dari masing-masing atribut. Selanjutnya, kombinasi atribut ini diberi peringkat oleh beberapa responden (konsumen). Terakhir, analisis terhadap

penilaian responden dilakukan untuk mengetahui preferensi konsumen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Uji Korelasi Atribut dengan preferensi konsumen

Kriteria	Value	Sig.
Pearson's R	.981	.000
Kendall's tau	.875	.000
Kendall's tau for Holdouts	.667	.

(Sumber: Data Primer, 2018)

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa, hubungan antara kombinasi atribut dengan preferensi konsumen dapat dilihat pada nilai *Pearson's R* yang menunjukkan nilai 0,981 atau nilai preferensi konsumen yang berpengaruh adalah 98,1 %. Hal tersebut

menunjukkan adanya tingkat korelasi yang sangat kuat dengan didukung nilai sig 0,000 yang menunjukkan nilai signifikansi kuat dan tidak melebihi berdasarkan taraf signifikan yang digunakan yakni 0,5.

Tabel 2. Uji Validitas

Case Processing Summary		N	%
Cases	Valid	100	100
	Excluded ^a	0	0
	Total	100	100

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

(sumber: Data Primer Diolah, 2018)

Berdasarkan hasil pengujian validitas dengan uji korelasi pearson dengan SPSS versi 16 terlihat bahwa setiap item (pertanyaan) dalam hal ini score memiliki hubungan yang signifikan terhadap total score sehingga

dapat dikatakan instrument penelitian ini valid. Bila dilihat dari hasil responden sebanyak 100 orang, maka hasil yang didapat tersebut dikatakan valid 100% sebagaimana hasil penghitungan dengan SPSS versi 16.

Tabel 3. Uji Reabilitas

Reliability Statistic	
Cronbach's alpha	N of items
0,777	22

(sumber: Data Primer Diolah, 2018)

Uji reabilitas dilakukan untuk menunjukkan konsistensi alat ukur dalam mengukur gejala yang sama (Saifudin, 1997). Uji reabilitas ini dilakukan juga untuk menguji keandalan alat ukur dan hasil yang diperoleh terhindar dari kesalahan

pengukuran. Dalam pengujian ini dilakukan dengan penghitungan nilai *alpha cronbach* yaitu suatu metode yang dikembangkan oleh Cronbach (1979). Berdasarkan Tabel 3 di atas hasil nilai alpha cronbach, diketahui bahwa nilai *alpha cronbach* sebesar

0,777 sesuai dengan teori menurut Kaplan dan Sacuzzo (1993) yang menyatakan bahwa nilai koefisien reabilitas alat ukur yang harus dipenuhi

sebesar 0,7. Maka dapat dikatakan bahwa instrumen alat ukur penelitian ini telah reliable.

Tingkat Kepentingan Konsumen terhadap Atribut Kopi

Tabel 4. Tingkat Kepentingan

	Importance Values
attrib1	19.388
attrib2	15.991
attrib3	18.947
attrib4	13.188
attrib5	13.865
attrib6	11.226
attrib7	7.394

Averaged Importance Score

(sumber: Data Primer Diolah, 2018)

Berdasarkan Tabel 4 diatas hasil pengolahan data dengan aplikasi SPSS 16 diatas, dapat diketahui bahwa tingkat kepentingan atribut tertinggi yang menjadi perhatian konsumen dalam keputusan membeli dan mengonsumsi kopi lokal Sumatera (kopi Mandailing, kopi Sidikalang, kopi Gayo dan kopi Lintong) adalah citarasa (19,38%), aroma (18,94%), harga (15,99%), ampas kopi (13,86%), penyajian kopi (13,18%), efek (11,22%) dan cara penyeduhan (7,39%). Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gudono (2015) bahwa atribut dengan tingkat kepentingan (*importance values*) terbesar atau tertinggi merupakan atribut yang lebih diperhatikan oleh konsumen daripada atribut lainnya dan merupakan atribut yang paling mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli dan mengonsumsi kopi. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan utama konsumen dalam membeli kopi adalah citarasa, aroma dan harga. Sedangkan atribut yang tidak

selalu dipertimbangkan adalah efek dan cara penyeduhan.

1. Tingkat Kepentingan Konsumen dengan Pendapatan Rp. 2 juta – 3 juta

Hasil pengolahan data dengan aplikasi SPSS 16 dapat diketahui bahwa tingkat kepentingan atribut tertinggi yang menjadi perhatian konsumen dalam keputusan membeli dan mengonsumsi kopi untuk responden dengan tingkat pendapatan per bulan Rp 2.000.000 sampai Rp 3.000.000 adalah citarasa (21,26%), aroma (18,87%), harga (16,86%), ampas kopi (14,65%), penyajian kopi (10,87%), efek (10,58%) dan cara penyeduhan (6,88%). Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan utama konsumen dalam membeli dan mengonsumsi kopi untuk responden dengan tingkat pendapatan per bulan Rp.2.000.000 sampai Rp 3.000.000 adalah citarasa, aroma dan harga. Sedangkan atribut yang tidak selalu dipertimbangkan adalah efek dan cara penyeduhan.

Preferensi Konsumen pendapatan Rp 2 - 3 juta berdasarkan Nilai *Maximum Utility Rule*

Tabel 5. Kombinasi paling disukai responden

ID	citarasa	harga	aroma	saji	ampas	efek	seduh	Total	Constant	Utilities
12	0.264	0.003	0.274	0.161	0.056	0.068	-0.010	0.816	2.903	3.719
14	-0.122	0.160	0.274	0.161	0.056	0.068	0.010	0.607	2.903	3.510
2	0.264	-0.163	0.045	0.161	0.056	0.068	-0.010	0.421	2.903	3.324
9	0.264	0.003	0.274	-0.161	-0.007	-0.068	0.010	0.315	2.903	3.218
21	-0.142	0.160	0.045	0.161	-0.007	0.068	0.010	0.295	2.903	3.198
18	0.264	0.160	-0.319	0.161	-0.049	0.068	-0.010	0.275	2.903	3.178
15	0.264	0.160	-0.319	0.161	-0.007	-0.068	-0.010	0.181	2.903	3.084
1	-0.142	0.160	0.274	-0.161	-0.049	0.068	-0.010	0.140	2.903	3.043
10	-0.142	0.003	0.045	0.161	-0.007	0.068	-0.010	0.118	2.903	3.021
8	-0.122	-0.163	0.274	0.161	-0.007	-0.068	-0.010	0.065	2.903	2.968
7	0.264	-0.163	0.045	-0.161	-0.049	0.068	0.010	0.014	2.903	2.917
20	-0.142	-0.163	0.274	0.161	-0.049	-0.068	-0.010	0.003	2.903	2.906
19	-0.122	0.003	0.045	0.161	-0.049	-0.068	-0.010	-0.040	2.903	2.863
22	-0.142	0.160	0.045	-0.161	-0.049	0.068	-0.010	-0.089	2.903	2.814
5	-0.122	0.160	0.045	-0.161	0.056	-0.068	-0.010	-0.100	2.903	2.803
13	-0.122	0.003	0.274	-0.161	-0.049	-0.068	0.010	-0.113	2.903	2.790
3	-0.122	0.003	-0.319	0.161	-0.049	0.068	0.010	-0.248	2.903	2.655
4	-0.142	-0.163	0.045	-0.161	-0.049	0.068	-0.010	-0.412	2.903	2.491
11	-0.122	-0.163	0.045	-0.161	0.056	-0.068	-0.010	-0.423	2.903	2.480
16	-0.142	-0.163	-0.319	0.161	0.056	-0.068	0.010	-0.465	2.903	2.438
6	-0.142	0.003	-0.319	-0.161	0.056	0.068	-0.010	-0.505	2.903	2.398
17	-0.122	-0.163	-0.319	-0.161	-0.007	0.068	-0.010	-0.714	2.903	2.189

(Sumber: Data diolah SPSS, 2018)

Berdasarkan Tabel 5 diatas, kombinasi aribut paling disukai pilihan responden dengan pendapatan 2-3 juta per bulan adalah kombinasi 12 yaitu kopi lokal Sumatera (kopi Mandailing, kopi Sidikalang, kopi Gayo dan kopi Lintong) dengan citarasa nikmat dan standart (*sweetnes*), harga murah, aroma tajam dan khas, penyajian kopi panas, ampas sedang, efek keasaman yang rendah (*low accid*) dan penyeduhan secara tradisional.

2. Tingkat Kepentingan Konsumen dengan Pendapatan Konsumen Rp. 3 juta – 5 juta

Hasil pengolahan data dengan aplikasi SPSS 16 dapat diketahui bahwa tingkat kepentingan atribut tertinggi yang menjadi perhatian konsumen dalam

keputusan membeli dan mengkonsumsi kopi untuk responden dengan tingkat pendapatan per bulan Rp 3.000.000 sampai Rp 5.000.000 adalah citarasa (19,62%), aroma (19,17%), penyajian (15,34%), harga (14,76%), ampas kopi (13,83%), efek (10,13%) dan cara penyeduhan (7,13%). Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan utama konsumen dalam membeli dan mengkonsumsi kopi untuk responden dengan tingkat pendapatan per bulan Rp 3.000.000 sampai Rp 5.000.000 adalah citarasa, aroma dan penyajian. Sedangkan atribut yang tidak selalu dipertimbangkan adalah efek dan cara penyeduhan.

Preferensi Konsumen pendapatan Rp 3 - 5 juta berdasarkan Nilai *Maximum Utility Rule*

Tabel 6. Kombinasi paling disukai responden

ID	citarasa	harga	aroma	saji	ampas	efek	seduh	Total	Constant	Utilities
14	0.100	0.120	0.223	0.160	0.080	0.112	0.005	0.800	3.068	3.868
12	0.043	-0.023	0.223	0.160	0.080	0.112	-0.005	0.590	3.068	3.658
8	0.100	-0.097	0.223	0.160	-0.143	0.112	-0.005	0.350	3.068	3.418
2	0.043	-0.097	0.010	0.160	0.080	0.112	-0.005	0.303	3.068	3.371
18	0.043	0.120	-0.233	0.160	0.063	0.112	-0.005	0.260	3.068	3.328
1	-0.143	0.120	0.223	-0.160	0.063	0.112	-0.005	0.210	3.068	3.278
19	0.100	-0.023	0.010	0.160	0.063	-0.112	-0.005	0.193	3.068	3.261
3	0.100	-0.023	-0.233	0.160	0.063	0.112	0.005	0.184	3.068	3.252
21	-0.143	0.120	0.010	0.160	-0.143	0.112	0.005	0.121	3.068	3.189
13	0.100	-0.023	0.223	-0.160	0.063	-0.112	0.005	0.096	3.068	3.164
20	-0.143	-0.097	0.223	0.160	0.063	-0.112	-0.005	0.089	3.068	3.157
5	0.100	0.120	0.010	-0.160	0.080	-0.112	-0.005	0.033	3.068	3.101
7	0.043	-0.097	0.010	-0.160	0.063	0.112	0.005	-0.024	3.068	3.044
10	-0.143	-0.023	0.010	0.160	-0.143	0.112	-0.005	-0.032	3.068	3.036
22	-0.143	-0.023	0.010	-0.160	0.063	0.112	-0.005	-0.146	3.068	2.922
9	0.043	-0.023	0.223	-0.160	-0.143	-0.112	0.005	-0.167	3.068	2.901
15	0.043	0.120	-0.233	0.160	-0.143	-0.112	-0.005	-0.170	3.068	2.898
11	0.100	-0.097	0.010	-0.160	0.080	-0.112	-0.005	-0.184	3.068	2.884
4	-0.143	-0.097	0.010	-0.160	0.063	0.112	-0.005	-0.220	3.068	2.848
16	-0.143	-0.097	-0.233	0.160	0.080	-0.112	0.005	-0.340	3.068	2.728
6	-0.143	-0.023	-0.233	-0.160	0.080	0.112	-0.005	-0.372	3.068	2.696
17	0.100	-0.097	-0.233	-0.160	-0.143	0.112	-0.005	-0.426	3.068	2.642

(Sumber: Data diolah SPSS, 2018)

Berdasarkan Tabel 6 diatas, kombinasi aribut paling disukai pilihan

responden dengan pendapatan Rp 3 - 5 juta adalah kombinasi 14 yaitu kopi lokal

Sumatera (kopi Mandailing, kopi Sidikalang, kopi Gayo dan kopi Lintong) dengan citarasa nikmat dan manis (*sweetnes*), harga terjangkau, aroma tajam dan khas, penyajian kopi panas, ampas sedang, efek keasaman yang rendah (*low accid*) dan penyeduhan secara manual (mesin seduh).

3. Tingkat Kepentingan Konsumen dengan Pendapatan Konsumen Rp. 5 juta – 10 juta

Hasil pengolahan data dengan aplikasi SPSS 16 dapat diketahui bahwa tingkat kepentingan atribut tertinggi yang menjadi perhatian konsumen dalam keputusan membeli dan mengkonsumsi

kopi untuk responden dengan tingkat pendapatan per bulan Rp 5.000.000 sampai Rp 10.000.000 adalah aroma (18,84%), citarasa (18,00%), harga (17,41%), ampas kopi (13,74%), efek (12,51%), penyajian (11,35%) dan cara penyeduhan (7,13%). Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan utama konsumen dalam membeli dan mengkonsumsi kopi untuk responden dengan tingkat pendapatan per bulan Rp 5.000.000 sampai Rp 10.000.000 adalah aroma, citarasa dan harga. Sedangkan atribut yang tidak selalu dipertimbangkan adalah penyajian dan cara penyeduhan.

Preferensi Konsumen pendapatan Rp 5 - 10 juta berdasarkan Nilai *Maximum Utility Rule*

Tabel 7. Kombinasi paling disukai responden (pendapatan 5-10 juta)

ID	citarasa	harga	aroma	saji	ampas	efek	seduh	Total	Constant	Utilities
14	0.007	0.148	0.273	0.143	-0.019	0.182	0.013	0.747	3.134	3.881
12	0.012	-0.040	0.273	0.143	-0.019	0.182	-0.013	0.538	3.134	3.672
1	-0.019	0.148	0.273	-0.143	0.085	0.182	-0.013	0.513	3.134	3.647
8	0.007	-0.108	0.273	0.143	-0.066	0.182	-0.013	0.418	3.134	3.552
21	-0.019	0.148	-0.003	0.143	-0.066	0.182	0.013	0.398	3.134	3.532
18	0.012	0.148	-0.269	0.143	0.085	0.182	-0.013	0.288	3.134	3.422
4	-0.019	-0.108	0.273	-0.143	0.085	0.182	-0.013	0.257	3.134	3.391
2	0.012	-0.108	-0.003	0.143	-0.019	0.182	-0.013	0.194	3.134	3.328
10	-0.019	-0.040	-0.003	0.143	-0.066	0.182	-0.013	0.184	3.134	3.318
20	-0.019	-0.108	0.273	0.143	0.085	-0.182	-0.013	0.179	3.134	3.313
3	0.007	-0.040	-0.269	0.143	0.085	0.182	0.013	0.121	3.134	3.255
5	0.007	0.148	0.273	-0.143	-0.019	-0.182	-0.013	0.071	3.134	3.205
22	-0.019	-0.040	-0.003	-0.143	0.085	0.182	-0.013	0.049	3.134	3.183
7	0.012	-0.108	-0.003	-0.143	0.085	0.182	0.013	0.038	3.134	3.172
13	0.007	-0.040	0.273	-0.143	0.085	-0.182	0.013	0.013	3.134	3.147
19	0.007	-0.040	-0.003	0.143	0.085	-0.182	-0.013	-0.003	3.134	3.131
6	-0.019	0.148	-0.269	-0.143	-0.019	0.182	-0.013	-0.133	3.134	3.001
9	0.012	-0.040	0.273	-0.143	-0.066	-0.182	0.013	-0.133	3.134	3.001
15	0.012	0.148	-0.269	0.143	-0.066	-0.182	-0.013	-0.227	3.134	2.907
17	0.007	-0.108	-0.269	-0.143	-0.066	0.182	-0.013	-0.410	3.134	2.724
16	-0.019	-0.108	-0.269	0.143	-0.019	-0.182	0.013	-0.441	3.134	2.693
11	0.007	-0.108	-0.003	-0.143	-0.019	-0.182	-0.013	-0.461	3.134	2.673

(Sumber: Data diolah SPSS, 2018)

Berdasarkan Tabel 7 diatas, kombinasi aribut paling disukai pilihan responden dengan pendapatan Rp 5 - 10 juta per bulan adalah kombinasi 14 yaitu kopi lokal Sumatera (kopi Mandailing, kopi Sidikalang, kopi Gayo dan kopi Lintong) dengan citarasa nikmat dan manis (*sweetnes*), harga terjangkau, aroma tajam dan khas, penyajian kopi panas, ampas sedang, efek keasaman yang rendah (*low accid*) dan penyeduhan secara manual (mesin seduh).

4. Tingkat Kepentingan Konsumen dengan Pendapatan Konsumen diatas Rp. 10 juta

Hasil pengolahan data dengan aplikasi SPSS 16 dapat diketahui bahwa

tingkat kepentingan atribut tertinggi yang menjadi perhatian konsumen dalam keputusan membeli dan mengkonsumsi kopi untuk responden dengan tingkat pendapatan per bulan diatas Rp 10.000.000 adalah efek (23,01%), citarasa (16,93%), harga (16,93%), aroma (15,60%), ampas kopi (10,31%), penyajian (7,14%) dan cara penyeduhan (6,34%). Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan utama konsumen dalam membeli dan mengkonsumsi kopi untuk responden dengan tingkat pendapatan per bulan diatas Rp 10.000.000 adalah efek/tingkat keasaman, citarasa dan harga. Sedangkan atribut yang tidak selalu

dipertimbangkan adalah penyajian dan cara penyeduhan.

Preferensi Konsumen pendapatan diatas 10 juta berdasarkan Nilai *Maximum Utility Rule*

Tabel 8. Kombinasi paling disukai responden

ID	citarasa	harga	aroma	saji	ampas	efek	seduh	Total	Constant	Utilities
14	0.333	0.167	-0.333	0.125	-0.167	0.500	0.000	1.291	3.208	4.499
3	0.333	0.167	-0.167	0.125	0.167	0.500	0.000	1.125	3.208	4.333
8	0.333	-0.333	0.333	0.125	0.000	0.500	0.000	0.958	3.208	4.166
12	0.000	0.167	0.333	0.125	-0.167	0.500	0.000	0.958	3.208	4.166
18	0.000	0.167	-0.167	0.125	0.167	0.500	0.000	0.792	3.208	4.000
1	-0.333	0.167	0.333	-0.125	0.167	0.500	0.000	0.709	3.208	3.917
13	0.333	0.167	0.333	-0.125	0.167	-0.500	0.000	0.375	3.208	3.583
10	-0.333	0.167	-0.167	0.125	0.000	0.500	0.000	0.292	3.208	3.500
21	-0.333	0.167	-0.167	0.125	0.000	0.500	0.000	0.292	3.208	3.500
22	-0.333	0.167	-0.167	-0.125	0.167	0.500	0.000	0.209	3.208	3.417
17	0.333	-0.333	-0.167	-0.125	0.000	0.500	0.000	0.208	3.208	3.416
19	0.333	0.167	-0.167	0.125	0.167	-0.500	0.000	0.125	3.208	3.333
7	0.000	-0.333	-0.167	-0.125	0.167	0.500	0.000	0.042	3.208	3.250
2	0.000	-0.333	-0.167	0.125	-0.167	0.500	0.000	-0.042	3.208	3.166
6	-0.333	0.167	-0.167	-0.125	-0.167	0.500	0.000	-0.125	3.208	3.083
9	0.000	0.167	0.333	-0.125	0.000	-0.500	0.000	-0.125	3.208	3.083
4	-0.333	-0.333	-0.167	-0.125	0.167	0.500	0.000	-0.291	3.208	2.917
15	0.000	0.167	-0.167	0.125	0.000	-0.500	0.000	-0.375	3.208	2.833
5	0.333	0.167	-0.167	-0.125	-0.167	-0.500	0.000	-0.459	3.208	2.749
20	-0.333	-0.333	0.333	0.125	0.167	-0.500	0.000	-0.541	3.208	2.667
11	0.333	-0.333	-0.167	-0.125	-0.167	-0.500	0.000	-0.959	3.208	2.249
16	-0.333	-0.333	-0.167	0.125	-0.167	-0.500	0.000	-1.375	3.208	1.833

(Sumber: Data diolah SPSS, 2018)

Berdasarkan Tabel 8 diatas, kombinasi aribut paling disukai pilihan responden dengan pendapatan diatas Rp 5 juta per bulan adalah kombinasi 14 yaitu kopi lokal Sumatera dengan citarasa nikmat dan manis (*sweetnes*), harga terjangkau, aroma tajam dankhas, penyajian kopi panas, ampas sedang, efek keasaman yang rendah (*low accid*) dan penyeduhan secara manual (mesin seduh).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Model kombinasi yang paling disukai konsumen kopi lokal Sumatera (kopi Mandailing, kopi Sidikalang, kopi Gayo dan kopi Lintong) untuk konsumen dengan pendapatan Rp. 2 – 3 juta adalah kombinasi 12. Sedang untuk konsumen dengan pendapatan Rp. 3-5 juta, Rp 5-10 juta dan Rp diatas 10 juta memilih kombinasi 14.
2. Tingkat kepentingan atribut tertinggi yang menjadi perhatian konsumen dalam keputusan membeli dan mengkonsumsi kopi lokal Sumatera (kopi Mandailing, kopi Sidikalang, kopi Gayo dan kopi Lintong) adalah citarasa (19,38%), aroma (18,94%), harga (15,99%), ampas kopi

(13,86%), penyajian kopi (13,18%), efek (11,22%) dan cara penyeduhan (7,39%).

DAFTAR PUSTAKA

- Kotler, Philip & Amstrong, Gary. (2008). *Prinsip - prinsip Pemasaran (Buku 1, Edisi 12)*. Jakarta: Erlangga.
- Orme, B.K. (2000). *Sample Size For Conjoint Analysis (online)*
- Rahardjo, Pudji. (2012). *Panduan Budidaya dan Pengolahan Kopi Arabika dan Robusta*. Penebar Swadaya. Jakarta
- Schiffman, Leon & Kanuk, Leslie Lazar. (2008). *Consumer Behaviour 7th*. New Jearsey: Pearson.
- Simamora, Bilson. (2002). *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Simamora, Bilson. (2004). *Analisis Multivariat Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Press.
- Surjandari, Isti. (2009). *Conjoint Analysis: Konsep dan Aplikasi*, Penerbit Universitas Trisakti
- Wijaya, Tony. (2009). *Analisis Data Penelitian menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

**FORMAT PENULISAN ARTIKEL JURNAL
UMN AL-WASHLIYAH
TAHUN 2016**

Nama ¹⁾

Nama ²⁾

Nama Universitas
Alamat lengkap Universitas
e-mail : email pemakalah

Abstrak (Indonesia Dan Inggris)

*Ini adalah penjelasan mengenai format penulisan makalah yang digunakan pada Pemaparan seminar nasional hasil penelitian. Petunjuk ini sekaligus juga dapat dijadikan **template** penulisan makalah dengan memanfaatkan style/formatting yang telah tersedia. Makalah ditulis semuanya dalam huruf **Times New Roman** berukuran 12 pt (kecuali Abstrak 11 pt dan judul 12 pt) dan diawali dengan judul makalah yang ditulis dalam **HURUF BESAR**, nama penulis disertai nama instansi dan abstrak. Abstrak ditulis 2 bahasa (indonesia dan inggris) menggunakan huruf miring berukuran 11 pt dan terdiri kurang lebih 200 kata dengan margin kiri 3 cm, margin kanan, atas dan bawah masing-masing 2,5 cm. Jarak antar baris 1 spasi,. Pada akhir abstrak diberikan kata kunci yang berjumlah 3 – 5 kata/frase kata.*

Kata Kunci : format penulisan, hasil penelitian, pemaparan penelitian.

Pendahuluan

Prosiding pemaparan hasil penelitian akan disusun dari makalah yang dikirimkan ke panitia. Panitia akan melakukan penyuntingan pada artikel yang masuk agar sesuai dengan format yang telah ditentukan. Makalah sebaiknya disusun dengan urutan topik bahasan sebagai berikut :

1. **PENDAHULUAN** : berisi latar belakang, tujuan, pendekatan pemecahan masalah;
2. **METODE**;
3. **HASIL DAN PEMBAHASAN**;
4. **KESIMPULAN**;
5. **DAFTAR PUSTAKA**.

Petunjuk Umum

Makalah ditulis dalam 2 kolom menggunakan huruf Time New Roman dengan ukuran huruf 12 pt, ditulis dalam jarak 1 spasi. Kertas yang digunakan ukuran A4, batas kiri 3 cm, batas atas, kanan dan bawah masing-masing 2,5 cm dengan batas minimal 6 halaman dan maksimal 10 halaman.

Penulisan Gambar dan Tabel

Gambar dan tabel dituliskan menggunakan format rata tengah. Setiap gambar dan tabel haruslah diberi nomor dan judul serta diacu pada tulisan. Nomor dan judul gambar diletakkan di bawah gambar, seperti terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Judul Gambar

Nomor dan judul tabel diletakkan di atas tabel yang bersangkutan. Tabel 1 menunjukkan contoh penulisan nomor dan judul tabel. Untuk memudahkan penomoran dan pemberian judul gambar serta tabel dapat digunakan fasilitas Caption. Warna pada gambar dan tabel akan diusahakan tetap dipertahankan pada prosiding dalam bentuk CD, namun untuk prosiding cetak hanya tersedia dalam format hitam-putih (*black and white*).

Tabel 1. Contoh penulisan nomor dan judul tabel

Penulisan Persamaan

Persamaan ditulis menggunakan format rata tengah dan diberi nomor yang ditulis di dalam kurung yang ditempatkan di margin kanan dari baris persamaan tersebut. Persamaan sebaiknya dituliskan menggunakan MS Equation pada MS Word. Persamaan (1) menunjukkan contoh penulisan persamaan.

$$s = v.t \quad (1)$$

Penulisan Kutipan dan Daftar Pustaka

Penulisan sumber kutipan menggunakan format urutan abjad, 1 spasi. Daftar Pustaka hanya memuat Pustaka yang secara langsung diacu/menjadi sumber kutipan. Berikut adalah beberapa contoh penulisan daftar pustaka.

- DiMasi, JA., Grabowski, HG., (2004), Patents and R&D Incentives: Comments on the Hubbard and Love Trade Framework for Financing Pharmaceutical R&D, Tufts Center for the Study of Drug Development, Tufts University and Department of Economics, Duke University, USA.
- Global Tax Services, (2007), ASPAC R&D Incentives Services, KPMG International;
- Kementerian Riset dan Teknologi, (2010), Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek 2010 -2014, Jakarta.
- William N Dunn, (1998), Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Zee, H.H., Stotsky, J.G., and Ley, E. (2002), Tax Incentive for Business Investment: A Primer for Policy Makers in Developing Countries, World Development, Vol. 30, No.9. pp 1497 – 1516.

**PERNYATAAN KEASLIAN
KARYA TULIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Email :

No. HP :

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang saya yang diterbitkan dalam Jurnal Elektronik (JP2SH) UMN Al Washliyah dengan judul:

.....

.....

Merupakan hasil karya saya sendiri, serta bukan terjemahan, dan belum pernah dipublikasikan secara keseluruhan maupun sebagian, di media cetak, elektronik, maupun *online*.

Saya bersedia menanggung segala tuntutan, jika di kemudian hari ada pihak yang merasa dirugikan, baik secara pribadi maupun tuntutan secara hukum.

Demikian pernyataan ini saya tulis dengan jujur dan penuh tanggung jawab.

..... ,.....

Hormat saya,

materai 6000

Nama lengkap

Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial dan Humaniora ini terindeks oleh
Google Scholar dan Berbasis Open Acces Journal



www.jurnal.umnaw.ac.id/index.php/JPSS